

**SEJARAH PEREKONOMIAN KOTA PALEMBANG:
Masa Pemerintahan Kolonial Belanda, 1825-1942 M**



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
guna Memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S. Hum)
dalam Ilmu Sejarah dan Kebudayaan Islam**

Oleh:

**INDRI SAFITRI
NIM. 12420024**

**JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2017**

HALAMAN PENGESAHAN

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudari Indri Safitri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
di-
tempat

Assalamualaikum Wr, Wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul:

**“Sejarah Perekonomian Kota Palembang: Masa Kolonial Belanda
Tahun 1825-1942 M”**

Yang ditulis oleh:

Nama : Indri Safitri
NIM : 12 42 00 24
Prodi : Sejarah dan Kebudayaan Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat dilanjutkan ke Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Humaniora Prodi Sejarah Kebudayaan Islam.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palembang, Maret 2017

Dosen Pembimbing I

Dr. Endang Rochmiatun, M.Hum

NIP. 19710727 199703 2 005

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudari Indri Safitri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
di-
tempat

Assalamualaikum Wr, Wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul:

**“Sejarah Perekonomian Kota Palembang: Masa Kolonial Belanda
Tahun 1825-1942 M”**

Yang ditulis oleh:

Nama : Indri Safitri
NIM : 12 42 00 24
Prodi : Sejarah dan Kebudayaan Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat dilanjutkan ke Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Humaniora Prodi Sejarah Kebudayaan Islam.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palembang, Maret 2017

Dosen Pembimbing II

Kms. A. Rachman Panji, S.Pd., M. Si

NIP. 19730916 200501 1 004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini dibuat oleh INDRI SAFITRI NIM 12420024

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Palembang, Maret 2017

Pembimbing I

Dr. Endang Rochmiatun, M.Hum

NIP. 19710727 199703 2 005

Palembang, Maret 2017

Pembimbing II

Kms. A. Rachman Panji, S.Pd., M. Si

NIP. 19730916 200501 1 004

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu lembaga perguruan tinggi, dan sejauh pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Palembang, Mei 2017

Yang menyatakan,

INDRI SAFITRI
NIM: 12420024

MOTO DAN PERSEMBAHAN

*“Ikatlah Ilmu dengan Menuliskanya”
(Ali bin Abi Thalib)*

*“Sukses adalah ketika kita mengalahkan diri sendiri tanpa
“BEJ”, Blame-Excuse-Justice,
tanpa menyalahkan lingkungan-
memberi alasan-mencari pembenaran”
(Indri Safitri)*

Dengan rasa syukur dan ucapan terima kasih skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Allah Swt yang telah memberikan kemudahan dalam proses penyelesaian skripsi ini
- Ayahanda Darminto dan Ibunda Karmini (almh.) yang senantiasa mendo'akan demi keberhasilanku.
- Saudara-saudara ku yang tersayang, Dasriani, Dwi Wahyono dan Sahrul Rohmadi yang selalu mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
- Sahabat-sahabatku seperjuanganku, Pebrian Dewi Yolanda, S. E., Putri Suci Novrianti, Clara Ika Phalupie, S. Pd, Oksi Lilis Pangestuti Putri, S. Hum., Arnika, S. Hum., Surnanto, S. Hum., Dedi Firmansah, S. Hum., serta Chandra Wiranata, S.Hum.,
- Almamaterku tercinta, UIN Raden Fatah Palembang

KATA PENGANTAR

Alahamdulillahi Robbil'alamin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan taufik, hidayah, serta ridhonya kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam tidak lupa saya hanturkan kepada kekasih Allah SWT, junjungan umat yakni Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas yang harus diselesaikan sebagai syarat dalam rangka menyelesaikan masa kuliah pada program Strata Satu (S1) pada Fakultas Adab dan Humaniora, Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). Adapun judul skripsi ini adalah **“Sejarah Perekonomian Kota Palembang: Masa Kolonial Belanda Tahun 1825-1942 M”**

Selanjutnya penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan petunjuk dari berbagai pihak maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bpk. Prof. HM Sirozi MA PhD, Rektor UIN Raden Fatah Palembang beserta stafnya, yang telah memimpin UIN ini dengan baik.
2. Bpk. Dr. Nor Huda, MA, selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang beserta staf yang telah memberikan kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Kontribusi besar atas penyelesaian skripsi ini adalah Ibu Endang Rochmiatun, M.Hum selaku pembimbing pertama yang selama ini banyak meluangkan waktu

serta memberikan saran dan mengarahkan sampai selesainya skripsi ini. Serta Bpk. Kemas Rachmat Ari Panji, S. Pd., M. Hum selaku pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan dukungan berupa wawasan yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Ketua jurusan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), Bpk. Padila, M. Hum dan sekretaris yang telah banyak memberikan motivasi penuh kepada penulis.
5. Segenap staf pengajar/ Dosen Fakultas Adab dan Humaniora yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan.
6. Demi terwujudnya perkuliahan selama 4 tahun, terima kasih Beasiswa Bidik Misi dari Kementrian Agama memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan ke jenjang S1.
7. Kedua pahlawan hidupku yaitu orang tua saya yang selalu memberikan doa dan support baik berupa material maupun spiritual. Saudara-saudara saya yang ikut membantu dalam motivasi membangun saya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman sejurusan (Mbk. Ida, Nissa, Nai, Kasih, Kiki, Indah, Lutfi, Jamal, Dembri, Aldius, Dadang, Linda, Juway, Firman, Khusnul, Jois, Qory, Mahmud, Tezar, Doni, Mery, Omi, Yadi, Desi, Ana, serta adik-adik PESE (Yunita, Tri, Meta, Zulfikri, Yusi, Yuni, Yuli, Mely, Muslimah, Saiful, Yeni, Endah, Sisi, Toni, Neni, Idwar, dll.) indahnya kebersamaan yang telah dilalui saat kuliah maupun diskusi luar jam kuliah. Serta teman dekatku yang selalu suport dalam pembuatan skripsi ini. Semua pihak yang belum sempat disebutkan satu

persatu, namun telah memberi andil kepada penulisan dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasihku untukmu semuanya.

Atas segala bantuan dan jasa kalian sepenuhnya, penulis serahkan kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT membalas dengan berlipat ganda. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri pribadi dan pembaca sekalian. Aamiin ya Robbal'amin.

Palembang, Mei 2017

INDRI SAFITRI
NIM. 12420024

INTISARI

*Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam
Program Starata I Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
Skripsi, 2017*

INDRI SAFITRI, Sejarah Perekonomian Kota Palembang: Masa Kolonial Belanda Tahun 1825-1942 M

i+ 110 hlm+ lampiran

Penelitian ini mendeskripsikan rangkaian sejarah perekonomian Kota Palembang pada masa Kolonial Belanda. Kerangka pikir dari pokok permasalahan karena kenyataan ekonomi yang perlu dijelaskan secara rinci, yaitu: [1] keadaan perekonomian Kota Palembang sebelum masa Keresidenan Belanda; [2] kondisi perekonomian Kota Palembang masa Keresidenan Belanda; dan [3] dampak perekonomian masa Keresidenan Belanda terhadap perubahan sosial-keagamaan di Palembang.

Penelitian ini berjudul Sejarah Perekonomian Kota Palembang: Masa Kolonial Belanda Tahun 1825-1942 M merupakan penelitian *library research* dengan pendekatan (*Historical Approach*). Penelitian ini menitikberatkan pada data sejarah perekonomian pada masa Kolonial Belanda. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Arsip Nasional Republik Indonesia yaitu *Algemeen Jaarlijksch Verlagen Van de Resident Palembang 1832-1846* dan *Brievenbook Van de Resident Palembang aan Gouverneur General 1828-1829*, sedangkan data sekunder berasal dari buku-buku artikel dan laporan hasil penelitian yang terkait dengan sejarah perekonomian di Palembang pada masa Kolonial Belanda antara tahun 1825-1942.

Penelitian tentang sejarah perekonomian lebih difokuskan pada gambaran perekonomian masa Keresidenan Palembang. Hasil dari analisis yang dilakukan terdapat peralihan perekonomian dari masa Kesultanan Palembang Darussalam ke masa Kolonial Belanda. Peralihan tersebut menimbulkan perubahan ekonomi dari perdagangan ke industri. Hal ini berdasarkan kebijakan Kolonial Belanda melalui penanaman tanaman industri seperti kapas, karet serta kopi. Lalu, pada Keresidenan Palembang dilakukan pembangunan kawasan pertambangan minyak dan batu bara. Atas kebijakan tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan ekspor. Di lain pihak kebijakan ekonomi Kolonial Belanda menimbulkan dampak langsung bagi masyarakat di Keresidenan Palembang.

Kata kunci: *Perekonomian, Keresidenan Palembang, industri.*

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Nota Dinas Pembimbing I	iii
Nota Dinas Pembimbing II	iv
Persetujuanpembimbing	v
Pernyataan Keaslian	vi
Motto Dan Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
Intisari	xi
Daftar Isi	xii
Daftar Singkatan Dan Istilah	xiv
Daftar Gambar	xv

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
D. Definisi Operasional	14
E. Tinjauan Pustaka	16
F. Kerangka Teoritis	20
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Pembahasan	29

BAB II: KONDISI PEREKONOMIAN MASA KESULTANAN PALEMBANG DARUSSALAM TAHUN 1724-1825

A. Perekonomian Masa Awal Kesultanan Palembang Darussalam Tahun 1659-1724 M	
1. Kondisi Ekonomi Masa Kerajaan Palembang Tahun 1455-1659 M.....	33
2. Kondisi Ekonomi Masa Awal Kesultanan Palembang Darussalam Tahun 1659-1724 M	37
3. Komoditi Perdagangan Masa Awal Kesultanan Palembang Darussalam Tahun 1659-1724 M	40
B. Perekonomian Masa Kejayaan Kesultanan Palembang Darussalam Tahun 1724-1803 M	
1. Kebijakan Pemerintah dalam Membangun Perekonomian Kesultanan .	43
2. Peranan Timah dan Lada dalam Perekonomian Kesultanan Palembang	49

C. Perekonomian Sebelum Keruntuhan Kesultanan Palembang Darussalam Tahun 1803-1825 M	
1. Usaha Mempertahankan Kesultanan Palembang Darussalam.....	52
2. Akhir dari Perekonomian Kesultanan Palembang Darussalam	54

BAB III: KONDISI PEREKONOMIAN DI KERESIDENAN PALEMBANG

A. Kebijakan Administratif di Keresidenan Palembang	62
B. Kebijakan Keresidenan Palembang pada Bidang Agraria.....	66
C. Kebijakan Keresidenan Palembang pada Bidang Ekonomi	69
1. Tanaman yang dikembangkan pada perkebunan di Keresidenan Palembang pada 1829-1942 M.....	70
2. Perkembangan pertambangan di Keresidenan Palembang abad ke 20...	79
3. Kondisi perkebunan rakyat di Keresidenan Palembang 1830-1942.....	84

BAB IV: DAMPAK PEREKONOMIAN TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL KEAGAMAAN MASA KERESIDENAN PALEMBANG

A. Dampak Pembangunan Kolonial Belanda pada Bidang Ekonomi	
1. Kota Palembang sebagai Gemeente	89
2. Pembangunan sarana dan prasarana	90
3. Pembangunan Pusat-Pusat Perekonomian.....	94
B. Dampak Perekonomian pada Bidang Sosial	
1. Bidang Sosial di Keresidenan Palembang	97
2. Pada Ibadah Haji di Keresidenan Palembang.....	101
3. Bidang Pendidikan.....	103
C. Dampak Perekonomian Keresidenan Palembang pada Bidang Politik ...	106

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	111
B. Saran	113

Daftar Pustaka

Lampiran

Lampiran 1: Catatan Negara Mengenai Perkiraan Penjualan Komoditas Barang

Dagang Palembang tahun 1839

Lampiran 2: Catatan Negara Mengenai Perkiraan Penjualan Komoditas Barang

Dagang Palembang tahun 1840

Lampiran 3: Denah Kota Palembang Tahun 1871

DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

ANRI	: Arsip Nasional Republik Indonesia
KPD	: Kesultanan Palembang Darussalam
NHH	: <i>Nederlandsche Handel Maatschaapij</i>
KITLV	: <i>Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde</i>
BPM	: <i>Bataafsche Petroleum Maatschappij</i>
NKPM	: <i>Nederlandsche Koloniale Petroleum Maatschappij</i>
STANVAC	: <i>Standaard Vacuum Oil Company</i>
<i>Jung</i>	: Perahu besar yang berisi barang-barang dagang
<i>Tiban</i>	: Pertukaran barang dagang dengan barang impor
<i>Tukon</i>	: Pertukaran barang dagang dengan uang
<i>Pasirah</i>	: Kepala Marga atau sering disebut Depati
<i>Syahbandar</i>	: Kepala Pelabuhan
<i>Afdeeling</i>	: Bagian kewilayahan
<i>Onderafdeeling</i>	: Bagian wilayah berada di bawah afdeeling/ daerah pedalaman
<i>Hinterland</i>	: Daerah pemasok dan pemenuhan kebutuhan komoditi ekspor.
<i>Onderneming</i>	: Perkebunan yang diusahakan secara besar-besaran dengan menggunakan teknologi
<i>Kaum Planters</i>	: Pengusaha/juragan perkebunan
<i>Liberalisme</i>	: Kegiatan ekonomi dimana pemerintah tidak turut serta untuk mencapai demokrasi dan kebebasan pribadi dalam perdagangan
Perdagangan Bebas	: Kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah tanpa adanya diskriminasi terhadap ekspor-impor
Perdagangan Gelap	: Perdagangan yang dilakukan secara tidak sah atau ilegal tanpa membayar pajak

DAFTAR GAMBAR

Gambar 01 : Denah Palembang Tahun 1877	63
Gambar 02 : Perkebunan Kapas di Keresidenan Palembang Tahun 1910	71
Gambar 03 : Proses Pengeringan Kopi di Keresidenan Palembang Tahun 1920.	74
Gambar 04 : Lahan Perkebunan Karet di Muara Enim Tahun 1939	77
Gambar 05 dan 06 : Industri Karet di Muara Enim tahun 1939	77
Gambar 07, 08 dan 09 : Tambang Minyak di Palembang tahun 1897	80
Gambar 10 : Kilang Minyak di Sungai Gerong Tahun 1925	82
Gambar 11 : Rakit Mengakut Suplai Produk Industri di Boom Baru, Palembang Tahun 1935	84
Gambar 12 : Pasar Ikan di Palembang tahun 1900an,	94
Gambar 13 : Pemberangkatan Haji dari Palembang ke Mekah Tahun 1890	100

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya Asia Tenggara dalam perkembangan kota-kota modern banyak dibentuk berdasarkan warisan sejarah masa sebelumnya. Kajian mengenai perkotaan memainkan peranan penting adalah keadaan demografi, teknologi, organisasi dan lingkungan, aspek-aspek tersebut saling terkait satu sama lain. Dalam sejarahnya banyak kota-kota terlahir sebagai akibat pusat-pusat politik tradisional seperti pusat-pusat istana, kerajaan, pusat-pusat perkembangan perdagangan seperti di daerah pegunungan, demikian pula di pelabuhan atau wilayah pesisir pantai bahkan sungai-sungai. Dalam perkembangan selanjutnya dapat diperkirakan pula pusat-pusat perdagangan dipindahkan karena faktor tertentu.¹

Sebagai salah satu wilayah di pulau Sumatera, Kota Palembang adalah kota yang paling tua berdasarkan prasasti Kedukan Bukit ditemukan oleh Batenburg 20 November 1920 di tepi Sungai Tatang, kaki Bukit Siguntang. Atas bukti tersebut maka disepakatilah hari jadi Kota Palembang jatuh pada tanggal 5 bulan Ashada tahun 605 Caka bertepatan dengan tanggal 17 Juni 683 Masehi. Kesepakatan ini diperkuat oleh Surat Keputusan Walikota Daerah Kotamadya Palembang Nomor

¹I Ketut Ardhana, "Denpasar: Perkembangan dari Ibu Kota Kolonial hingga Kota Wisata," dalam Basundoro dan Jhony Alfian Khusyain (ed), *Kota Lama Kota Baru: Sejarah Kota-Kota di Indonesia* (Yogyakarta: Ombak, 2005), h. 405.

57/UM/WK tanggal 6 Mei 1972.² Kota Palembang merupakan kota yang memiliki latar belakang sejarah yang sangat panjang hingga dapat menjadi sebuah kota yang besar di Indonesia seperti sekarang ini.

Di lihat dari letak geografis Palembang terletak pada garis lintang $2^{\circ} 52'$ Lintang Selatan dan $104^{\circ} 37' - 104^{\circ} 52'$ Bujur Timur. Wilayah ini memiliki ketinggian rata-rata 12 meter di atas permukaan laut. Hal tersebut membuktikan bahwa Palembang merupakan kota strategis yakni menyebabkan kota ini mendapat posisi sebagai kota pelabuhan walaupun tidak terletak di daerah pantai.³ Sejak zaman Kerajaan Sriwijaya sampai masa penjajahan Belanda sebenarnya cukup jelas menggambarkan, idealnya seperti apa Kota Palembang dikembangkan. Sebutan *Venice from the East* yang pernah disandang ibu kota Sumatera Selatan yakni kota yang dibagi dan terbagi oleh sungai terbesar di Pulau Sumatera yakni Sungai Musi. Kota ini penuh dengan muatan-muatan simbolik sebagai kota air.⁴

Berdasarkan latar belakang sejarah “penempatannya”, perkembangan kota Palembang dimulai dengan penempatannya di jalur perdagangan, dimuara-muara sungai besar yang menghubungkan daerah hilir dan daerah hulu sebagai daerah

²Latifah Ratnawati, “Kebudayaan Palembang,” dalam Achadiati Ikram, *Jati Diri Yang Terlupakan: Naskah-Naskah Palembang* (Jakarta: Yanassa, 2004), h. 1.

³Dedi Irwanto M. Santun, dkk., *Iliran dan Uluan: Dinamika dan Dikotomis Sejarah Kultural Palembang* (Yogyakarta: Eja Publisier, 2010), h. 7.

⁴Dedi Irwanto M. Santun, *Venesia dari Timur: Memaknai Produksi dan Reproduksi Simbolik Kota Palembang dari Kolonial Sampai Pasca Kolonial* (Yogyakarta: Ombak, 2011), h. 2.

penghasil sumber daya alam.⁵ Jalur perniagaan menimbulkan suatu tempat bersandarnya kapal-kapal yang disebut sebagai pelabuhan. Dengan demikian hidup dan berkembangnya Palembang dikarenakan faktor perdagangan.

William Marsden dalam bukunya yang berjudul *History of Sumatra* yang terbit pertama kali tahun 1881 M menulis bahwa pada abad ke-18 Palembang adalah kerajaan yang cukup penting dalam perkembangan ekonomi di Sumatera Selatan. Sungai itu berhulu di Musi yang terletak di Pegunungan Bukit Barisan. Oleh karena itu, hulu sungai itu bernama Ayer Musi. Sedangkan hilir sungai bernama Tatong. Lebar Sungai Musi lebih dari satu mil. Sungai itu dapat dilayari dengan aman oleh kapal yang bagian di bawah permukaan airnya tidak lebih empat belas kaki.⁶

Peristiwa sejarah biasanya membawa akibat perubahan-perubahan di dalam masyarakat termasuk masyarakat yang tinggal di kota itu sendiri. Perubahan-perubahan tersebut menyangkut dari segala aspek, terutama dalam bidang politik, ekonomi dan kebudayaan. Nampak betul perubahan tersebut pada masa Sriwijaya, Kesultanan Palembang Darusalam hingga masa Hindia Belanda.⁷

Pelayaran dan perdagangan di kawasan suangai Musi sebagai salah satu lalu-lintas pelayaran dan perdagangan dari aktivitas jantung perdagangan di nusantara pada saat itu. Di kawasan Sungai Musi telah ada jalinan hubungan dagang sebelum

⁵ Bambang Budi Utoyo, dkk., *Kota Palembang: Dari Wanua-Sriwijaya Menuju Palembang Modern* (Pemerintah Kota Palembang: Palembang, 2012), h. 206.

⁶ William Marsden, *Sejarah Sumatra* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), h. 212.

⁷ Makmun Abdullah, dkk. *Kota Palembang: sebagai Kota Dagang dan Industri* (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), h. 2.

datangnya bangsa Barat. Sungai Musi ditempatkan sebagai salah satu aktivitas berlayar dan berdagang dengan tujuan menyusuri kebudayaan maritim. Hal ini merupakan sinyal positif bagi peranan yang amat penting di Sungai Musi dan aktivitas perdagangan di sekitar pulau Sumatera. Penerus dari kerajaan Sriwijaya adalah Sungai Musi masih memiliki kedudukan tersendiri di kepulauan Nusantara atau bahkan Asia Tenggara pada umumnya. Tentu saja Sungai Musi merupakan jembatan yang menghubungkan berbagai daerah-daerah. yang berada di sepanjang pulau Sumatera. Baik dalam kegiatan belayar maupun dalam kegiatan berdagang, hingga terjadinya penyebaran agama Islam dan adanya penguasa lokal.

Penyebaran agama Islam yang memainkan peranan penting bagi pelayaran dan perdagangan di kawasan Sumatera Selatan khususnya Palembang. Situasi ini yang memunculkan perkembangan pelabuhan di Sungai Musi. Selain itu terjadi kontak dagang dengan para pedagang yang berasal dari Arab, Cina, India, Persia, Turki atau dari Asia lainnya. Oleh karena itu, unsur-unsur perdagangan secara kronologis dan geografis merupakan pola penting dalam penyebaran Islam di Sumatera Selatan. Tempat-tempat yang dituju adalah kota-kota pelabuhan.⁸ Sebagai akibat dari kegiatan perdagangan tersebut terbentuklah perkotaan yang terdapat masyarakat Muslim di dalamnya.

⁸Nor Huda, *Islam Nusantara Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia* (Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2013), h. 50-51.

Aktivitas perekonomian kota Palembang berada pada tepi Sungai Musi. Sehingga Pelabuhan sangat penting untuk dikunjungi oleh kapal-kapal niaga terutama dari Jawa, Madura, Bali dan Sulawesi. Kapal-kapal ini membawa beras, garam dan bahan pakaian. Serta membawa pulang lada dan timah dari Palembang. Dataran rendah di Palembang merupakan tanah rata dan berawa-rawa. Kecuali di beberapa bagian. hampir seluruh cocok untuk wilayah pertanian. Namun. daerah-daerah pedalaman atau dataran tinggi menjadi penghasil lada. Hasil-hasil perkebunan ini biasanya dimonopoli oleh raja dengan harga murah. Sebaliknya orang-orang ini memasarkan candu, garam dan bahan pakaian kepada penduduk dusun. Kota Palembang ketika itu di bawah pengaruh Demak.⁹

Menurut Andi Faisal Bakti, bahwa bangsa Indonesia mudah menerima nilai-nilai dari luar dan menjadi bukti akan keterbukaan sikap mereka. Sikap ini pada gilirannya telah ikut membentuk komunitas-komunitas Muslim di daerah pesisir yang mulanya berinteraksi antara penduduk lokal dan bangsa asing dengan bukti adanya perkampungan yang disebut *pakojan* (perkampungan Arab yang semula bekas orang India) dan *pachinan* (perkampungan Cina) serta perkampungan pribumi yakni *Pekauman* (perkampungan anggota kerabat pejabat keagamaan keaton). *kepatihan* (perkampungan kerabat para patih).¹⁰

⁹Ibid., h. 55.

¹⁰Ibid., h. 61.

Selanjutnya penguasa lokal kota Palembang selama 166 tahun adalah Kesultanan Palembang Darussalam yang menjalankan sistem kekuasaan tradisional. Namun pada awal abad ke-19 dan kemudian dijalankan politik Pasifikasi di daerah ini maka hal tersebut menunjukkan bahwa adanya peranan kekuasaan pusat di Palembang baik kekuasaan tradisional maupun kolonial, dalam memberikan kerangka kegiatan di berbagai bidang politik, ekonomi, agama dan kebudayaan.

Pihak Belanda datang ke Nusantara pada tahun 1602 M dalam bentuk perusahaan dagang dengan nama VOC.¹¹ Pemerintah Kolonial Belanda datang ke Nusantara untuk berniaga dan mencari rempah-rempah. Dari hubungan perniagaan tersebut, sehingga muncul hubungan ekonomi antara Kesultanan Palembang dengan Pemerintah Kolonial Belanda. Setelah terciptanya hubungan dagang Pemerintah Kolonial Belanda melalui VOC dengan beberapa kerajaan Islam di Nusantara sehingga memperlancar hubungan dagang internasional. Perkembangan dagang tersebut sampai ke negeri Cina. Palembang merupakan sebagai salah satu pelabuhan dagang nusantara. Pada masa itu berdiri suatu kerajaan yang sangat besar yaitu Kesultanan Palembang Darussalam. Hubungan perekonomian Kesultanan Palembang dengan pemerintahan Kolonial Belanda dimulai pada tahun 1616 M.¹² Hubungan dagang pemerintah Kolonial Belanda dan Kesultanan Palembang (VOC) dimulai

¹¹M. Ali Amin, "Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam dan Beberapa Aspek Hukumnya," dalam K. H. O. Gadjahnata (ed.), *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan* (Jakarta: UI Press, 1968), h. 71.

¹²Husni Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi Tentang Pejabat Agama pada Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang* (Bukit Pemulang Indah: Logos Wacana Ilmu, 1991), h. 70.

pembelian barang-barang mentah yang ada di Palembang, pembelian barang tersebut berupa kemenyan, getah, pohon pewara lilin, gading gajah, lada dan kayu.

Dari situasi tersebut banyak terjadi perebutan aset perekonomian kota Palembang dari pihak pribumi dan penjajah. Dan juga memunculkan aktivitas perdagangan yang memiliki corak maritim dan hal tersebut bukanlah sekedar perkara baru bagi masyarakat khususnya di kota Palembang. Kegiatan perdagangan maritim merupakan warisan penerus ekonomi pribumi dan Melayu yang telah berjalan berabad-abad silam. Palembang dikenal sebagai penggerak roda ekonomi dan memiliki pulau Bangka dan Belitung yang kaya akan hasil Bumi sehingga mempunyai nilai lebih istimewa dan didukung dengan aktivitas perdagangan di Sungai Musi.

Pedagang pribumi maupun non pribumi berkembang dan bertambah dari jumlah barang dagang yang diangkut oleh kapal dagang dan perahu dagang yang merapat di Pelabuhan Sungai Musi. Perdagangan yang besar sebagai faktor pemicu pihak Kolonial untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan mengembangkan sistem kapitalisme dan memonopoli perdagangan pada Kesultanan Palembang Darussalam.

Pada abad awal ke 19 M kejatuhan Kesultanan Palembang Darussalam ke tangan Kolonial Belanda. Sehingga terjadi perubahan kekuasaan dari Kesultanan menjadi Keresidenan pada tahun 1825 M. Pangeran Kramo Jayo sebagai perdana

mentri Belanda atau *Regent Rijksbestuurder*. Pada tahun 1851 M dihapusnya *Regent Rijksbestuurder* dan ditangkapnya Pangeran Kramo Jayo karena melakukan perlawanan.¹³ Sekilas perkembangan kekuasaan imperialis dan Kolonialis dari Eropa, membuat Kesultanan Palembang mengalami kemunduran perekonomian dan banyak terjadi pemberontakan oleh pribumi maupun non pribumi.

Belanda memerlukan waktu yang sangat lama untuk menguasai wilayah Palembang. Sehingga Belanda mengintensifkan kekuasaanya ke daerah *hinterland*. Untuk menghadapi gejolak dari masyarakat. Belanda melakukan berbagai tujuan pokok melalui pemerintahan kolonial, kekuatan militer yang menjadikan faktor menentukan masyarakat melakukan protes sosial karena adanya sistem perpajakan dan kerja rodi. Berdasarkan hal tersebut pemerintahan Belanda bersifat sentralistis yang didukung oleh agen-agen kolonial di daerah, yang terdiri dari kepala distrik (Demang), kepala marga (depati) dan kepala-kepala dusun (kerio).¹⁴

Terjadinya perubahan pemerintahan menjadikan banyaknya perubahan kebijakan yang berlaku dari masa ke masa, terutama kebijakan di dalam pemerintahan dan perekonomian. Titik tumpu kota awal Palembang sebagai sebuah kota dengan dasar keagamaan semakin lama semakin meruntuh, hingga saat ini, perkembangan perekonomian Palembang lebih mengarah pada perdagangan dan pariwisata dibandingkan dengan yang terjadi pada masa awal pembentukkannya.

¹³M. Ali Amin, *Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam dan Beberapa Aspek Hukumnya*, h. 91.

¹⁴Makmun Abdullah, dkk. *Kota Palembang: sebagai Kota Dagang dan Industri*, h. 7.

Karya tulis tentang kota Palembang memang sudah banyak baik itu dalam bentuk artikel maupun hasil dari penelitian. Akan tetapi untuk masalah perekonomian kota Palembang masih sedikit untuk penulisnya. Karena itu, penulis tertarik untuk meneliti perekonomian kota Palembang khususnya pada masa Kolonial Belanda yang memiliki dua karakteristik perekonomian yang berbeda antara kaum pribumi Palembang dan penjajah. Kaum pribumi tetap menggunakan sistem tradisional sedangkan Kolonial Belanda menggunakan sistem kapitalisme atau sistem perekonomian modern. Dari kedua perbedaan tersebut menimbulkan ketimpangan dan sejalan dengan perkembangan pemerintahan di Kota Palembang.

Selanjutnya penulis tertarik terhadap perekonomian Palembang yang telah diungkapkan sebelumnya. Sungai Musi merupakan *via* jalur dagang internasional yang menjadikan Palembang sebagai Bandar dagang sejak masa Sriwijaya. Sedangkan pada masa Kolonial Belanda menerapkan pemerintahan yang sentralistik (kekuasaan memusat yakni memiliki pemerintahan dan perekonomian terpusat). Dari penjelasan latar belakang di atas maka penulis memberikan perumusan dan pembatasan permasalahan penelitian ini pada sub bab selanjutnya.

B. Perumusan Masalah atau Pembatasan Masalah

Pembatasan ruang lingkup dalam penelitian sejarah sangatlah penting, terutama sebagai pedoman dalam pengumpulan sumber dan pembahasan permasalahan. Pembatasan tersebut dimaksudkan agar peneliti tidak terjerumus ke

dalam banyaknya data yang ingin diteliti, sehingga luasan dalam batas penelitian dalam tempat (*Spasial*) dan waktu (*temporal*) perlu dijelaskan.¹⁵ Agar penelitian ini tidak keluar dari permasalahan maka kedua hal tersebut perlu dijelaskan dalam penelitian ini.

Pada ruang lingkup spasial, penelitian ini menjelaskan Kota Palembang adalah sebuah kota yang letaknya sangat strategis sebagai jalur perdagangan pulau Sumatera. Pada konteks ini, Pemerintah Kolonial Belanda menghapuskan kesultanan menjadi Keresidenan Palembang. Keresidenan Palembang dibagi atas beberapa *Afdeeling*, yang masing-masing dikepalai oleh seorang asisten residen. Tiap-tiap *afdeelling* dibagi atas beberapa *Onderafdeeling*, yang masing-masingnya dikepalai oleh seorang *controleur* dengan membawahi beberapa distrik dikepalai oleh *asisten demang*. Sedangkan, Kota Palembang terdiri atas dua distrik, yaitu Distrik Seberang Ilir dan Distrik Seberang Ulu, yang dipisahkan oleh aliran Sungai Musi. Seperti halnya pedalaman, masing-masing distrik terbagi atas *Onderdistrik* yaitu: *Onderdistrik* Palembang Ilir Barat dan *Onderdistrik* Palembang Ilir Timur, yang langsung membawahi beberapa kampung atau *wijk*.¹⁶ Keresidenan (*regentschappen*) adalah sebuah pembagian administratif dalam sebuah provinsi di Hindia Belanda dan kemudian Indonesia hingga tahun 1950-an.

¹⁵Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Ombak, 2011), h.126.

¹⁶Makmun Abdullah, dkk., *Kota Palembang: Sebagai Kota Dagang dan Industri*, h. 5.

Penelitian ini memiliki rentang waktu masa Pemerintahan Kolonial Belanda atau Keresidenan Palembang, tepatnya tahun 1825-1942. Tahun 1825 dijadikan awal pembahasan karena pada tahun initepatnya pada bulan Agustus 1825 Sultan Ahmad Najamudin IV menyerahkan diri kepada Belanda, kemudian dibawa ke Batavia dibuang ke Banda dan akhirnya dipindahkan ke Manado. Sejak saat itu terhapuslah Kesutanan Palembang Darussalam.¹⁷ Sejak dihapuskannya Kesultanan Palembang Darussalam pada tahun 1825, Jabatan Residen Palembang dijabat secara berkelanjutan atau secara periodik. Keresidenan Palembang bersama 9 Keresidenan Lainnya yang berada di wilayah/pulau Sumatera menjadi bagian wilayah Provinsi Sumatera (1 Provinsi), kemudian Provinsi Sumatera dimekarkan menjadi 3 Provinsi yaitu sbb: Provinsi Sumatera Utara (terdiri dari Keresidenan Aceh, Sumatera Timur Medan), dan Tapanuli), Provinsi Sumatera Tengah (Keresidenan Sumatera Barat (Bukit Tinggi) Riau, dan Jambi), Provinsi Sumatera Selatan (Keresidenan Palembang, Bengkulu, Lampung, dan Bangka-Belitung). Pasca Pemekaran provinsi Sumatera menjadi 3 Provinsi, Selanjutnya, Jabatan Residen Palembang berganti statusnya menjadi Gubernur Sumatera Selatan.¹⁸

Pada kenyataan historis, proses pertumbuhan ekonomi swasta asing (bangsa barat) telah berkembang pesat sejak zaman Kesultanan Palembang. Jenjang tahun 1825-1942 berkaitan dengan perkembangan ekonomi liberal yang dijalani oleh

¹⁷Djohan Hanafiah, *Kuto Besak: Upaya Kesultanan Palembang Menegakkan Kemerdekaan* (Haji Mas Agung: Jakarta, 1989), h. 129.

¹⁸Kemas A. R. Panji dan Sri Suriana. *Sejarah Keresidenan Palembang*. artikel diakses pada 2 April 2016 dari <http://jurnal.Radenfatah.ac.id/index.php/tamaddun/article/view/28>.

pemerintah Belanda melalui penerapan Undang-undang Agraria 1870 yang telah melebarkan sayapnya ke luar Pulau Jawa. Lahan-lahan perkebunan pun dibuka terutama untuk tanaman keras seperti karet. Tidak hanya perkebunan karet, kopi, kapas dan tanaman lainya juga turut memenuhi pasok produksi Belanda. Selain perkebunan, Sumatera Selatan telah ditemukan bahan tambang berupa timah di Pulau Bangka. Sedangkan, pada masa Belanda terdapat tambang batubara, sumber minyak mentah. Nampak dengan jelas bahwa Palembang sebagai kota Bandar dan pusat konsentrasi pemerintah kolonial. Letaknya yang sentral sebagai mata rantai perdangan laut antara Kota Batavia dan Singapura, tetapi juga mengandung banyak kemungkinan sebagai produsen sumber daya alam dan komoditi ekspor non-minyak lainya yang diperlukan di pasaran Eropa.

Penelitian ini diakhiri pada tahun 1942, karena pada masa ini kekuasaan berganti, dari kekuasaan Belanda ke kekuasaan Jepang. Meskipun demikian, peneliti dituntut untuk membahas periode sebelumnya ataupun sesudahnya. Hal ini menghubungkan masalah perekonomian Kota Palembang pada masa kesultanan dengan masa Kolonial Belanda.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan “Sejarah Perekonomian Kota Palembang: Masa Kolonial Belanda tahun 1825-1942 M, dalam penelitian ini adalah bahwa kajian ini membahas tentang sejarah Kota Palembang dengan memfokuskan pada perekonomian melalui kebijakan-kebijakan Belanda yang berdampak pada kehidupan masyarakat Kota Palembang, khususnya pada bidang perkebunan dan

pertambahan. Serta pengaruh peralihan atau transformasi perekonomian dari masa Kesultanan hingga masa Kolonial Belanda.

Dari uraian pembatasan di atas maka penulis mengajukan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana keadaan perekonomian Kota Palembang sebelum masa Keresidenan Belanda?
2. Bagaimana kondisi perekonomian Kota Palembang masa Keresidenan Belanda?
3. Bagaimana dampak perekonomian masa Keresidenan Belanda terhadap perubahan sosial-keagamaan di Palembang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui keadaan perekonomian Kota Palembang sebelum masa Keresidenan Belanda.
2. Untuk mengetahui keadaan perekonomian Kota Palembang masa Keresidenan Belanda.
3. Untuk mengetahui dampak perekonomian masa Keresidenan Belanda terhadap perubahan sosial-keagamaan di Kota Palembang.

b. Manfaat Penelitian

1. Untuk memenuhi syarat-syarat mencapai Gelar Sarjana (S1), ataupun Sarjana Humaniora (S. Hum) pada Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam.

2. Untuk memberikan Informasi tentang kesinambungan dan perubahan perekonomian Muslim Palembang tahun 1825-1942 M.
3. Untuk memberikan informasi tentang sejarah perekonomian di Palembang baik kemajuan hingga *collapse* atau kejatuhan.

D. Definisi Operasional

Dalam relasi waktu dalam sejarah dikaji dan dibahas mengenai perkembangan, kesinambungan, pengulangan dan perubahan. Pada penelitian ini perubahan yang lebih dibahas. Makna kesinambungan (kontinuitas) terjadi apa bila perkembangan generasi baru meneruskan apa yang diletakan oleh generasi sebelumnya. Sedangkan perubahan dalam sejarah perubahan ini dapat diartikan sebagai segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan masyarakat. Heraclitus mengatakan “*Panta rei*” artinya tidak ada yang tidak berubah, semuanya mengalir atau seperti masyarakat sewaktu-waktu bergerak dan berubah. Wertheim menuliskan *History is a continuity and change* (Sejarah adalah peristiwa yang berkesinambungan dan perubahan).¹⁹ Perkembangan kehidupan dalam masyarakat ada yang berlangsung lambat dan ada yang cepat. Arah perubahan dibedakan atas keadaan yang lebih baik (progres) dan keadaan yang lebih buruk (regres).

¹⁹Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum Akal dan Hati Sejak Thales Sampai Capra* (Remaja Rosdakarya: Bandung, 2008), h.49.

Kota mempunyai arti daerah perumahan dan bangunan-bangunan yang merupakan suatu kesatuan tempat kediaman. Akan tetapi pengertian tentang kota tersebut masih kurang lengkap. Sebagai suatu komunitas, suatu kota pasti terdapat dinamika sosial yang aktif di dalamnya. Saat membahas lebih rinci tentang pengertian kota, para ahli mengemukakan pendapat yang bermacam-macam. Mumford lebih melihat kota sebagai suatu tempat pertemuan. Sebelum kota menjadi tempat tinggal tetap, orang-orang ulang alik dari pedesaan untuk berjumpa secara teratur. Di situ kota seperti magnet yang semakin kuat tarikannya baik bagi perekonomian maupun keagamaan. Wirth merumuskan kota sebagai pemukiman yang relatif besar padat dan permanen dengan penduduk yang heterogen kedudukan sosialnya. Karena itu hubungan sosial antar penghuninya tidak terlalu dekat dengan tetangga sekitar, atau cenderung lebih acuh terhadap orang sekitar. Hoekveld mengutarakan definisi kota dapat disoroti dari berbagai macam perspektif, yakni antara lain perspektif morfologi, jumlah penduduk, hukum, ekonomi dan sosial.²⁰

Sedangkan kata perekonomian yang berarti tata cara atau tindakan berekonomi. Sedangkan ekonomi dalam KBBI adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian dan perdagangan).²¹ Dalam penelitian lebih membahas pada perekonomian dalam lingkup perekonomian di Palembang pada akhir masa

²⁰Daldjoeni, N, *Geografi Kota dan Desa* (Bandung: Penerbit Alumni, 2003), h. 39.

²¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 3, cet. III (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005), h. 287.

Kesultanan sampai masa Kolonial Belanda (1825-1942 M). dalam hal tersebut dapat dinyatakan bahwa peralihan sistem perekonomian yang terjadi di kota Palembang.

Makna kata peralihan²² terdapat pada *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Dalam ilmu sejarah peralihan memiliki dua arti yakni arti luas dan sempit. Arti luas, sejarah adalah ilmu tentang waktu, dimana waktu terjadi empat hal, yaitu perkembangan, pengulangan dan perubahan. Yang dimaksud perubahan dalam sejarah adalah perubahan yang terjadi adanya perkembangan secara besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat serta mendapat pengaruh dari luar.²³

Dari pengertian tersebut bahwa perekonomian di Palembang mengalami perubahan cukup besar yakni dari tradisional menjadi modern. Karena perpindahan tangan dari pemerintahan Kesultanan Palembang Darusalam menjadi Keresidenan Belanda. Sistem pemerintahan yang dibawa oleh Belanda merupakan sistem modern yang menjadikan pusat perdagangan yakni kota Palembang menjadi pusat aktifitas pemerintahan Belanda. Sehingga Palembang menjadi kota yang memiliki dualisme perekonomian di samping kapitalisme yang dibawa oleh Belanda sedangkan tradisional masih tetap bertahan.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini membutuhkan referensi untuk menambah pengkayaan kajian tentang Sejarah Perekonomi kota Palembang: Masa Pemerintahan Kolonial Belanda

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 3, cet. III (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1234.

²³ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya. 1995). h. 13-14.

tahun 1825-1942 M yang terdapat dalam sumber-sumber pustaka. Sumber-sumber kepustakaan yang digunakan dalam kajian ini baik yang bersifat primer, sekunder maupun tersier akan memberikan pengetahuan dasar dalam memahami sejarah perekonomian kota Palembang khususnya tentang Perekonomian Masa Pemerintahan Kolonial Belanda 1825-1942M. Adapun buku-buku yang berkenaan langsung dengan kajian tentang sejarah perekonomian yakni: *Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang 1824-1942 M*²⁴ karya Supriyanto tahun 2013. Buku ini menjelaskan tentang gambaran berbagai aktifitas perekonomian dan perdagangan pada masa Kolonial terutama masalah hubungan antara Belanda dengan Kesultanan Palembang Darussalam. Gambaran umum dan kontak dagang dan sistem Kesultanan Palembang. Kegiatan ini dihubungkan dengan kegiatan kemaritiman pada sejarah lokal.

Selanjutnya, *Lukisan tentang ibu kota Palembang*²⁵ karya J. L. Van Sevenhoven tahun 1971. Buku ini menyajikan anggapan moral dan problematik politik yang menggambarkan tentang corak-corak kehidupan masyarakat Palembang pada awal abad ke 19. Pada buku ini memperhatikan proses-proses ekonomi dan hambatan budaya, sosial dan politik dari kemajuan perekonomian.

²⁴Supriyanto, *Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang 1824-1864* (Palembang: Ombak, 2013).

²⁵J. L. Van Sevenhoven, *Lukisan Tentang Ibu Kota Palembang* (Jakarta: Bhatara, 1971).

Sedangkan kajian R. Z. Leirissa tahun 2012 dalam judul *Sejarah Perekonomian Indonesia*²⁶ memaparkan tentang pasang surut Nusantara pada kurun niaga. Dimana Indonesia mengalami perubahan ekonomi sesuai dengan kontak dengan berbagai bangsa. Buku ini menjelaskan perjalanan pembangunan ekonomi Indonesia dari penglihatan sejarah. Pembahasannya mengenai peralihan dari ekonomi kolonialis ke ekonomi bangsa Negara yang merdeka. Dalam kurun niaga tersebut terlihat persaingan bangsa-bangsa asing dalam merebutkan wilayah ekonomi di Indonesia sejak masa VOC hingga masa penjajah Belanda. Hal tersebut tampak bahwa bangsa-bangsa asing dari Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda Inggris dan Perancis berda dalam konflik untuk memperebutkan wilayah ekonomi Indonesia.

Lalu sejarawan Jeroen Peters (1997) dalam kajiannya, *Kaum Tuo-Kaum Mudo Perubahan Religius di Palembang*²⁷ karya. Buku ini merupakan hasil disertasi yang dipertahankan penulisnya di Rijksuniversiteit Leiden pada bulan Mei 1994 ini berisi tentang realitas konflik-konflik keagamaan yang pernah ada di wilayah Keresidenan Palembang. Konflik-konflik ini terjadi karena perbedaan paham keagamaan antara kelompok modernis (*Kaum-Mudo*) dengan kelompok tradisionalis (*Kaum-Tuo*). Sumbangan terpenting dari kajian Peeters ini adalah kelompok modernis lebih banyak berkembang dengan masyarakat *Uluhan* atau di pedesaan-pedesaan, sedangkan kelompok tradisonal justru marak dalam masyarakat perkotaan (*Iliran*).

²⁶R. Z. Leirissa, dkk., *Sejarah Perekonomian Indonesia* (Yogyakarta: Ombak, 2012).

²⁷Jeroen Peeters, *Kaum Tuo-Kaum Mudo: Perubahan Religius di Palembang 1821-1942* (Jakarta: INIS, 1997).

Sumber buku yang lainya yaitu *Kota Palembang: Sebagai “Kota Dagang dan Industri”*²⁸ oleh Makmum Abdullah, dkk. Buku ini dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang berisikan mengenai sejarah kota yang memiliki peranan penting terlaksananya kegiatan diberbagai bidang. Hal tersebut digambarkan melalui Kota Palembang terdapat kota pantai dan kota pedalaman. Kota Palembang sebagai kota dagang dan industri serta kota pusat pemerintahan dan administrasi.

Karya tulis lain seperti *Perekonomian Kesultanan Palembang Abad XVII hingga Awal Abad XIX* oleh Farida, menjelaskan tentang kejayaan perdagangan Sumatera Selatan sebelum Kolonial Belanda datang ke Indonesia. Kesultanan ini banyak menghasilkan komoditi yang sangat laku di pasaran dunia yaitu lada dan timah, disamping produk alam lainnya. Sultan dan kaum bangsawan menjadi pelaku sentral dalam perekonomian tersebut. Kondisi menguntungkan ini (penghasil lada dan timah) membawa Palembang menjadi incaran Belanda dan Inggris. Belanda mengikat Palembang dengan berbagai kontrak, sedangkan Inggris terlibat aktif dalam “perdagangan gelap”.

Berdasarkan telah pustaka tersebut maka penulis akan mencoba membahas lebih spesifik mengenai Sejarah Perekonomian Kota Palembang. Dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada perubahan yang terjadi pada masa Kolonial Belanda. Terlepas dari tinjauan pustaka tersebut bersal dari karya-karya penulis yang berusaha

²⁸ Makmun Abdullah, dkk., *Kota Palembang: Sebagai Kota Dagang dan Industri* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984).

untuk mengkaji Kota Palembang serta merupakan sumber penting tentang perekonomian Kota Palembang. Sehingga penelitian skripsi ini akan memberikan sedikit karya sejarah Kota Palembang.

F. Kerangka Teori

Dalam membangun sebuah teori diperlukan adanya konsep mengenai penelitian. Sehingga dapat dikatakan teori adalah hubungan beberapa konsep atau suatu kerangka konsep, atau definisi yang memberikan suatu pandangan sistematis terhadap gejala-gejala atau fenomena-fenomena dengan menentukan hubungan spesifik antara konsep-konsep dengan maksud untuk menguraikan, menerangkan, meramalkan dan atau mengendalikan suatu fenomena. Teori dapat diuji, diubah atau digunakan sebagai suatu pedoman dalam penelitian.²⁹ Dapat dikatakan teori sebagai kerangka berpikir.³⁰

Dari penjelasan diatas berkaitan penelitian sebagai sejarah ekonomi Kota Palembang. Penelitian ini mengambil konsep ekonomi masa Kolonial Belanda atau disebut sebagai historiografi ekonomi. Walaupun pada kenyataannya sejarah politik selama dua-tiga abad terakhir dalam historiografi Barat sangat dominan, namun sejak awal abad ini sejarah ekonomi dalam berbagai aspeknya menonjol, lebih-lebih setelah proses modernisasi dimana-mana semakin memfokuskan perhatian pada pembangunan ekonomi. Terutama proses industrialisasi beserta transformasi sosial

²⁹ Sumanto, *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian: Psikologi, pendidikan, ekonomi bisnis, dan sosial* (Buku Seru: Jakarta, 2014), h. 49.

³⁰ Mestika Zed, *Metodologi Sejarah* (Padang: Universitas Negeri Padang, 1999), h. 40.

yang mengikutinya menuntut pengkajian pertumbuhan ekonomi dari sistem produksi agraris ke sistem produksi industri.³¹ Lagi pula ekspansi Barat yang menimbulkan kolonialisme dan imperialisme mempunyai dampak pertumbuhan kapitalisme dan merkantilismenya.

Berkaitan dengan hal tersebut, penjelasan sistem ekonomi itu merupakan keseluruhan lembaga ekonomi yang dilaksanakan atau dipergunakan oleh suatu bangsa atau Negara dalam melakukan kegiatan ekonominya.³² Lembaga ekonomi yang dimaksudkan di sini adalah berupa pedoman, aturan atau kaidah yang dipergunakan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi (produksi, distribusi dan konsumsi). Lembaga ekonomi tersebut ada yang bersifat tertulis seperti undang-undang, peraturan pemerintah, instruksi presiden, dsb. Ada pula yang bersifat tidak tertulis seperti kebiasaan, adat-istiadat, cara-cara yang biasa dilakukan suatu masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi.³³ Sistem ekonomi kapitalis atau juga disebut sistem ekonomi liberal adalah suatu sistem ekonomi yang kehidupan ekonomi masyarakatnya sangat dipengaruhi atau dikuasai oleh pemilik-pemilik modal (modal).

Berdasarkan pertimbangan perlunya metode pendekatan dalam penelitian dan penulisan sejarah, maka penulisan skripsi ini menggunakan beberapa pendekatan

³¹Ch. V. Langlois dan Ch. Seignobos, *Pengantar Ilmu Sejarah*, terj. Supriyanto Abdullah (Indo Literasi: Yogyakarta, 2015), h. 204.

³²Gunawan Sumodiningrat, *Sistem Ekonomi Pancasila dalam Perspektif* (Impac Wahana Cipta: Jakarta, 1999), h. 8.

³³Ibid., h. 8.

yang sesuai dengan konteks yang dibicarakan. Adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan antara pendekatan ekonomi dan pendekatan politik. Masing-masing pendekatan akan sangat berguna dalam meninjau setiap aspek dalam skripsi ini.

Pendekatan ekonomi adalah tinjauan yang sangat penting dalam penulisan sejarah karena pada dasarnya perjalanan suatu sejarah tidak pernah lepas dari pengaruh kepentingan ekonomi. Dalam kajian ini, peneliti menggunakan pendekatan ekonomi untuk mengetahui bagaimana kondisi Perekonomian Kota Palembang Masa Kolonial Belanda. Selain itu pendekatan ekonomi juga difokuskan untuk mengetahui faktor-faktor peralihan perekonomian dari Kesultanan Palembang Darussalam ke Kolonial Belanda serta dampak perekonomian Kolonial Belanda terhadap Sosial-Keagamaan kota Palembang.

Dari pendekatan ekonomi tersebut dapat medeskripsikan tentang keadaan yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah Belanda terhadap perekonomian di Kota Palembang setelah runtuhnya Kesultanan Palembang Darussalam. Undang-Undang Agraria 1870-1900an.

Berdasarkan hal tersebut Sistem Ekonomi Liberal-Kapitalistik berkembang. Artinya, bahwa alat-alat produksi utama (sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumber daya modal) berada di tangan swasta. Keputusan-keputusan ekonomi

dalam sistem ini didistribusikan secara luas kepada unit-unit yang lebih kecil, yaitu individu-individu dalam masyarakat.³⁴

Pada penelitian ini, pendekatan politik merupakan pendekatan yang menyoroti segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan yang bermaksud mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu bentuk susunan masyarakat.³⁵ Pada skripsi ini, pendekatan politik digunakan dalam melihat pengaruh Belanda dalam pergantian kekuasaan di Kesultanan Palembang Darussalam serta kebijakan kekuasaan Kolonial Belanda pada bidang ekonominya.

G. Metode Penelitian

Metode sangat penting dalam melakukan penelitian. Metode pada dasarnya berarti cara yang digunakan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Metode tidak lepas dari metodologi. Metodologi penelitian menyangkut cara-cara atau prosedur yang harus dilakukan dalam kegiatan penelitian yang umumnya dimulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, melakukan analisis data dan diakhiri dengan kesimpulan,³⁶ Dalam penelitian ilmu sejarah juga terikat pada penalaran yang mendasarkan diri pada fakta,³⁷ Adapun tahapan dalam metodologi penelitian sejarah yang digunakan yakni:

³⁴ Ibid., h. 9.

³⁵ Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik* (Medan: Dwipa, 1995), h. 6

³⁶ Benyamin Lakitan, *Metodologi Penelitian* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998), h. 4.

³⁷ A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2002), h. 7.

1. Jenis Data

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), karena cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Penulis untuk mencari data mengunjungi berbagai perpustakaan seperti Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Utama UIN Raden Fatah Palembang, Perpustakaan Pasca Sarjana Utama UIN Raden Fatah Palembang, Perpustakaan Adab dan Humaniora Utama UIN Raden Fatah Palembang, Perpustakaan Daerah Palembang, Perpustakaan Balai Arkeologi Palembang dan Perpustakaan Kementerian Pendidikan Nasional Sumatera Selatan. Penulis berusaha mengumpulkan buku-buku atau bahan-bahan sebagai pedoman dan mereview buku dengan cara membedah isi buku yang terkait dengan penelitian ini.

2. Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan historis atau sejarah, Sejarah atau historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, obyek, latar belakang dan pelaku dari peristiwa tersebut. Sedangkan pendekatan ekonomi turut digunakan sebagai penguat teori sejarah yang sudah ada. Serta melalui pendekatan multi-dimensional turut membangun penelitian ini.

Pendekatan tersebut bertujuan kepada berbagai aspek yang ditimbulkan dari sejarah ekonomi yang berkaitan dengan Sejarah Perekonomian Kota Palembang Masa Kolonial Belanda Tahun 1825-1942. Serta teori politik juga melihat pengaruh yang ditimbulkan dari pergantian kekuasaan dalam bidang ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan multi-dimensional diharapkan dapat memberikan gambaran sejarah menjadi lebih utuh dan menyeluruh sehingga dihindari kesepihakan atau determinatisme. Karena hubungan antara suatu aspek memberikan pengaruh terhadap aspek yang lainnya,³⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan teknik atau studi dokumenter yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber Data Primer atau data tangan pertama yaitu: data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari, Dalam hal ini data primernya adalah dokumen-dokumen dan buku-

³⁸Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dan Metode Sejarah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 87.

buku tentang sejarah perekonomian kota Palembang, antara lain: Arsip, naskah serta koin yang berkaitan dengan ekonomi masa Kesultanan Palembang Darussalam dan Keresidenan Palembang.

- b. Sumber Data Sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh dari lewat pihak lain tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya diantaranya adalah Makmun Abdullah, dkk. *Kota Palembang: sebagai Kota Dagang dan Industri, Sejarah Perekonomian Indonesia* oleh R. Z. Lerissa dkk., *Kaum Tuo-Kaum Mudo Perubahan Religius di Palembang* karya Jeroen Peters, *Pelayaran dan Perdagangan Pelabuhan Palembang 1824-1864 M* oleh Supriyanto, dan *Lukisan Tentang Ibu Kota Palembang* oleh J. L. Van Sevenhoven,
- c. Dan buku-buku, jurnal dan artikel yang relevan dengan judul diatas,

5. Kritik dan Analisis Data

Tahapan kritik dan analisa yaitu tahapan di mana setelah data-data yang sudah terkumpul, maka diadakan penyelesaian terhadap data tersebut dengan cara mengkritik dan menganalisa data yang sudah ada baik intern maupun ekstern. Kritik intern menelusuri tentang kesahihan sumber (kredibilitas) sedangkan keabsahan sumber (otentitas) ditelusuri melalui kritik ekstern. Hal ini dilakukan agar diperoleh data yang otentik kredibel.³⁹

³⁹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, h.99-100.

Untuk menghasilkan suatu tulisan sejarah maka penulis memerlukan metode atau teknik pengumpulan data sampai ke tahap penulisan. Oleh karena itu penulis menggunakan metode penulisan sejarah yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.⁴⁰

1. Pemilihan Topik menurut Kuntowijoyo didasarkan atas dua hal, yaitu kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Kedekatan emosional yakni alasan penelitian berdasarkan keterkaitan atau ketertarikan secara personal antara peneliti dengan obyek penelitian. Kedua kedekatan intelektual yang dimaksud ialah kedekatan secara ilmiah tentang obyek yang akan dikaji oleh peneliti.⁴¹ Dalam skripsi ini penulis memilih topik penelitian mengenai “*Sejarah Perekonomian Kota Palembang: Masa Kolonial Belanda Tahun 1825-1942.*”

2. Pengumpulan Sumber/ Heuristik, Sumber yang dikumpulkan harus sesuai dengan jenis sejarah yang akan tulis. Sumber Data-data dalam penelitian ini berupa:

- a) Data primer adalah dokumen-dokumen dan buku-buku tentang sejarah perekonomian kota Palembang.
- b) Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh dari lewat pihak lain tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.

⁴⁰Louis Gotshalk, *Understanding History (Mengerti Sejarah)*, Terjemahan Nugroho Notosusanto (Jakarta : UI Press, 1975), h. 34.

⁴¹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, h. 90.

3. Verifikasi, Setelah kita mengetahui secara persis topik kita dan sumber sudah dikumpulkan, maka tahap berikutnya ialah verifikasi atau kritik sejarah atau keabsahan sumber. Verifikasi dilakukan sampai menemukan fakta sejarah tentang perubahan dan ekonomi kota Palembang tahun 1825-1942 M.

4. Interpretasi yaitu proses penafsiran terhadap sumber-sumber mengenai fakta-fakta yang diperoleh selama penelitian berlangsung dengan cara menghubungkannya untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai perubahan dan ekonomi kota Palembang tahun 1825-1942 M.

5. Historiografi atau Penulisan yaitu proses menyusun hasil penelitian yang telah diperoleh sehingga menjadi satu kesatuan sejarah yang utuh dalam bentuk skripsi dengan judul "*Sejarah Perekonomian Kota Palembang: Masa Kolonial Belanda Tahun 1823-1942.*"

Dalam penulisan sejarah merupakan hasil rekonstruksi imajinatif terhadap masa lampau dengan proses intelektual pada metode-metode sejarah. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu suatu cara untuk mencari akar permasalahan dan mencari jalan keluar dari permasalahan itu dengan cara menguraikan, menafsirkan, mencatat dan melanjutkan proses analisa data-data yang telah diperoleh. Hal ini yang kemudian memudahkan proses untuk pengentikan.

H. Sistematika Penulisan

Adapun gambaran dari sistematika penelitian ini, diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Pada Bab awal ini meliputi: A. Latar Belakang Masalah; B. Perumusan Masalah; C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian; D. Definisi Operasional; E. Tinjauan Pustaka; F. Kerangka Teoritis; G. Metode Penelitian; dan H. Sistematika Pembahasan.

Bab II Kondisi Perekonomian Masa Kesultanan Palembang Darussalam, Bab ini menguraikan: A. Perekonomian Masa Awal Kesultanan Palembang Darussalam Tahun 1659-1724M memiliki sub-sub bab yakni perekonomian sebelum masa kesultanan, produk-produk kesultanan dan pembangunan pada masa awal kesultanan; B. Perekonomian Masa Kejayaan Kesultanan Palembang Darussalam Tahun 1724-1803M, sub-sub babnya yakni kebijakan pemerintah dalam membangun perekonomian kesultanan, produk-produk yang diperdagangkan, dan pembangunan masa kejayaan kesultanan; C. Perekonomian Sebelum Keruntuhan Kesultanan Palembang Darussalam Tahun 1803-1825M memiliki sub-sub bab yakni Hubungan antara Belanda, Inggris dan Kesultanan Palembang serta akhir dari perekonomian Kesultanan Palembang.

Bab III Kondisi Perekonomian Kota Palembang 1825-1942 M. Pada bab ini menguraikan analisis: A. Kebijakan administratif ononial Belanda, B. Kebijakan

Belanda dari Undang-Undang Agraria serta, C. Kebijakan Belanda pada bidang ekonomi.

Bab IV Dampak Perekonomian Masa Pemerintahan Kolonial Belanda terhadap Perubahan Sosial Keagamaan di Palembang. Pada bab ini menguraikan analisis terhadap: A. Dampak Pembangunan Kolonial Belanda pada Bidang Ekonomi Kolonial Belanda memiliki sub-sub bab menjelaskan tentang pembangunan tata kota Palembang sebagai *Gementee*, selanjutnya pembangunan sarana dan prasarana perekonomian Kota Palembang masa Kolonial Belanda, serta pusat-pusat perekonomian masa Kolonial Belanda. Selanjutnya, B. Dampak perekonomian Kota Palembang terhadap sosial Keagamaan dengan sub-sub bab yaitu perubahan sosial di Keresidenan Belanda, dampak ekonomi terhadap ibadah haji di Keresidenan Belanda serta pengaruh perekonomian pada bidang pendidikan. Adapun pada sub bab terakhir berisi C. Dampak perekonomian pada bidang politik.

Bab V Penutup. Bab terakhir ini memuat tentang kesimpulan dari bab yang ada sebelumnya. Bab ini pula merupakan intisari dari pemikiran yang diuraikan. Berupa pokok-pokok dari jawaban atas permasalahan yang penulis ajukan. Lalu bab ini pula diberikan saran-saran ilmiah dari berbagai kekurangan yang ada, sehingga dengan demikian akan memudahkan penelitian lebih lanjut. Kemudian disajikan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.

BAB II

KONDISI PEREKONOMIAN

MASA KESULTANAN PALEMBANG DARUSSALAM

Pada pendahuluan telah dijelaskan bahwa bab ini mendeskripsikan perekonomian Kesultanan Palembang Darussalam. Kondisi perekonomian tersebut terbagi menjadi tiga fase yakni: *pertama*, masa awal Kesultanan Palembang Darussalam 1659-1724 M menjelaskan kondisi ekonomi sebelum terbentuk Kesultanan Palembang Darussalam (disingkat KPD) yakni masa Kerajaan Palembang-Islam serta awal berdirinya KPD. Kerajaan Palembang didirikan oleh Ario Damar yang melepaskan diri dari Kerajaan Majapahit. Beliau mendirikan kerajaan yang teletak di Palembang lama sekarang letaknya di kawasan 1 Ilir antara tahun 1455-1486.⁴² Selanjutnya, pada masa Pangeran Madi Ing Angkoso terjadi hubungan perdagangan antara Kerajaan Palembang dengan VOC. Selanjutnya pusat kerajaan dipindahkan dari Kuto Gawang ke Beringin Janggut pada masa awal yang dipegang oleh Sultan Abdurrahman tahun 1659-1706.⁴³ Beliau juga mendirikan sektor-sektor usaha sebagai penunjang perekonomian KPD.

Kedua, perekonomian masa kejayaan KPD ditandai dengan pembangunan dan perdagangan bebas. Pembangunan meningkat pada masa Sultan Jayo Wikramo antara tahun 1724-1758. Seperti berdirinya Masjid Agung, Makam Lemabang dan

⁴²Rivai Bakti, *Palembang Ibu Kota Sriwijaya Layak Jadi Ibu Kota Indonesia* (Palembang: Assiri, 2011), h. 93.

⁴³Djohan Hanafiah, *Melayu-Jawa: Citra Budaya dan Sejarah Palembang* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), h. 192.

Keraton Kuto Batu.⁴⁴ Sedangkan masa pemerintahan Bahauddin dikenal banyak perubahan di bidang perekonomian yang dapat memakmurkan rakyat antara tahun 1776-1803.⁴⁵ Perubahan ditandai adanya perdagangan bebas. Para pedagang seperti saudagar-saudagar Bugis, Cina, VOC, Melayu, Jawa dan pedagang setempat memenuhi pelabuhan Palembang sehingga menjadi ramai. Beliau juga membangun Benteng Kuto Besak yang terkenal hingga sekarang.

Ketiga, masa akhir KPD yaitu Sultan Mahmud Badarrudin II tahun 1803-1821 dan Pangeran Kramo Jayo tahun 1823-1825.⁴⁶ Pada masa ini kondisi perekonomian dialihkan untuk sistem pertahanan. Karena banyak terjadi penyerangan dilakukan oleh Kolonial Belanda untuk merebutkan kekuasaan. Sedangkan disisi lain, para pedagang Arab memiliki tempat tersendiri pada perekonomian Kota Palembang.

Dari ketiga fase-fase tersebut dapat mewakili kondisi perekonomian pada masa Kesultanan Palembang Darussalam dari awal pembentukan, kejayaan hingga jatuhnya perekonomian Kesultanan. Di dalam ketiga fase-fase tersebut, terdapat aktivitas-aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi serta komoditi perdagangan yang akan dijelaskan pada bab berikut ini.

⁴⁴Djohan Hanafiah, *Masjid Agung Palembang: Sejarah dan Masa Depan*, (Jakarta: Haji Mas Agung, 1988), h. 04.

⁴⁵M. Ali Amin. "Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam dan Beberapa Aspek Hukumnya." dalam K. H. O. Gadjahnata (ed.). *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*. (Jakarta: UI Press, 1968),h. 73.

⁴⁶Ibid., 01.

A. Perekonomian Masa Awal Kesultanan Palembang Darussalam 1659-1724M

1. Kondisi Perdagangan Masa Kerajaan-Palembang Tahun 1455-1659 M

Sejarah mengenai Kesultanan Palembang Darussalam dimulai dari pertengahan abad ke 15 yaitu tokoh yang bernama Ario Dillah atau Ario Damar. Beliau adalah seorang putra Raja Majapahit yang terakhir bernama Brawijaya, yang mewakili Kerajaan Majapahit yang bergelar Adipati Ario Damar yang berkuasa antara tahun 1455-1486 di Palembang lama yang sekarang dikenal dengan nama kawasan 1 Ilir. Selain itu, menurut tradisi bahwa Kerajaan Palembang didirikan oleh Ki Gede Ing Suro. Ia memerintah selama 22 tahun 1544 M sampai dengan 1566 M.⁴⁷

Kondisi perdagangan Palembang terdapat bangsa-bangsa asing yang berdagang sejak tahun 1620 M, terdapat juga pedagang-pedagang dari daerah lain yaitu Belanda. Pada tahun 1640 M antara Sultan Palembang dengan pihak Belanda diberi hak untuk mendirikan rumah jaga yang diperkuat. Pada tahun 1642 M diadakanya perjanjian baru yang menyatakan bahwa Sultan Palembang memberi hak kepada pihak Belanda untuk membeli lada dari penduduk pedalaman Kota Palembang dan hanya pihak Belanda yang dipilih untuk memperdagangkan keluar negeri.⁴⁸

Menurut J. W. J Wellan, hubungan dagang Kerajaan Palembang dengan Belanda sejak tahun 1616. Hubungan itu dimulai ketika wakil *Vereenighde Oost Indische Compagne* (disingkat VOC) di Jambi bernama Adries Soury mengirim

⁴⁷Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan Museum Negeri Propinsi Sumatera Selatan Balaputera Dewa, *Syair Perang Palembang* (Palembang: Museum Balaputera Dewa, 1995), h. 5.

⁴⁸*Ibid.*, 01.

hadiah kepada Raja Palembang yaitu Pangeran Madi Ing Angkoso 1594-1627. Hadiah tersebut dikirim melalui utusan Palembang yang bertugas ke Jambi. Kemudian pada kesempatan tersebut disampaikan adanya harapan terjalinya hubungan dagang antara Palembang dengan VOC.⁴⁹

Persahabatan Palembang dengan VOC dimulai tahun 1616, juga telah ada pembicaraan mengenai pendirian loji di Palembang. Tetapi baik pedagang yang tinggal di Palembang tahun 1619-1621 maupun penggantinya yang tinggal di Palembang sesudah tahun 1637 sampai 1680, sudah harus puas dengan tempat mereka di atas rakit dengan gudang terapung. Baru setelah tahun 1710 perdagangan dengan VOC meningkat karena timah ditemui dan digali di Bangka. Sedangkan pedagang Inggris hanya bertahan 3 tahun di Palembang yakni tahun 1626-1629.⁵⁰

Selanjutnya Van Leur membandingkan jumlah perdagangan lada di pelabuhan seperti Banten berjumlah 50.000 karung; Aceh 50.000 karung, Jambi 45.000 karung, sisanya di pelabuhan-pelabuhan di Semenanjung sebanyak 10.000 karung. Semuanya berjumlah 155.000 karung atau 6.200 ton.⁵¹ arti perdagangan yang kecil ini pada waktu itu bahkan disebabkan perekonomian yang tidak baik, tetapi hasil lada di Palembang relatif kecil dibandingkan Jambi.

Pada tahun 1620 terdapat skala perdagangan melalui Kontrak VOC. Pada kontrak tersebut Palembang mengirim lada ke Batavia sebanyak 2.000 karung =

⁴⁹Husni Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam*, (Jakarta: Logos, 1998), h. 70.

⁵⁰Djohan Hanafiah, *Melayu-Jawa: Citra Budaya dan Sejarah Palembang*, h. 166

⁵¹Ibid., h. 165.

1.000 pikul. Pada tahun 1637 seorang Pangeran Palembang hanya mengirim 10 pikul lada ke Batavia dengan sebuah *jung*, untuk dikongsikan kepada pedagang Cina bernama Jucko.

Menurut *Encyclopaedie van Nederlandsch Indie* jilid III, pada masa Sedo Ing Kenayan mulai berhubungan dengan Belanda sejak tahun 1617. Semenjak itu ada seorang wakil Belanda di Palembang hingga dihapusnya kontak dagang tahun 1621. Beberapa tahun sesudah itu berdiri pula kantor dagang Belanda pertama. Ketika itu yang menjadi Gubernur Jendral Belanda ialah Jacob Specx (1629-1632). Sejak berdirinya kantor dagang ini, pelabuhan Palembang yang sempat pasif beberapa tahun yang lalu seakan memperoleh harapan baru, dan karena itulah Sedo Ing Kenayan menggalakkan penanaman lada rakyat, sampai ke daerah-daerah hulu.⁵²

Selanjutnya pada masa Sedo Ing Rajek, sultan tidak suka bekerja sama dengan Belanda maka berbagai usaha sultan untuk tidak memenuhi kontrak dengan Belanda tahun 1642. Sehingga akhirnya, pada tahun 1647 Sultan menaikkan harga lada demikian tinggi hingga Belanda tidak memperoleh keuntungan lagi dalam monopolinya itu. Sikap Sultan ini tidak diterima Belanda, mereka kemudian mengirim armada ke Palembang, merampas 400 pikul lada dari sebuah *jung* Cina yang sedang

⁵²Salman Aly "Sejarah Kesultanan Palembang," dalam K, H, O, Gadjahnata (ed.), *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan* (Jakarta: UI Press, 1968), h. 145.

berlabuh di Sunagi Musi.⁵³ Nampak disini bahwa lada merupakan komoditi perdagangan yang paling penting, dalam mepertaruhkan keutuhan kerajaan saat itu.

Dari Pangeran Sedo Ing Rajek, kekuasaan beralih kepada saudaranya, Kyai Mas Endi atau dikenal sebagai Pangeran Ario Kesuma Abdurrohman yang kemudian menjadi Sultan pertama dari Kesultanan Palembang Darussalam dengan gelar Sultan Susuhunan Abdurahman-Khalifatul Mukminin Sayidul Imam. Dalam keperluan sistematik masa ini disebut sebagai masa Pra-kesultanan.⁵⁴

Hubungan dengan pedagang VOC (*Verenengging Ost Compagny*) Belanda juga diadakan oleh Sultan Palembang pertama yaitu Sultan Abdurrahman Kholifatul Mukminin. Pada mulanya hubungan dengan pedagang VOC sama kedudukannya dengan pedagang lainnya. Pada tahun 1642 VOC mendirikan *Loji* (Kantor Dagang) di Palembang.⁵⁵

Penguasa Palembang dalam pelaksanaan perdagangan memiliki bagian-bagian yang mengurus perdagangan. Diantaranya adalah *syahbandar* berperan sebagai pengurus kepentingan raja yaitu melindungi pedagang-pedagang dari gangguan-gangguan rakyat, melancarkan perdagangan dan urusan mereka dan mengusahakan agar hutang piutang mereka dibayar.⁵⁶ Selain *syahbandar*, dalam melakukan perdagangan Sultan dibantu oleh *raban* dan *jenang* berkerjasama dengan lembaga-

⁵³Salman Aly, *Sejarah Kesultanan Palembang*, h. 148.

⁵⁴M. Ali Amin, *Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam dan Beberapa Aspek Hukumnya*, h. 81.

⁵⁵P. de Roo de la Faille, *Dari Zaman Kesultanan Palembang*, h. 22.

⁵⁶Djohan Hanafiah, *Sejarah Keraton-Keraton Palembang: Kuto Gawang*, h. 18.

lembaga yang berada dibawahnya seperti *pesirah* dan *proatin*.⁵⁷ Dan juga pada kekuasaan Pra-Kesultanan adalah bersifat *patriomonalisme*, yang memusatkan kekuasaan pada raja dengan pembantu kaum priyayi ataupun orang-orang sewaan. Dengan kondisi ini dunia perdagangan tidak terlepas dari keterlibatan para penguasa dan bangsawan pada perdagangan skala luas.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi perdagangan pada masa Kerajaan Palembang terjadi hubungan perdagangan antara pihak Sultan dengan pedagang asing diantara VOC tahun 1617. Mereka membuat kontrak perdagangan yang berisi perbandingan skala perdagangan antar Palembang dengan wilayah lainnya. VOC juga membuat *loji* (kantor dagang) tahun 1642. Selain itu, Sultan Palembang membuat struktur lembaga perdagangan yang dikepalai oleh *syahbandar*, lalu dibawahnya *raban* dan *jenang* sedangkan yang paling akhir adalah *pesirah* dan *proatin*. Dari pembagian tugas lembaga-lembaga tersebut peranan dari para penguasa dan bangsawan tidak terlepas dari perdagangan di masa Pra-Kesultanan.

2. Kondisi Ekonomi Masa Awal Kesultanan Palembang Darussalam 1659-1724 M

⁵⁷Supriyanto, *Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang 1824-1864* (Yogyakarta : Ombak, 2013), h. 59.

Seperti yang diterangkan dalam keterangan pada pengantar, pada bagian ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi masa awal Kesultanan Palembang Darussalam antar tahun 1659-1724 M. Antara tahun tersebut mengambil kondisi ekonomi masa Abdurrahman-Khalifatul Mukminin Syadul Iman ataulebih dikenal Kyai Mas Endi.

Kemajuan pada bidang ekonomi terlihat pada masa Kyai Mas Endi terdapat beberapa kebijakkan-kebijakkan tata kota dan ekonomi. Melalui kebijakkan tersebut beliau memindahkan Keraton Kuto Gawang ke Berigin Janggut.⁵⁸ Sehubungan Kraton Kuto Gawang telah rata puing-puing akibat bermusuhan dengan Belanda.

Kemudian beliau membentuk wilayah pemukiman dan sektor-sektor usaha. Setiap sektor ini berproduksi sesuai dengan keahlian suatu lembaga yang disebut *guguk*.⁵⁹ Nama-nama *guguk* dikaitkan dengan sektor usaha diantaranya adalah Sayangan(tempat perajin tembaga), Kepandean(tempat pandai besi), Pelengan(tempat perajin pembuat minyak), Rendang(pembakaran) dan Kuningan(tempat perajin kuningan).

Selanjutnya selain nama-nama berbagai sektor usaha terdapat tempat tinggal atau kedudukan seorang pejabat tinggi, seperti: Kebumen(tempat tinggal Mangkubumi), Kedipan(tempat tinggal Adipati), Ketanduan(tempat tinggal perbendaharaan), Kebangkan(tempat tinggal orang-orang Bangka), Kebalen(tempat tinggal orang-orang Bali). Kemudian ada nama-nama tempat yang menunjukkan

⁵⁸Djohan Hanafiah, *Melayu-Jawa: Citra Budaya dan Sejarah Palembang*, h. 192.

⁵⁹Djohan Hanafiah, *Kuto Besak: Upaya Kesultanan Palembang Menegakkan Kemerdekaan* (Jakarta: Haji Mas Agung, 1989), h. 28.

fungsi-fungsi seperti: Segaran(Tempat menyegarkan diri), Penedan(tempat yang dipelihara atau tempat keindahan), Karang Waru(kumpulan pohon-pohon) dan Terusan(saluran).⁶⁰ Dari pembangunan tersebut tidak hanya melalui tata kota dengan membangun pemukiman untuk kerajaan akan tetapi untuk memajukan perekonomian Sultan membangun sektor-sektor usaha.

Selain pada pusat pemerintahan Sultan membangun hubungan dengan daerah pedalaman melalui Undang-Undang Simbur Cahaya yang masih efektif diberlakukan pada masa Kyai Mas Endi. Undang-Undang Simbur Cahaya menyuplai dana yang berasal dari pajak yang telah ditetapkan. Sultan seringkali melakukan perjalanan ke daerah hulu selama tahun 1691-1706 untuk memantau berjalanya pajak-pajak yang semakin banyak mengalir masuk ke dalam kas kesultanan. Penguasa-penguasa di Pasemah yang periode sebelumnya kurang berintegrasi kepada kesultanan, kini menerima baik perlindungan Sultan.⁶¹

Selain itu masa Kyai Mas Endi mendirikan sebuah masjid yang dikenal dengan Masjid Lama. Masjid ini didirikan tahun 1663 M. Sekarang lokasi masjid ini berada di Jalan Masjid Lama, persimpangan Jalan Beringin Janggut, Kelurahan 17 Ilir, Palembang.⁶²

⁶⁰Ibid., h. 28-29.

⁶¹Salman Aly, *Sejarah Kesultanan Palembang*, h. 153.

⁶²Bangun P. Lubis, dkk., *Masjid Agung Palembang: Sebuah Persembahan Kepada Masyarakat Sumatera Selatan* (Sumatera Selatan: Pemprov. Sumatera Selatan), h. 54.

Berdasarkan informasi diatas pada masa awal KPD , kebijakan-kebijakan ekonomi Sultan Kyai Mas Endi memusatkan pada pembangunan kembali Kesultanan akibat permusuhan dengan Belanda. Beliau membangun sektor-sektor pemukiman dan sektor-sektor usaha. Pembangunan tersebut diambil dari dana kas Kesultanan diantara adalah pajak-pajak.

3. Komoditi Perdagangan Masa Awal Kesultanan Palembang Darussalam 1659-1724 M

Pada masa awal Kesultanan Palembang Darussalam 1659-1724 memiliki aktivitas ekspor-impor. Distribusi komoditas ekspor-impor membuat lalu lintas perdagangan darat maupun air menjadi ramai. Komoditas ekspor-impor yang menjadi primadona adalah timah dan lada.

Selain itu, Palembang mengimpor beraneka jenis barang. Dilihat dari ramainya pelabuhan dengan kapal-kapal, kebanyakan dari Jawa, Madura, Bali dan Sulawesi yang membawa beras, garam, dan pakaian yang dibuat pulau-pulau tersebut. Sedangkan candu dan barang pecah belah dari India, komoditi dari Eropa ditawarkan oleh orang-orang Belanda dari Batavia.⁶³

Menurut Puspongoro dan N. Notosutanto terdapat komoditi lain, yaitu budak-budak yang diekspor dari Palembang ke Malaka (selain beras, bawang putih, bawang merah, daging, arak, hasil hutan seperti: rotan, madu, dammar, katun dan sedikit emas dan besi) banyak berasal dari pedalaman.

⁶³Djohan Hanafiah, *Sejarah Keraton-Keraton Palembang: Kuto Gawang*, h. 19.

Sedangkan barang-barang yang diperdagangkan Palembang diantaranya tekstil, kapur barus, mutiara, kayu berharga, rempah-rempah, gading, kain katun dan sengkelat, perak, emas, sutera, pecah belah, gula dsb. Sehingga Palembang sering dikunjungi oleh para pedagang dari Persia, Arab dan Cina yang meperdagangkan barang-barang negerinya atau negeri yang dilaluinya.⁶⁴

Hubungan perdagangan terjadi antara Palembang dengan Pulau Jawa, Lingga, Riau, Singapura, Pulau Penang, Malaka, negeri Siam dan negeri Cina. Disamping itu, pulau-pulau lainnya datang juga perahu-perahu membawa dan mengambil barang-barang dagangan. Barang-barang dagangan itu berupa kain linen dari Eropa. Benang sutera, teh, barang pecah belah, benang emas, panci didatangkan dari Cina. Minyak kelapa dan minyak kacang dari Jawa dan Siam. Pedagang kain linen terbesar adalah orang-orang Arab. Hasil-hasil dari Kesultanan Palembang yang biasa diekspor adalah rotan ikat, kayu lako, damar, kapur barus, kemenyan, lilin, gading, dan pasir emas. Hasil kebun seperti kopi, lada. Nila. Tembakau, tebu, gambir, pinang. Hasil-hasil lainnya adalah ikan kering dan ikan asin, barang pecah belah, tikar rotan, jerami, karung, kuningan, songket, dan lain-lain.⁶⁵

Pada awal Kesultanan Palembang Darussalam, lada telah menjadi komoditi perdagangan yang berarti bagi kesultanan. Saat itu lada dimonopoli oleh kerajaan Banten. Dahulunya lada dibeli oleh pedagang-pedagang India dan Tionghoa.

⁶⁴Ibid.

⁶⁵M. Ali Amin, *Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam dan Beberapa Aspek Hukumnya*, h. 99.

Kemudian setelah ditemukan jalan lautan maka datanglah permintaan dari Eropa.⁶⁶ Kedatangan bangsa Belanda dengan mudah menguasai Sumatera atas bantuan raja-raja *feodal* waktu itu. Sehingga Sultan Palembang memberikan proteksi pada pihak Belanda untuk memonopoli perdagangan lada di wilayah Bangka dan Belitung.⁶⁷

Burger mencatat bahwa monopoli lada di Sumatera Bagian Utara dipegang oleh Aceh sedangkan di Sumatera Bagian Selatan dipegang oleh Banten. Akan tetapi terdapat daerah yang tidak menjadi wilayah kekuasaan kesultanan Aceh dan Banten yakni Palembang, Jambi dan Siak. Sultan Banten mempengaruhi daerah tersebut tetapi gagal.⁶⁸

Berkaitan dengan hal tersebut, Palembang sangatlah penting bagi perkembangan perekonomian dibuktikan kota ini sebagai rebutkan oleh Inggris dan Belanda saat Melaka jatuh ke tangan Portugis. Mereka mempengaruhi daerah Palembang yang sangat strategis agar dapat menguasai jalur perniagaan dan monopoli pertambangan timah dan komoditas lada.⁶⁹ Hal ini terjadi ketika saat Bandar Dagang Singapura menjadi pusat perdagangan internasional.

Kesimpulan dari penjelasan diatas terdapat banyak jenis-jenis barang perdagangan yang dijual-belikan baik pada masa awal Kesultanan Palembang

⁶⁶Prajudi Atmosudirjo, *Sejarah Ekonomi Indonesia dari Segi Sosiologi Sampai Akhir Abad XIX* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1998), h. 64.

⁶⁷Jousari Hasbullah, *Mamang dan Belanda: Goresan-Goresan Wajah SumSel Zaman Kolonial dan Refleksinya pada Hari Ini* (Palembang: UNSRI, 1996), h. 24.

⁶⁸Djohan Hanafiah, *Sejarah Keraton-Keraton Palembang: Kuto Gawang*, h. 17.

⁶⁹Retno Purwanti, "Peran Sungai Musi dalam Pembentukan Pusat Politik Ekonomi dan Budaya Masyarakat Palembang," dalam ed. Bambang Budi Utomo, *Ekspedisi Sriwijaya Mencari Jalur yang Hilang* (Palembang: Balai Arkeologi, 2010), h. 144.

Darussalam. Komoditi yang dihasilkan di Palembang, kemudian dibeli oleh pedagang asing ataupun terjadi sebaliknya. Selain monopoli perdagangan terjadi hubungan *mutualisme* (timbang-balik) antar pedagang untuk memenuhi suplai kebutuhannya.

B. Perekonomian Masa Kejayaan Kesultanan Palembang Darussalam 1724-1803M

Perekonomian masa kejayaan Kesultanan Palembang Darussalam (disingkat KPD) 1724-1803 M diantara tahun tersebut penulis mengambil masa sultan Jayo Wikramo atau Sultan Mahmud Badarudin I (disingkat SMB I) dan masa Sultan Bahauddin. Masa SMB I (1724-1758) banyak didirikan pembaharuan dan pembangunan bangunan batu. Sedangkan pada masa Sultan Muhammad Bahauddin terjadi perdagangan bebas secara besar-besaran yang merugikan pihak pribumi maupun VOC. Kejayaan ekonomi berlimpah karena banyaknya ekspor-impor barang di kesultanan.

1. Kebijakan Pemerintah dalam Membangun Perekonomian Kesultanan

Seperti yang telah dijelaskan pada pengantar, kebijakan ekonomi pada masa kejayaan Kesultanan Palembang Darussalam antara tahun 1724-1803, dimana masa tersebut diantara masa Sultan Jayo Wikramo atau dikenal SMB I dan Sultan Bahauddin. Kesultanan Palembang Darussalam pada kedua masa ini memiliki perekonomian yang meningkat.

Pada masa Sultan SMB I atau Jayo Wikramo (1724-1758) dikenal sebagai Tokoh Pembangunan Palembang Modern dalam arti pembangunan fisik. Pada masa ini pembangunan dan pembaruan berupa bangunan batu yakni Makam Lemabang

tahun 1728, Masjid Agung diresmikan pada Isnin 28 Jumadil Awal 1161 (26 Mei 1748)⁷⁰, sedangkan Kuto Batu diresmikan pada Isnin 4 Jumadil Akhir 1150 (29 September 1737).⁷¹

Faktor-Faktor pendorong pembangunan Kesultanan Palembang Darussalam diantaranya kekayaan sumber daya alam yang melimpah dengan adanya suplai kebutuhan yang terpenuhi lalu ditambah ekspor dan impor komoditi barang dagang. Hal tersebut terlihat dari hasil-hasil dari berbagai barang dagang di tepian Sungai Musi disinggahi oleh kapal-kapal pedagang asing, sedangkan di perairan memungkinkan pengangkutan barang-barang yang sangat lancar.

Perdagangan diadakan dengan Pulau Jawa, Lingga, Riau, Singapura, Pulau Penang, Malaka, negeri Siam dan negeri Cina di samping itu dari pulau-pulau lainnya datang juga perahu-perahu mengambil dan membawa barang-barang dagangan. Barang dagangan itu adalah berupa macam-macam kain linen, kain cita Eropa dari yang kasar samapai yang halus. Juga barang-barang dari Cina seperti sutera, benang emas, panci-panci besi, pecah-belah, obat-obatan, teh, manisan dan barang-barang lain. Barang-barang dagangan yang penting lainnya adalah minyak kelapa dan minyak kacang (dari Jawa dan Siam), gula Jawa, Bawang, asam, beras, gula pasir, tembaga, besi, barang-barang kelontong dan sebagainya, juga beberapa barang dari Eropa.

⁷⁰Djohan Hanafiah, *Masjid Agung Palembang: Sejarah dan Masa Depan*, h. 04.

⁷¹Djohan Hanafiah, *Kuto Besak: Upaya Kesultanan Palembang Menegakkan Kemerdekaan*, (Jakarta: Haji Mas Agung, 1989), h. 9.

Pedagang kain Linen terbesar adalah orang-orang Arab, ada yang mempunyai kapal dan perahu sendiri, namun kebanyakan mereka hanya mengurus barang dagang oaring lain dari luar. Sesudah orang Arab, menyusul orang Cina yang membeli barang-barang dari perahu. Orang-orang Palembang membeli dari orang-Arab dan Cina membawanya ke pedalaman untuk dijual di sana. Orang-orang Palembang biasa membeli barang dengan kredit dan membayar dengan barang pula.⁷² Hal tersebut menunjukkan adanya permintaan dan penawaran barang kepada pihak luar yang terjadi di Kesultanan. Sehingga kesepakatan dari pihak sultan diberikan melalui kebijakan pembayaran pajak.

Barang-barang dagangan dari para pedagang yang ada di Palembang saat itu terdiri dari bermacam-macam jenis diantaranya berupa bermacam-macam kain linen, kain citra Eropa dari kasar sampai ke yang halus. Dan juga barang-barang dari Cina seperti sutra, benang emas, panci-panci besi, barang pecah belah, obat-obatan, teh, manisan, dan barang-barang yang lain. Barang dagangan yang penting lainnya adalah minyak kelapa dan kalang. Dan banyak juga barang lain seperti gula jawa, gula pasir, tembaga, besi yang didapatkan dari Siam dan Eropa. Orang-orang Palembang membeli dari pedagang Cina dan Arab kemudian membawanya ke pedalaman untuk dijual disana, biasanya mereka membeli barang dengan kredit dan membayarnya dengan barang juga (barter).

⁷²M. Ali Amin, "Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam dan Beberapa Aspek Hukumnya", h.99.

Hasil-hasil kesultanan yang menjadi komoditi perdagangan negara lain adalah rotan ikat, dammar, kapur barus, kemenyan, kayu lake, lilin, gading dan pasir, timah serta emas. Barang-barang tersebut dikumpulkan dari hutan dan dikelompokkan berdasarkan jenisnya ditepi sungai. Dan ada juga hasil bumi lainnya yaitu lada, kopi, tebu rotan, gambir, pinang, tembakau dan nila.⁷³ Hasil-hasil lainnya adalah ikan kering, ikan asin, barang pecah belah, tikar, rotan dan jerami, karung-karung, barang dari kuningan, sutra dijalin dengan benang emas (songket), dan barang kapas tenunan sendiri.

Menurut Ali Amin, pada masa Sultan Jayo Wikramo menjalankan sistem perdagangan yang dikenal dengan istilah *Tiban* dan *Tukon*. *Tiban* adalah pertukaran wajib barang-barang produk dari pedalaman dengan barang-barang impor. *Tukon* adalah penukaran barang dari pedalaman dengan uang. Barang-barang yang digunakan untuk *tiban* adalah baju Jawa, kain Bengala putih, kapak/parang besi dan garam. Barang-barang ini biasanya nilainya dikalikan dengan seratus atau bahkan diselewengkan sampai dua ratus. Diluar produk di atas tidak diperkenankan dimasukkan ke dalam *Tiban Tukon*, seperti lada, kopi, lilin, gading gajah, katun, tembakau dan gambir dan terutama beras.

⁷³M. Ali Amin, *Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam*, h. 99-100.

Dalam kaitannya dengan *tukon*, dikatakan bahwa penggunaan uang di Kesultanan Palembang sudah merata. Uang yang beredar umumnya dolar Spanyol,⁷⁴ juga mata uang lokal yang dikeluarkan oleh pihak kesultanan, disebut uang *pitis*⁷⁵ dan uang *dukaton*⁷⁶.

Sedangkan hubungan dengan daerah pedalaman mengalami kemerosotan pada masa Jayo Wikramo (1724-1758). Beberapa daerah terutama yang terletak diperbatasan Lampung, Bengkulu dan Jambi banyak tidak patuh lagi. Sementara di ibu kota kegiatan penyeludupan dan perdagangan gelap merajalela, sehingga lada dan timah banyak jatuh ke tangan Inggris tanpa dipungut pajak, diseludupkan terutama oleh pedagang-pedagang Cina.⁷⁷

Pada masa Bahauddin (1776-1803) dikenal sebagai Tokoh Pembangunan Ekonomi dan Budaya. Pada masa pemerintahan Bahuddin banyak perubahan di bidang perekonomian yang dapat memakmurkan rakyat. Di bidang budaya,

⁷⁴Farida, *Sejarah Perekonomian Kesultanan Abad XVII hingga Awal Abad XIX*, artikel diakses pada 9 Maret 2016 dari [http://eprints.unsri.ac.id/2358/2Daftar_Isi_dan_isi_Lontar_Edisi_Januari - Juni_2009.pdf](http://eprints.unsri.ac.id/2358/2Daftar_Isi_dan_isi_Lontar_Edisi_Januari_-_Juni_2009.pdf).

⁷⁵Mata Uang *pitis* terbuat dari logam timah hitam dan timah putih berbentuk bulat pipih dengan tengahnya persegi empat. Ada juga yang berbentuk segi enam dengan bulatan dibagian tengahnya. Terdapat aksara Arab Melayu pada bagian tepi atasnya. Tulisan tersebut merupakan tanda sultan yang berkuasa saat uang tersebut dibuat. Uang tersebut dapat ditukarkan dengan mata uang perak atau tembaga, apabila hendak keluar negeri. Penjelasan ini dimuat dalam Ali Amin, *Sejarah Kesultanan Palembang*, h. 100.

⁷⁶Mata Uang Dukaton adalah mata uang Belanda atas kebijakan VOC yang membawa dan mengedarkan mata uang tersebut. Nama lain dari mata uang ini yakni Zilveren Rijder dalam bahasa Belanda sedangkan Silver Riders dalam bahasa Inggris. Sesuai dengan namanya koin ini memiliki gambar penunggang kuda pada bagian tepi atasnya lalu bahanya terbuat dari perak. Uang ini banyak beredar di Indonesia khususnya di Kesultanan Palembang Darussalam. Artikel terkait diakses pada 7 Oktober 2016 dari <http://www.worldofcoins.eu/>.

⁷⁷Salman Aly, *Sejarah Kesultanan Palembang*, h. 154.

Palembang pernah menjadi pusat kebudayaan dan pusat syiar agama Islam di kawasan belahan barat Nusantara.⁷⁸

Pada masa Sultan Bahauddin (1776-1803), perdagangan lada memasuki perdagangan bebas dan daerah pemasarannya di Riau. Pada waktu itu perdagangan Riau masih di bawah kontrol saudagar-saudagar Bugis yang belum dijangkau VOC. Kapal-kapal Riau dan juga kapal-kapal Palembang berlayar menuju Riau dengan muatan lada Palembang. Karena ramainya perdagangan ini, maka pelabuhan Riau tumbuh menjadi pelabuhan yang besar dan ramai. Wilayah ini tempat saudagar Tiongkok dan Inggris bertemu dengan saudagar setempat, yaitu Palembang, Bugis, Melayu dan Jawa.⁷⁹

Pada masa ini Palembang memiliki sumber keuangan dari perdagangan timah, lada dan hasil hutan. Tambang timah terdapat di Pulau Bangka yang dikelola oleh orang-orang Melayu dan Cina. Sultan memberikan subsidi, upah dan biaya hidup kepada para penambang. Akan tetapi timah yang dihasilkan lalu dibeli oleh Sultan dengan harga yang telah ditentukan. Perdagangan timah di Kesultanan Palembang cukup ramai, oleh sebab itu Sultan Muhammad Bahauddin mengeluarkan uang *pitis* yang dibuat di Mentok.⁸⁰

⁷⁸Bambang Budi Utoyo, dkk., *Kota Palembang dari Wanua Sriwijaya Menuju Palembang Modern*, h. 205.

⁷⁹Ibid., h. 208.

⁸⁰Dedi Irwanto M. Santun, *Iliran dan Uluan* (Yogyakarta: Eja Publisier, 2010), h. 52.

Dari Kekayaan Kesultanan, Sultan Bahauddin membangun Beteng Kuto Besak pada tahun 1780. Pembangunan cukup lama, kurang lebih 17 tahun dan juga biaya pendirian dikeluarkan sendiri oleh Sulatan Mahmud Bahauddin dari perbendaharaanya.⁸¹

Telah dijelaskan sebelumnya, pada masa Sultan Bahauddin kekayaan dan kemakmuran Kesultanan Palembang dimiliki sendiri karena tidak banyak memperhatikan kontrak-kontrak dengan VOC. Hal ini terjadi, karena pengawas VOC di Palembang telah berdagang sendiri. Termasuk Inggris yang telah beroperasi sendiri. Bendera Belanda tidak berkibar sehingga para pedagang manapun dapat masuk dengan bebas dan netral.⁸²

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, Kebijakan pemerintahan dalam membangun perekonomian Kesultanan Palembang Darussalam meneruskan kebijakan-kebijakan sebelumnya, diantaranya melakukan monopoli perdagangan dan pembangunan perekonomian. Akan tetapi pada masa ini ramainya lalu lintas perdagangan menjadi faktor pendorong perekonomian sehingga Sultan menerapkan *tiban-tukon* untuk mengatur perdagangan. Pihak Kesultanan juga mengeluarkan mata uang yang disebut sebagai *pitis*.

⁸¹Djohan Hanafiah, *Benteng Kuto Besak: Upaya Kesultanan Palembang Menegakkan Kemerdekaan*, h. 07.

⁸²Ibid., h. 111.

2. Peranan Timah dan Lada dalam Perekonomian Kesultanan Palembang

Lada dan timah mempengaruhi sejarah Kesultanan Palembang Darussalam. Karena lada dan timah adalah komoditi terpenting di dunia. Atas kekayaan alam tersebut mengundang bencana. Kondisi bangsa-bangsa yang bersaing ketat untuk menguasai daerah ini. Sebagai bukti, Belanda berhasil mendapatkan kontrak monopoli perdagangan lada dan timah dari Kesultanan Palembang Darussalam pada tahun 1777. Ini berarti pedagang asing (dari Eropa lainnya misalnya Inggris dan Portugis) dilarang berniaga komoditi tersebut.⁸³

Akibat monopoli lada dan timah secara berlebihan maka timbulah perdagangan bebas. Hal tersebut sebagai bentuk kejahatan pada masa Sultan Badarrudin I. Perdagangan bebas mengakibatkan lada, terutama timah dikuasai oleh Inggris yang berdagang dengan Cina. Akibat distribusi yang kutang baik, kebun-kebun lada di daerah hulu sungai hampir dihancurkan oleh para pemilik sendiri, jika sekiranya hasil-hasil itu tidak dapat dibawa dengan melintasi pegunungan Krue dan Bengkulu.⁸⁴

Perdagangan dan pelayaran VOC di daerah Palembang mengalami kemunduran atas hal tersebut sekitar tahun 1780-an. Mundurnya VOC sebagai badan dagang milik Belanda menyebabkan terjadi pula penurunan penyerahan timah oleh pihak Kesultanan Palembang kepada VOC. Hal ini disebabkan VOC tidak mampu

⁸³Kiagus Imran Mahmud, *Sejarah Palembang*, h. 48.

⁸⁴Djohan Hanafiah, *Kuto Besak: Upaya Kesultanan Palembang Mempertahankan Kemerdekaan*, h. 50.

membeli timah. VOC hanya mampu membeli lada sebesar 2000 pikul, sedangkan yang dijual ke Cina mencapai 20.000 pikul setahun. Sedangkan tahun 1787 produksi timah menurun, penyebabnya adalah peperangan VOC dengan raja-raja Riau dan Lingga yang bekerja sama dengan para bajak laut. Akibatnya terjadi penjarahan, penghancuran dan pembunuhan di Bangka. Tahun 1796 timah Bangka yang dapat dibeli oleh VOC hanya sebanyak 1400 pikul. Penurunan volume dagang VOC dapat pula dilihat dari sedikitnya kapal-kapal yang berbendera VOC berlabuh di Palembang pada tahun 1790-1792, hanya sebanyak 20 buah, sedangkan kapal-kapal pribumi dan asing yang merapat mencapai 374 buah.⁸⁵

Sebagai bukti perdagangan bebas pada masa itu terlihat dari kontrak VOC dengan Sultan Madmud Badarrudin I. Kontrak-kontrak penyerahan lada dan timah memang tinggi, rata-rata 20.000 sampai 30.000 pikul per tahun. Sedangkan pada masa Muhammad Bahauddin, lada Palembang dijual kepada VOC berjumlah 1/3 dari produksi lada di Palembang tahun 1780.⁸⁶

Sultan Bahauddin penyerahan timah dan lada tidak terjadi karena sultan menolak pinjaman dan kredit dari Kolonial Belanda. Aktivitas tersebut membuat pejabat Belanda terus melakukan perdagangan gelap, sehingga perdagangan VOC semakin memburuk. Perdagangan gelap dilakukan oleh pegawai-pegawai VOC dan

⁸⁵Farida, *Sejarah Perekonomian Kesultanan Abad XVII hingga Awal Abad XIX*, artikel diakses pada 9 Maret 2016 dari http://eprints.unsri.ac.id/2358/2Daftar_Isi_dan_isi_Lontar_Edisi_Januari_-_Juni_2009.pdf.

⁸⁶Djohan Hanafiah, *Kuto Besak: Upaya Kesultanan Palembang Mempertahankan Kemerdekaan*, h. 50-51.

para pedagang Palembang. Pedagang-pedagang dari Lingga, Riau dan Bone serta pedagang-pedagang kecil tidak mampu lagi memaksa aturan-aturan monopoli sehingga penyedulupan makin marak.⁸⁷

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa peranan timah dan lada memiliki tempat terpenting dibandingkan komoditas perdagangan lainnya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya persaingan antara Belanda dan Inggris dalam merebutkan perdagangan timah. Pada masa SMB I antara tahun 1724-1758 terjadi perdagangan bebas antara pihak Belanda dengan kesultanan. Hal itu berupa penandatanganan kontrak-kontrak perdagangan antara VOC dengan SMB I. sedangkan perdagangan gelap dilakukan oleh Inggris pada masa Sultan Bahauddin. Dan juga pada masa Bahauddin tidak terjadi penandatanganan kontrak-kontrak perdagangan dengan VOC, sehingga lalu-lintas perdagangan tidak dimiliki siapapun sehingga membuat VOC mengalami kemunduran.

C. Perekonomian Sebelum Keruntuhan Kesultanan Palembang Darussalam Tahun 1803-1825 M

Perekonomian kesultanan berangsur-angsur turun pada masa Akhir Kesultanan Palembang Darussalam karena terjadi penyerangan oleh Kolonial Belanda. Untuk itu, kesultanan berupaya untuk mempertahankan daerahnya melalui kebijakan-kebijakan pembangunan benteng serta memperkuat persenjataan. Selain

⁸⁷Farida, *Sejarah Perekonomian Kesultanan Abad XVII hingga Awal Abad XIX*, artikel diakses pada 9 Maret 2016 dari http://eprints.unsri.ac.id/2358/2Daftar_Isi_dan_isi_Lontar_Edisi_Januari_-_Juni_2009.pdf.

itu, daerah kesultanan banyak terjadi konflik intern baik dari dalam kerajaan maupun dari rakyatnya. Pada bagian ini mendeskripsikan dari hal-hal tersebut:

1. Usaha Mempertahankan Kesultanan Palembang Darussalam

Kebijakan-kebijakkan SMB II pembangunan benteng di Kesultanan sangatlah meningkat. Sebab peningkatan ini oleh adanya era imperialisme dan kolonialisme Inggris dan Belanda pada abad ke 19 yang memuncak. Selain perbaikan dan peningkatan benteng lama dan beberapa benteng dibangun di sepanjang jalan masuk ke kota Palembang dan pintu belakang pedalaman.

Di samping benteng yang dibangun di darat, ada juga benteng yang terapung di Sungai Musi. Benteng-benteng ini jumlahnya cukup banyak dan ditempatkan di balik cerucup (tonggak kayu yang ditancapkan di dasar sungai untuk menahan laju kapal). Penanggung jawab dan komando benteng-benteng terapung ini adalah Cik Nauk, kepala suku Bugis dari Lingga.⁸⁸

Sultan Mamud Badarrudin II menjalin hubungan baik dengan Kolonial Belanda. Sehingga pada masa itu beliau mendirikan sebuah Loji (pelabuhan dagang) di Sungai Musi bagian hulu. Letaknya di tengah-tengah Sungai Tangga Panjang dan Sungai Aur. Sekarang nama tersebut berubah menjadi Kampung 7 dan Kampung 10 Ulu. Loji tersebut terbuat dari Bambu dan kayu.⁸⁹ Jadi, pendirian loji tersebut sebagai lambang persahabatan antara Sultan dan Kolonial Belanda. Sebagai layaknya

⁸⁸Bambang Budi Utoyo, dkk., *Kota Palembang: dari Wanua-Sriwijaya Menuju Palembang Modern* (Palembang: Katalog Dalam Terbitan, 2012), h. 232.

⁸⁹Ki Agoes Mas'Oed, *Sedjarah Palembang Moelai Sedari Seri-Widjaja Samapai Kedatangan Balatentara Dai Nippon* (Palembang: Sinar Matahari, 1941), h. 37.

persahabatan Sultan memberikan hadiah berupa lada hitam dan lada putih, timah, lilin, gambir, gading gajah, kayu tambesi, tikar rotan, dan tongkat yang berkepala emas.⁹⁰

Dalam usaha lainya pihak Kesultanan melalui pelaut dan pedagang dari Sambas, Riau dan Melayu melalui jalur-jalur khusus menyeludupkan komoditi perdagangan, senjata, dan mesiu ke Palembang. Dismaping memdatangkan senjata dari Riau, Palembang juga sudah dapat memproduksi senjata (meriam), peluru dan mesiu. Keahlian membuat mesiu diperoleh dari seorang Eropa yang pernah menjadi tawanan Mutinghe.⁹¹

Selain pembangunan benteng sebagai kebijakan lainya yakni Sultan Palembang lebih memperhatikan Pulau Bangka sebagai asset perekonomian Kesultanan Palembang. Adanya armada laut yang dipimpin oleh para bangsawan Palembang antara lain Raden Keling. Raden Keling mengamankan sumber timah di Pulau Bangka dari perompakkan dan pencurian, juga mengacaukan usaha Inggris dan Belanda serta front terdepan dari pintu masuk Sungai Musi.⁹²

Jadi, dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perekonomian lebih kepada pertahanan dan keamanan. Yakni banyak pembangunan benteng-benteng kecil dan pengutusan orang-orang kepercayaan Sultan untuk mengamankan asset-asset perekonomian Kesultanan.

⁹⁰Ibid., 01.

⁹¹Ibid., 02.

⁹²Djohan Hanafiah, *Kuto Besar: Upaya Kesultanan Palembang Menegakkan Kemerdekaan*, h. 33.

2. Akhir dari Perekonomian Kesultanan Palembang

Selama peperangan berlangsung, proses perdagangan yang dilakukan oleh penduduk mengalami penurunan, terutama komoditi utama dari Kesultanan Palembang Darussalam yaitu timah.⁹³ Hal ini disebabkan, para penduduk dan pedagang tidak mau mengambil resiko kerugian yang besar selama masa perang. Selain itu, peperangan ini juga menyebabkan rusaknya masjid kebanggaan masyarakat Palembang yaitu masjid Sultan atau yang lebih dikenal dengan Masjid Agung. Kerusakan ini meliputi bagian menara dan atap masjid.⁹⁴

Pasca perang 1819, perekonomian penduduk mulai bangkit kembali. Bahkan cenderung lebih ramai dibanding sebelum terjadinya perang di tahun 1819. Perdagangan semakin ramai juga ditunjang dari keberhasilan pasukan SMB II mengalahkan pasukan Belanda. Sehingga membuat para saudagar dari Cina dan Arab tidak merasa takut untuk berdagang di wilayah Kesultanan Palembang Darussalam. Ramainya perdagangan juga disebabkan melimpahnya persediaan hasil alam yang datang dari daerah pedalaman Kesultanan Palembang Darussalam, seperti buah dan karet. Hal ini terjadi karena selama peperangan melawan pihak Belanda pasokan-pasokan hasil alam dari daerah pedalaman yang didatangkan ke ibukota Palembang mengalami penurunan yang drastis. Para pedagang tidak mau mengambil resiko untuk memasok hasil alam dalam jumlah yang banyak ke ibukota Palembang

⁹³Heidhues, Mary F. Somers, *Timah Bangka dan Lada Mentok: Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pembangunan Pulau Bangka Abad XVIII s/d Abad XX* (Jakarta: Yayasan Nabil, 2008), h. 37.

⁹⁴Djohan Hanafiah, *Palembang Zaman Bari: Citra Palembang Tempo Doeloe* (Palembang: Humas Pemkot Palembang, 1988), h. 9.

dikarenakan suasana ibukota Palembang tidak mendukung untuk diadakan transaksi jual beli.

Keadaan ini membuat perekonomian di wilayah Kesultanan Palembang Darussalam mengalami peningkatan yang cukup baik. Sebagaimana daerah yang baru saja mengalami peperangan, maka Kesultanan Palembang Darussalam sangat memerlukan perubahan ekonomi dengan cepat untuk memulihkan sumber pemasukan bagi kraton yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan rakyat banyak. Dalam hal komoditas makanan hanya harga garamlah yang sangat tinggi. Harga yang tinggi ini dipicu oleh terganggunya proses pengiriman garam dari Pulau Madura. Mengingat bahwa pantai yang berada di wilayah Kesultanan Palembang Darussalam merupakan daerah berawa-rawa sehingga untuk garam didatangkan dari luar kesultanan. Terganggunya proses pengiriman garam lebih disebabkan oleh adanya usaha pemerintah Hindia Belanda untuk menggagalkan pengirimannya melalui jalur laut.⁹⁵

Sementara di pihak Belanda, kekalahan pada perang ini menjadi tamparan yang cukup keras bagi pemerintah Belanda, baik pemerintah Kolonial di Batavia maupun pihak kerajaan di Belanda. Kerajaan Belanda di Eropa tidak terima dengan kekalahan memalukan ini. Selain malu, pihak kerajaan pun merugi karena biaya perang yang berlangsung dua kali selama tahun 1819 ini telah menguras keuangan kerajaan.

⁹⁵Djohan Hanafiah, *Palembang Zaman Bari: Citra Palembang Tempo Doeloe*, h. 93.

Pada tanggal 7 oktober 1823 dihapusnya Kesultanan Palembang, imbas dari dihapuskan sistem kesultanan tersebut oleh pemerintahan Belanda, terjalin perdagangan yang pesat dari bangsawan Arab. Orang Arab yang tinggal di Palembang mencapai 500 orang lebih. Pelabuhan Palembang merupakan pendatang Arab sebagai mitra baru dalam berniaga, mereka mendapatkan fasilitas yang khusus dari sultan Palembang. Yang antar lain, pedagang Arab untuk membangun gedung mereka di darat.⁹⁶ Dan juga di lingkungan keraton, orang Arab dari Hadratmaut mempunyai kedudukan khusus. Orang bukan Arab yang pernah mengunjungi keraton mereka harus berlutut sampai menyentuh lantai. Sedangkan orang Arab boleh duduk di kursi sebelah sultan. Orang Arab sudah hampir kebal dengan hukuman, sehingga mereka jarang dituntut dan dihukum.

Peralihan kekuasaan, mengakibatkan terganggunya perkembangan ekonomi pedagang Arab, selama tahun-tahun awal pemerintahan kolonial Belanda adil terhadap pedagang Hadramaut pada masa itu aramada niaganya di pelabuhan sangat kecil. Di lain pihak, untuk menumpang aktifitas perekonomian dalam hubungannya dengan pelayaran niaga di Hindia Belanda, dibetuk suatu perusahaan dagang dengan nama *Nederlandssche Handel Maatschaapij* (NHH) pada 29 Maret 1824. Tujuan di bentuk NHH, yaitu memajukan perdagangan, pelayaran, industri , perkapalan dan perikanan yang menguntungkan Belanda. Oleh sebab itu NHH didirikan bukan untuk kepentingan swasta tetapi sebagai perusahaan yang harus melayani kepentingan

⁹⁶Jeroen Peeters, *Kaum Tuo-Kaum Mudo Perubahan Religius di Palembang 1821-1942*, h. 15

pemerintah. Dengan demikian aktivitas pelayaran dan perdagangan NHH didasarkan atas kepurusan-keputusan pemerintah.⁹⁷

Pada awal pemerintahan Belanda tahun 1821-1823, para-para pangeran diberlakukan dengan baik dan dengan berhati-hati. Sikap lemah lembut yang diberikan oleh pemerintahan Belanda terhadap pejabat kesultanan merupakan salah satu cara pemerintahan Belanda untuk menguasai Palembang. Tetapi setelah terjadinya pemberontakan pada tahun 1824 yang dipimpin oleh Sultan Najamuddin IV (Prabu Anom), maka para pangeran mendapat pensiunan sebesar Rp 17.000. pada masa ini banyak korban kemiskinan dikalangan ningrat.

Pada tahun 1930 dalam pemerintahan Belanda hanya tiga pemilik kapal yang boleh di pelabuhan Palembang. Tiga kapal tersebut pemiliknya adalah dari bangsawan Arab. Pada pertengahan abad ke-19 yang tercatat sebagai pemilik kapal yang berlabuh di pelabuhan Palembang adalah pangeran Syarif Ali Bin Abu Bakar bin Saleh dari marga Syakh Abu Bakar menggunakan hubungan baiknya dengan Belanda, Syarif menjalin hubungan dagangnya sampai ke pedalaman Palembang. Pada saat yang sama, pengiriman Syarif Ali dengan cepat menyebar luas armada niaganya di pedalaman Palembang, sehingga pertengahan abad ke-19, setengah dari

⁹⁷Supriyanto, *Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang 1824-1864* (Palembang: Ombak, 2013), h. 7.

seluruh armada niaga Arab dimiliki Pangeran Ali. Pangeran Ali menguasai perdagangan Palembang sampai ia meninggal dunia pada tahun 1870.⁹⁸

Pada tahun 1600 sampai tahun 1700 industri rakyat Palembang tumbuh subur. Sisa-sisa kejayaan ini masih terlihat setidaknya sampai tahun 1832. Beberapa aktivitas industri rakyat yang dominan seperti industri manufaktur dari bahan timah, industri pembuatan perahu, pembuatan keris, industri genteng sampai ke kegiatan industri kerajinan dari bahan emas. Aktivitas industri tersebut telah memberi daya tular terhadap perkembangan sektor perdagangan rakyat dan perkembangan sektor jasa. Transportasi sungai yang memperdagangkan produk industri rakyat juga tumbuh subur.⁹⁹

Pada masa peralihan kekuasaan banyak terjadi pemberontakan oleh rakyat-rakyat pedalaman di daerah Pasemah. Hal ini disebabkan perubahan-perubahan dalam cara penetapan pajak sewa tanah permarga atau perdusun dan bukan menurut kebun masing-masing. Dengan demikian memang perluasan pertanian tidak dihalangi, tetapi penetapan pajak tidak dipertimbangkan keadaan setempat atau keberatan-keberatan yang terkait dengan sesuatu cabang pertanian. Selain bertentangan dengan dasar-dasar yang diumumkan, jumlah sewa tanah dalam waktu 5 tahun hampir berlipat ganda, sedangkan kenaikan sedikit saja sudah menimbulkan rasa tidak puas. Sedangkan pelunasan pajak menggunakan uang, sedangkan dahulu hampir semua

⁹⁸Ibid., h. 15-17.

⁹⁹Jousari Hasbullah, *Mamang dan Belanda: Goresan-Goresan Wajah SumSel Zaman Kolonial dan Refleksinya pada Hari Ini*, h. 30.

pajak dilunasi dengan barang-barang penghasilan. Akibat yang tak terhindarkan adalah tunggakan pajak. Selain itu, pada pemungutan tunggakan pajak terjadi pemaksaan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada akhir KPD terjadi pasang-surut perekonomian. Hal tersebut ditandai dengan penurunan perdagangan timah akibat peperangan. Akan tetapi pada tahun 1809 terjadi peningkatan sebab SMB I berhasil mengalahkan Belanda. Ketika Kesultanan Palembang Darussalam telah berubah menjadi Keresidenan Palembang pada tahun 1823 maka munculah pengusaha-pengusaha baru seperti saudagar-saudagar Arab yang mulai membuat bangunan di darat. Selain itu, terjadi perubahan pembayaran pajak pada daerah pedalaman sehingga banyak terjadi pemberontakan salah satunya di Pasemah.

BAB III **KONDISI PEREKONOMIAN** **DI KERESIDENAN PALEMBANG 1825-1942 M**

Pada bab II telah dijelaskan tentang kondisi perekonomian masa Kesultanan Palembang Darussalam (disingkat KPD). KPD merupakan bandar perdagangan yang menjalin hubungan dagang dengan pedagang asing (Arab, Cina dan Eropa). Para pedagang asing menyadari bahwa KPD memiliki komoditi barang dagang yang menguntungkan sehingga VOC melakukan kontrak dagang. Adapun kontrak dagang tersebut tersembunyi siasat VOC untuk meruntuhkan KPD.

Periode selanjutnya yakni kondisi perekonomian di Keresidenan Palembang, sehingga terdapat sub-sub bab yang berisi sebagai berikut: pertama, pemerintahan dibentuk sesuai dengan kebijakan administratif Kolonial Belanda yakni Kesultanan Palembang berubah menjadi Keresidenan Palembang sejak tahun 1825.¹⁰⁰ Kedua, Belanda menerapkan Undang-Undang Agraria melalui aturan-aturan penanaman di daerah Keresidenan Palembang. Sedangkan pada sub bab terakhir mengenai kebijakan Kolonial Belanda melalui bidang ekonomi. Hal tersebut salah satunya merupakan penerapan dari Undang-Undang Agraria, seperti perkebunan dengan menanam tanaman industri (seperti: karet, teh, kopi dan kapas). Sedangkan aspek ekonomi dalam bidang pertambangan yaitu Kolonial Belanda membangun kilang-kilang minyak (pertambangan minyak bumi). Dengan demikian, pada bab ini menjelaskan yang berkaitan dengan hal tersebut.

¹⁰⁰Ali Amin, *Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam*, h. 108.

A. Kebijakan Administratif di Keresidenan Palembang

Pada akhir pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam terjadi perang dengan Belanda pada tahun 1821 yang mengakibatkan jatuhnya Palembang. Sehingga pemerintah Belanda membuat perjanjian atas dimulainya peralihan pemerintahan Belanda. Setelah itu, pemerintahan diambil alih oleh Belanda tahun 1825, kemudian menempatkan J. L. van Sevenhoven sebagai Gubernur (*Regeering Commisaris*).¹⁰¹

Selama van Sevenhoven memerintah Palembang, pemerintah tidak berlangsung dengan aman. Seperti telah dijelaskan pada bab II, Kesultanan Palembang Darussalam berhasil dikuasai Belanda namun Belanda tidak berhasil menguasai rakyat kesultanan, terutama rakyat yang berada diluar kota Palembang.¹⁰² Sehingga di daerah pedalaman sering terjadi pemberontakan melawan Belanda khususnya daerah Pasemah. Akan tetapi, Kolonial Belanda mengangkat Pangeran Kramo Jayo sebagai Perdana Menteri (*Rijksbestuurder*) untuk menarik perhatian rakyat tahun 1825-1850. Kedudukannya berada dibawah pengawasan Belanda.

Adapun Kolonial Belanda mengangkat Kramo Jayo sebagai Perdana Menteri, beliau mengaharpkan kembalinya pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam. Atas hal tersebut, Belanda menggap Pangeran Kramo Jayo sebagai aktor yang mendalangi pemberontakan di daerah pedalaman. Karena itulah, Pangeran Kramo

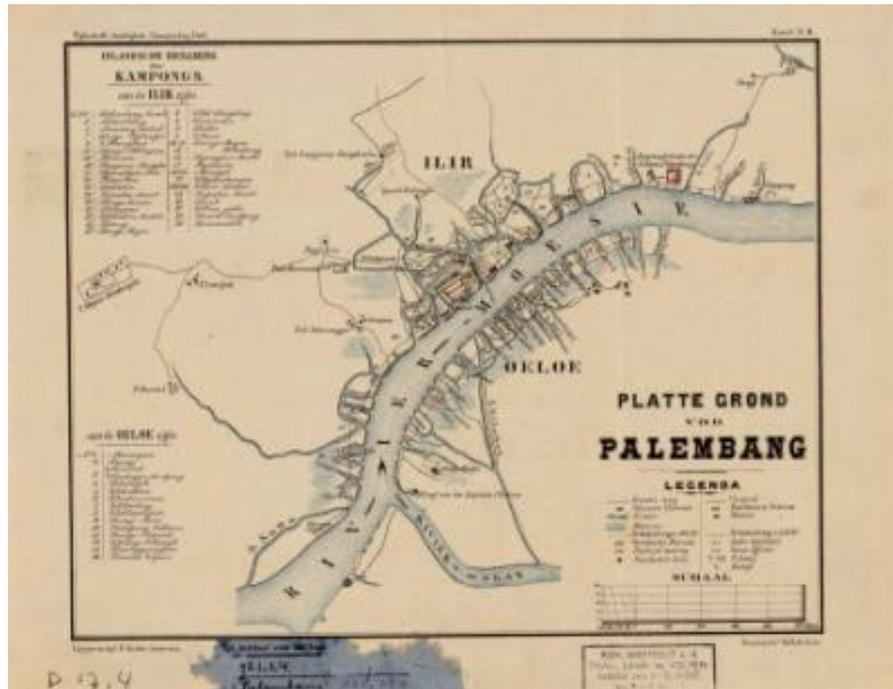
¹⁰¹Bambang Budi Utoyo, dkk., *Kota Palembang: dari Wanua-Sriwijaya Menuju Palembang Modern*, h. 240.

¹⁰²J. L. Sevenhoven, *Lukisan tentang Ibukota Palembang*, h. 9.

Jayo ditangkap pada tahun 1850 dan diasingkan pada tahun 1851.¹⁰³ Setelah itu, pemerintahan dipegang oleh Kolonial Belanda sepenuhnya oleh *Resident*.

Ketika Kesultanan Palembang Darussalam diambil alih oleh Kolonial Belanda maka wilayah Kesultanan dibagi menjadi dua keresidenan yakni Keresidenan Palembang dan Keresidenan Bangka-Belitung. Keresidenan ini meneruskan pemerintahan Inggris (Raffles) yang pernah diterapkan di Pulau Jawa suatu sistem yang dibawa dari India, setelah Indonesia dikembalikan kepada Belanda sistem tersebut tetap dipertahankan.¹⁰⁴

Keresidenan Palembang dibagi menjadi 9 *afdeeling* tahun 1870 lalu *afdeeling* dipadatkan menjadi 7 *afdeeling*. Gambar dibawah ini berkaitan dengan hal tersebut.



Gambar 01: Denah Palembang Tahun 1877

Sumber: KITLV; kode 181263

¹⁰³ Ibid., h. 241.

¹⁰⁴ Makmun Abdullah, dkk. *Kota Palembang: sebagai Kota Dagang dan Industri*, h. 45.

Selanjutnya, pada tahun 1878 menjadi 6 *afdeeling*, namun Palembang tidak berstatus *afdeeling*.

Pemerintahan Kolonial Belanda dikatakan pemerintahan terpusat. Hal itu terdapat banyak masalah yang bersifat lokal yang diurus oleh pemerintah pusat. Sehingga pemerintah mengeluarkan *Decentralisatiewet* atau Undang-undang Desentralisasi tahun 1903.¹⁰⁵ Penjelasan adalah otonomi diberikan oleh pemerintah Kolonial Belanda kepada daerah bawahnya berisi kepentingan-kepentingan ideologis, politis, ekonomis dan birokratis. yang bertujuan diadakannya daerah-daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri.

Sehingga wilayah pemerintahan diperkecil menjadi 4 *afdeeling* pada tahun 1906. Hingga akhirnya, tahun 1918 *Residentie* Palembang ditetapkan menjadi 3 *afdeeling* yaitu: *Afdeeling Palembangsehe Benedenlanden* (Daerah Seberang Hilir) beribu kota di Palembang, *Afdeeling Palembangsehe Bovenlanden* (Daerah Seberang Hulu) beribu kota di Lahat, dan *Afdeeling Ogan Komering Hulu* (Daerah Ogan Komering Hulu) beribu kota di Batu Raja.¹⁰⁶

Keresidenan Palembang dipimpin oleh Gubernur Jenderal merupakan suatu dewan yang dikenal dengan nama *Raad van Nederlands-Indie*, yang berkedudukan di Jakarta dengan anggota sedikitnya 4 orang dan sebanyak-banyaknya 6 orang. Gubernur Jendral bertanggung jawab atas wilayah kekuasaannya. Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 8 departemen yakni Kehakiman, Keuangan, Pemerintahan

¹⁰⁵Bambang Budi Utoyo, dkk., *Kota Palembang: dari Wanua-Sriwijaya Menuju Palembang Modern*, h. 242.

¹⁰⁶*Ibid.*, h. 241.

Dalam Negeri, Pendidikan Agama dan Kerajinan, Urusan Ekonomi, Perhubungan Angkatan Darat dan Angkatan laut(Marine). Pejabat dibawah Gubernur Jenderal tersusun secara struktural adalah Gubernur, Residen, Asisten Residen, Kontroler dan bupati dan seterusnya.¹⁰⁷

Keresidenan Palembang dibagi atas beberapa *afdeeling* kecuali ibu kota Palembang. Masing-masing *afdeeling* dikepalai oleh seorang asisten residen. Tiap-tiap *afdeeling* terdiri atas *onderafdeeling* yang dikepalai oleh seorang kontroler. Tiap-tiap *onder afdeeling* terdapat *marga-marga*.¹⁰⁸ Setiap *marga* dikepalai oleh seorang kepala *marga* (pasirah).

Sedangkan ibu kota Palembang dibagi atas dua distrik, yaitu Distrik Seberang Ilir dan Distrik Seberang Ulu yang dipimpin oleh seorang *demang*. Di wilayah Keresidenan Palembang tidak mengenal jabatan bupati pada saat itu melainkan hanya mengenal pangkat *demang* yang dijabat oleh pemuka/priyayi pribumi. Kemudian, pada masa revolusi fisik pangkat *demang* ini diganti dengan nama wadana. Setelah itu barulah dikenal istilah bupati dan walikota setelah sistem Keresidenan Palembang dihapuskan.¹⁰⁹

Pada tahun 1906, mulai dikenal sebagai *Gemeente* (Kotamadya) Palembang terbentuk berbeda dengan masa kesultanan, bahwa kampung-kampung di Palembang disusun berdasarkan keterampilan atau guguk, maka pada masa keresidenan kampung

¹⁰⁷Ibid., h. 47-48.

¹⁰⁸Kemas A. R. Panji dan Sri Suriana. *Sejarah Keresidenan Palembang*. artikel diakses pada 2 April 2016 dari <http://jurnal.Radenfatah.ac.id/index.php/tamaddun/article/view/28>.

¹⁰⁹Kemas A.Rachman Panji, *Masyarakat Tionghoa Palembang, Tinjauan Sejarah Sosial (1823-1945)* (Palembang: Forum Pengkajian Sejarah Sosial dan Budaya (FPS2B dengan Paguyuban Sosial Masyarakat Tionghoa Palembang(PSMTI), 2002), h. 19.

disusun berdasarkan sistem administratif. Palembang yang geografisnya dibelah oleh Sungai Musi dibagi dalam dua distrik, yaitu Seberang Ulu dan Seberang Ilir. Distrik Seberang Ulu secara administratif dibagi dalam 14 kampung, sementara Distrik Seberang Ilir sebagai pusat kota dipecah dalam 37 kampung. Masing-masing kampung memuat dua atau lebih sistem guguk tadi.¹¹⁰

Dengan kata lain dapat disimpulkan, kebijakan administrasi dilakukan Kolonial Belanda merupakan warisan dari pemerintahan Inggris (masa Raffles) seperti di Pulau Jawa. Sebagaimana pada tahun 1903, Kolonial Belanda mengeluarkan Undang-Undang Desentralisasi (pemerintahan terpusat). Atas hal tersebut pada tahun 1906, *Residentie* Palembang terbagi atas 3 *afdeeling*, kemudian *Gementee* Palembang (*Afdeeling Palembangsehe Benedenlanden*) dibentuk berdasarkan sistem administrasi. Dari pembagian administrasi tersebut terdapat para pejabat di dalamnya yakni pejabat dibawah Kerajaan Belanda adalah Gubernur Jenderal tersusun secara struktural yakni Gubernur, Residen, Asisten Residen, Kontroler dan bupati dan seterusnya. Dari pembagian sistem administrasi tersebut memudahkan Kolonial Belanda untuk mengontrol daerah jajahanya.

B. Kebijakan Kolonial Belanda Pada Bidang Agraria

Pada tahun 1870-1900, Keresidenan Belanda menerapkan Undang-Undang Pokok Agraria. Pemerintah kolonial memberikan kebebasan kepada swasta (khususnya swasta asing) dalam mengelola tanah yang disewa dari pribumi, tetapi

¹¹⁰Dedi Irwanto M. Santun, dkk., *Iliran dan Uluan: Dinamika dan Dikotomis Sejarah Kultural Palembang*, h. 47-48.

pemerintah tetap memprioritaskan kesejahteraan penduduk pribumi. Prioritas kepada penduduk pribumi dibuktikan dengan adanya salah satu poin penting dalam Undang-undang Agraria, yakni *vevreemdings verbond*. *Vevreemdings verbond* yaitu larangan untuk membeli hak milik orang pribumi oleh orang asing.¹¹¹

Penerapan Undang-undang Agraria didukung faktor ekstern (dari luar) yaitu dibukanya Terusan Suez (Mesir) pada tahun 1869. Peristiwa ini menyebabkan semakin tingginya laju pertumbuhan ekspor. Interaksi perdagangan baik dari Asia ke Eropa maupun sebaliknya, menjadi semakin mudah dilakukan. Pelaku ekonomi tidak hanya pemerintah tetapi juga swasta, yang tentunya menghidupkan perekonomian Hindia-Belanda di dunia internasional.

Pelaksanaan Undang-Undang Agraria 1870 secara tidak langsung memudahkan politik pintu terbuka yang menghendaki kebebasan investasi oleh swasta, khususnya swasta asing. Undang-undang Agraria menyebutkan bahwa kebebasan dan keamanan para pengusaha dijamin. Pelaku yang dapat memiliki tanah hanya orang-orang Indonesia, tetapi orang-orang asing diperkenankan menyewanya dari para pemilik pribumi sampai tujuh puluh lima tahun atau untuk masa paling lama antara lima atau dua puluh tahun (tergantung pada persyaratan hak kepemilikan tanah).¹¹² Purnawan Basundoro menyatakan, bahwa semua tanah yang tidak terbukti

¹¹¹ Ibid., 01.

¹¹² MC. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), h. 190.

sebagai hak dan milik seseorang, dinyatakan sebagai milik negara (*domein-verklarin*).¹¹³

Pemerintah melepaskan peranan ekonomi dan menyerahkan eksplorasinya¹¹⁴ kepada modal swasta. Pemberlakuan Undang-undang Agraria tahun 1870¹¹⁵ adalah dasar bagi pembukaan lahan swasta secara besar-besaran di kawasan strategis Pesisir Timur Sumatra (Deli) yang ternyata sangat cocok bagi tanaman tembakau. Oleh sebab itu, hutan-hutan belantara di daerah Sumatra dibuka untuk dijadikan daerah perkebunan.

Sejak abad ke-19 sampai dengan awal abad ke-20, Palembang sebenarnya tidak begitu diminati para penguasa perkebunan swasta ketimbang Deli (daerah di Sumatra Timur) yang mampu merangsang kaum *planters* untuk menanamkan modal di sektor perkebunan, terutama tembakau. Akan tetapi, sejak pemberian konsesi tanah dipermudah dan prospek komoditas pertanian karet dan teh serta pertambangan (batu bara dan minyak bumi) terlihat semakin menjanjikan, para penguasa Barat akhirnya berlomba-lomba mengeksploitasi daerah Palembang.¹¹⁶

Hal tersebut berkaitan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria, dimana pada Keresidenan Palembang berdasarkan pada kedudukan marga, pasirah dan tanah marga. Peraturan tersebut dimuat dalam I. G. O. B Stb. 1938 No. 490 (*Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten*) dimana marga tetap mempunyai

¹¹³Purnawan Basundoro, *Dua Kota Tiga Zaman: Surabaya dan Malang sejak Kolonial Sampai Kemerdekaan* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2009), h. 63.

¹¹⁴Stephen K. Sanderson, *Makro Sosiologi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 620.

¹¹⁵Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, h. 80.

¹¹⁶Mestika Zed, *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950* (Jakarta: LP3ES, 2003), h. 68-69.

hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri, membuat peraturan-peraturan yang berhubungan dengan urusan-urusan rumah tangganya. Kedudukan Pasirah mewakili seluruh kepentingan anggota marga.¹¹⁷ Oleh karena itu kekuasaan politik cukup berperan dalam proses pengintegrasian daerah di luar kota Palembang, khusus mengenai daerah-daerah yang memiliki sumber alam dan daerah perkebunan.

Dengan demikian, Undang-Undang Agraria memiliki dampak bagi Keresidenan Palembang dengan terbentuknya lahan-lahan industri. Lahan ditanami tanaman ekspor sebagai keperluan industri. Tanaman tersebut adalah kopi (*koffie*), teh (*tea*), karet (*rubber*), kapas (*katoen*), dll. Adanya bahan-bahan industri (sumber alam dan hasil hutan) menjadi pendorong kemajuan ekonomi. Meskipun pada bidang kepemilikan tanah masih tetap dikontrol oleh Kolonial Belanda. Selain itu, penerapan sistem liberalisme membebaskan pengusaha asing untuk membuka lahan usaha.

C. Kebijakan Kolonial Belanda Pada Bidang Ekonomi

Dari segi ekonomi, penguasaan politik Kolonial Belanda atas daerah pedalaman (*hinterland*) baru pada awal abad ke 20. Hal tersebut merupakan penguasaan sumber daya mineral dan hasil hutanya. Sebagaimana secara historis, Belanda memerlukan waktu untuk menguasai wilayah Palembang. Dalam rangka mempertahankan kesatuan wilayah kekuasaan dan kedudukan, Belanda melakukan

¹¹⁷BPHN(Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman), *Simposium Undang-Undang Pokok Agraria dan Kedudukan Tanah-Tanah Adat Dewasa ini*(Jakarta: Bina Cipta, 1978), h. 157-158.

pembentukan sistem administrasi dan penerapan Undang-Undang Agraria sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.

Pada sub bab ini menjelaskan jenis-jenis sumber alam dan sumber hutan yang berkembang di Keresidenan Palembang diantaranya:

1. Tanaman yang dikembangkan pada perkebunan di Keresidenan Palembang pada Tahun 1829-1942

a. Perkebunan Kapas

Pada skripsi ini akan lebih dahulu menjelaskan produksi kapas di Keresidenan Palembang. Kapas merupakan produk terpenting bagi rakyat Cina pada tahun 1829. Sehingga kapas menjadi budaya perkebunan di Keresidenan Palembang.¹¹⁸ Hal tersebut karena kapas sangat digemari oleh orang-orang Cina sebab memiliki kualitas yang lebih baik, yaitu seratnya pendek dan sangat cocok untuk bahan pakaian. Namun demikian, pembersihan kapas masih dilakukan oleh tenaga manusia secara tradisional atau belum menggunakan mesin maka hasil produksi kapas Palembang belum maksimal atau warnanya tidak bersih.¹¹⁹ Adapun kapas menjadi urutan ekspor tertinggi di tahun 1839¹²⁰. Disamping produk-produk yang telah terdaftar adalah kopi, gambir, darah naga, lada, kayu, dan beras.

Pihak Keresidenan Palembang mendatangkan ahli botani J. E. Tesysman 1859. J. E. Tesysman melakukan riset terhadap penyesuaian terhadap kondisi ladang

¹¹⁸ANRI, *Brievenbook Van de Resident Palembang aan Gouverneur General 1828-1829, Bundel Palembang*, no. 43/10.

¹¹⁹Supriyanto, *Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang 1824-1864*, h. 89.

¹²⁰ANRI, *Algemeen Jaarlijksch Verlagen Van de Resident Palembang 1832-1846, Bundel Palembang*, 62. 6, No. 06.

di Palembang. Hasilnya yakni pada awalnya tanaman yang pertama ditanam pada skala besar adalah kapas berumur setahun disebut sebagai Kapas Ulu.

Selanjutnya, Pada tahun 1853 jumlah ekspor kapas mengalami peningkatan. Jika sebelum 1851, ekspor tidak melebihi 1.300 ton setahun, dari 1855 sampai 1910 ekspor meningkat hingga antara 3.000 dan 7.000 ton kapas setahun.¹²¹ Daerah yang cocok untuk ditanami kapas adalah Lematang, antara Curup dan Sungai Rotan. Setengah dari produksi kapas di Keresidenan Palembang berasal dari daerah ini. Rute pelayaran melalui Lematang dari Palembang ke Muara Enim merupakan gambaran perdagangan terpenting dari Ilir ke Ulu.¹²²



Gambar 02: Perkebunan Kapas di Keresidenan Palembang Tahun 1910
Sumber: KITLV; kode 2475

¹²¹Jeroen Peeters, *Kaum Tuo-Kaum Mudo: Perubahan Religius di Palembang 1821-1942*, h. 50.

¹²² *Ibid.*, 01

Gambar diatas menggambarkan kondisi perkebunan kapas di Keresidenan Palembang tahun 1910. Pada tahun tersebut kenaikan ekspor kapas meningkat sehingga Belanda melakukan usaha untuk meningkatkan produksi kapas dalam jumlah besar.

Dengan demikian, kapas merupakan komoditas terpenting sebagai barang ekspor. Kapas memiliki daya jual yang tinggi terutama bagi pedagang Cina. Permintaan yang tinggi terhadap kapas membuat pemerintah Keresidenan Palembang melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah produksi kapas. Sehingga permintaan ekspor terhadap kapas terpenuhi.

b. Perkebunan Kopi

Di dataran rendah budi daya kapas maju pesat, sedangkan di dataran tinggi atau tanah-tanah pegunungan ditanami kopi. Reynst menemukan kebun kopi kecil di Hulu Musi dan di Lembah Ampat Lawang. Kopi maupun kapas bukanlah produk baru. Sejak masa Kesultanan Palembang Darussalam, kopi telah ditanam, terutama di daerah Ulu Musi dan Ampat Lawang di daerah Lematang Hulu Lahat dan daerah Pagar Alam.¹²³

Pada awalnya produksi kopi belum mencapai setengah ton per tahun. Hal ini karena abad ke-19 belum ada rangsangan produksi untuk luar wilayah tersebut. Selain itu tidak adanya jalan untuk pengangkutan yang baik dari Bukit Barisan ke dataran rendah Palembang.

¹²³Dedi Irwanto M. Santun, dkk., *Iliran dan Uluan: Dinamika dan Dikotomis Sejarah Kultural Palembang*, h. 61.

Sistem distribusi yang kurang baik menjadikan kopi saat itu sebagai produk yang tertinggal. Pengaruh dari usainya pendudukan militer di pegunungan tahun 1866 mengakibatkan ada upaya untuk membuka hubungan darat antara Palembang dan Bengkulu dengan memperbaiki jalan melalui Bukit Barisan. Seorang pensiunan sersan-mayor pasukan pendudukan bernama Anslijn di Uluan Palembang, membeli kebun kopi dari masyarakat setempat lalu membuat kebun baru yang lebih besar. Selanjutnya beberapa saudagar Cina dari Bengkulu bersedia untuk pengangkutan produk tersebut. Walaupun kopi Arabica dari daerah Empat Lawang sulit didapat, namun harga kopi Arabica di Palembang memperoleh harga di atas kopi lokal dari Padang.¹²⁴

Selanjutnya perkembangan produksi Kopi Arabica terjadi di Keresidenan Palembang. Di daerah Ampang Lawang, perkebunan mengalami kemajuan hingga menjadi pusat kopi Arabica tahun 1870. Selanjutnya sekitar tahun 1880, kopi Arabica menyebar ke daerah dari Basemah Lebar dan Semendo, setelah itu Lahat dan Muara Enim menjadi pusat perdagangan kopi di Uluan. Lalu Kebun kopi dibuka juga di lembah Sindang yang tak berpenduduk. Hingga abad ke-19 penanaman kopi oleh rakyat menurun. Oleh karena, kopi Arabica pada awal abad ke-20 harganya rendah dan berpenyakit. Pada tahun 1890 masih mendapat panen 20.000 pikul setahun, sedangkan tahun 1907 hanya 189 pikul dijual oleh rakyat di pasar.¹²⁵

¹²⁴Jeroen Peeters, *Kaum Tuo-Kaum Mudo: Perubahan Religius di Palembang 1821-1942*, h. 55.

¹²⁵*Ibid.*, h. 56.

Setelah itu jenis kopi lain ditanam, yakni kopi Robusta. Penanaman disesuaikan dengan daratan tinggi mencapai 1000 meter dari permukaan laut. Kopi ini ditanam di daerah Pagaram, Semendo, Lematang Hilir Muara Enim dan Ampat Lawang. Saat itulah pengusaha Barat datang beramai-ramai untuk membuka lahan sendiri, sehingga kopi rakyat mulai ditinggalkan. Maka terjadilah penguasaan ekonomi barat akibat kopi Robusta. Akan tetapi rakyat tidak tinggal diam. Mereka membuka kebun-kebun kecil di *onderafdeeling* Muara Dua.¹²⁶



Gambar 03: Proses Pengeringan Kopi di Keresidenan Palembang Tahun 1920
Sumber: KITLV; kode 8690

Gambar tersebut menunjukkan salah satu dari proses pembuatan kopi rakyat di Keresidenan Belanda yakni proses pengeringan. Setelah kopi dipanen oleh rakyat

¹²⁶Dedi Irwanto M. Santun, dkk., *Iliran dan Uluan: Dinamika dan Dikotomis Sejarah Kultural Palembang*, h. 63-64.

Keresidenan Belanda selanjutnya kopi dikeringkan lalu dibersihkan. Proses akhir kopi dikumpulkan kepada Belanda. Kemudian kopi dijual sebagai komoditas ekspor di Keresidenan Palembang.

Dengan demikian, kopi menjadi salah satu komoditas ekspor yang dikembangkan oleh Keresidenan Belanda. Pada awalnya kopi Arabica berkembang di kebun-kebun rakyat akan tetapi setelah harga turun oleh penyakit sehingga rakyat beralih ke kopi Robusta. Akibat penanaman besar-besaran kopi Robusta maka tebukanya kebun-kebun oleh pengusaha besar. Dalam hal ini perkebunan kopi rakyat masih tetap dimasukkan walaupun skala kecil.

c. Perkebunan Karet

Karet rakyat berkembang di awal abad ke-20. Pelopornya adalah orang-orang Melayu yang sekembali dari naik haji singgah di Semenanjung Malaka dan membawa buah karet untuk ditanam di ladang-ladangnya. Ekologi karet ternyata tidak berbeda jauh dengan ekologi perladangan. Sebab itu dengan mudah rakyat dapat menanam dan memelihara karet di ladang-ladangnya dengan teknologi yang telah mereka kenal untuk perladangan. Selain itu pengolahan karet juga tidak membutuhkan mesin-mesin yang tidak mungkin dibeli oleh rakyat. Pengolahannya cukup diasapi dengan cara sederhana saja.¹²⁷

Kebijakan Kolonial Belanda terhadap perekonomian di Keresidenan Palembang melalui Undang-Undang Agraria membuat daerah perbatasan

¹²⁷R. Z. Leirissa, dkk., *Sejarah Perekonomian Indonesia*, h. 77.

Palembang¹²⁸ dan Bengkulu. Di daerah tersebut merupakan kantong-kantong perkebunan karet, baik yang dikelola oleh *onderneming* maupun petani karet itu sendiri. *Departemen van Landbow* Palembang mencatat daerah yang paling banyak ditanami karet adalah Ogan Ilir, Ogan Ulu, Komering Ilir, Komering Ulu, Lematang Ilir, dan Rawas.

Hasil-hasil perkebunan ini terutama karet, tidak diperdagangkan di dalam negeri, melainkan untuk pasaran luar negeri dengan pelabuhan Tanjung Priok sebagai pintunya. Selain itu, pemasaran karet dengan cara melalui jalur darat. Yakni jalur kereta api dari daerah Lahat sekitarnya ke Kertapati di Palembang yang diteruskan oleh rel kereta api ke Tanjung Karang, Lampung, dari sana kemudian menuju pintu utamanya, Tanjung Priok¹²⁹.

Sedangkan dalam hal distribusi, masyarakat pun sebenarnya sejak dulu menjual karet ketika harganya tinggi di pasaran. Meskipun distribusi karet sangat baik, terdapat dua masalah yang menyertainya, yakni kaum pekerja dan tanah yang belum ditanami.¹³⁰ Sebab tersebut menjelaskan bahwa tanah dan pekerja tidak boleh didatangkan dari daerah luar atau lain seperti Deli. Kebun karet di Palembang diperkirakan jumlahnya 13.402.000 hektare. Pada tahun 1920-1922 banyak pohon karet yang ditebang karena kurang menghasilkan getah karet.

¹²⁸J. Van Gelderen, *Ceramah tentang Ilmu Ekonomi Jajahan Daerah Khatulistiwa* (Bhatara Karya Aksara: Jakarta), h. 24.

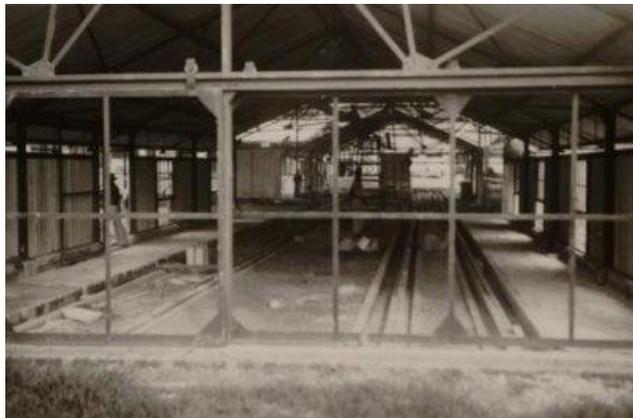
¹²⁹Dedi Irwanto, *Venesia dari Timur: Memaknai Produksi dan Reproduksi Simbolik Kota Palembang dari Kolonial Sampai Pascakolonial* (Ombak: Yogyakarta, 2011), h. 71.

¹³⁰Dedi Irwanto, *Venesia dari Timur: Memaknai Produksi dan Reproduksi Simbolik Kota Palembang dari Kolonial Sampai Pascakolonial*, h. 94.



Gambar 04: Lahan Perkebunan Karet di Muara Enim Tahun 1939
Sumber: KITLV; kode 10311

Perkebunan karet dibuka di Muara Enim seperti tertera pada gambar tahun 1939. Lahan tersebut disertai dengan industri yang mengolah karet. Terdapat rumah-rumah untuk menyimpan karet. Selanjutnya melalui kontrolir karet disetorkan kepada Kolonial Belanda.



Gambar 05 dan 06: Industri Karet di Muara Enim tahun 1939
Sumber: KITLV; kode 103137

Proses-proses pengolahan karet dilakukan oleh para petani. Petani yang memiliki kebun karet biasanya dikerjakan oleh penyadap karet dan berlaku sistem bagi hasil berdasarkan pada perjanjian sebelumnya. Pada awalnya produksi karet rakyat diharuskan membuat *sheet*, yaitu getah karet yang cair (latek) dibekukan dan kemudian dijadikan lembaran tipis yang digiling oleh mesin (mesin para). Tetapi rakyat lebih senang membuat karet berbentuk *slabs*, yaitu getah karet yang cair dibekukan dalam suatu cetakkan segi empat. Karet-karet tersebut dibeli oleh pedagang-pedagang keliling. Kemudian dibawa ke kota lalu dijual kepada pengusaha-pengusaha tertentu. Diantara pengusaha-pengusaha asing terdapat juga pengusaha pribumi yang menampung hasil perkebunan karet rakyat. Selain sebagai tempat tinggal, Rumah-rumah rakit juga berperan sebagai gudang tempat menyimpan karet sebelum dibawa ke luar negeri.¹³¹

Dari penjelasan diatas, perkebunan karet sebagai penyumbang perekonomian Keresidenan Palembang. Pada awalnya, perkebunan karet adalah kebijakan Keresidenan Belanda melalui Undang-Undang Agraria yakni daerah perbatasan (Palembang dan Bengkulu). Daerah produksi karet diantaranya Ogan Ilir, Ogan Ulu, Komering Ilir, Komering Ulu, Lematang Ilir, dan Rawas. Setelah itu, distribusi karet diangkut melalui jalur kereta api Lahat dilanjutkan ke Kertapati di Palembang (jalur darat). Selajutnya karet diekspor melalui pelabuhan Tanjung Priok (jalur laut). Sedangkan masyarakat dan Kolonial Belanda berperan pada distribusi tersebut. Pada

¹³¹Makmun Abdullah, dkk. *Kota Palembang: sebagai Kota Dagang dan Industri*, h. 102.

proses pengolahan karet dilakukan oleh para petani. Mereka membuat karet berbentuk *slabs*. Selanjutnya karet dijual ke pengusaha asing maupun daerah.

2. Perkembangan pertambangan di Keresidenan Palembang abad ke 20

Pemerintah Kolonial mulai mengembangkan bahan mentah produksi selain hasil hutan yaitu bahan tambang, di antaranya batu bara dan minyak bumi. Pertambangan batu bara Bukit Asam di Tanjung Enim (kurang lebih 220 km dari Palembang) telah memulai produksi pada tahun 1917. Dua tahun kemudian, sesudah pertambangan batu bara di Bukit Asam dibeli dari “*Lematang Maatschppij*” oleh Negara Belanda, kapasitas produksinya menyamai pertambangan Ombilin di Sumatra Barat, satu-satunya tambang batu bara utama di Sumatra. Kemudian pertambangan batu bara lain dibuka pula pada tahun 1917 di Bengkalis, Riau. Namun, Bukit Asam muncul sebagai pemasok terpenting batu bara Sumatra pada dekade-dekade yang mendahului Perang Dunia II. Tambang batu bara Bukit Asam pada 1930 mampu mendatangkan penghasilan sebesar 5 juta gulden dengan produksi sebanyak 413.762 ton per tahun.¹³²

Namun pada akhirnya segala yang dibangun oleh pemerintah kolonial hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Pemikiran pembangunan kota industri hanyalah untuk menarik minat penanaman modal asing. Pemikiran ini untuk menarik hati peminat penanaman modal asing agar betah tinggal di Palembang, untuk meluaskan *onderneming-ondernemingnya* di daerah uluan Palembang, karena di sana banyak

¹³²Dedi Irwanto M. Santun, dkk., *Ilihan dan Uluan: Dinamika dan Dikotomis Sejarah Kultural Palembang*, h. 139.

barang-barang hasil bumi. Kalau dilihat sebelah dalam, bisa ditemui berapa banyak tambang-tambang batu bara seperti di Muara Enim dan sebagainya. Masuk sedikit lagi dapat dilihat tambang minyak di Plaju dan *onderneming-onderneming* dari para kapitalis asing. Ketika ditemukan sumber-sumber minyak maka didirikanlah *Shell Oil Company* pada tahun 1907 yang memiliki industri penyulingan minyak di Plaju dengan nama *Bataafsche Petroleum Maatschappij* (BPM).¹³³

Beberapa tahun kemudian Kolonial Belanda mengizinkan maskapai minyak Amerika bernama *Secony Oil Company*, untuk mendirikan pabrik di Sungai Gerong dengan nama *Nederlandsche Koloniale Petroleum Maaatschappy* (NKPM). Selanjutnya *De Bataafsche Petroleum Mij* merupakan anak dari induk *Shell Company*, modal usahanya berdasarkan kerja sama antara Belanda dan Inggris. Dilihat dari kondisi perdagangan yang paling besar sahamnya adalah Amerika. Sehingga NKPM berubah menjadi *Standaard Vacuum Oil Company* (STANVAC). Minyak yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut tercatat hingga tahun 1929 lebih kurang 955. 082. 000 liter.¹³⁴

Sedangkan perusahaan-perusahaan minyak lain dibuka oleh “*Royal Duitse Compagnie for exploiting petroleum wells in the Neterlands Indies*” mulai 1890. *Fabrik Snijverheid* yang ada di Plaju, Bagus Kuning, dan Sungai Gerong mampu

¹³³Makmun Abdullah, dkk. *Kota Palembang: sebagai Kota Dagang dan Industri*, h. 98-99.

¹³⁴*Ibid.*, 01.

memproduksi minyak 1.137.386 ton per tahun dengan keuntungan sebesar 65 juta gulden.¹³⁵

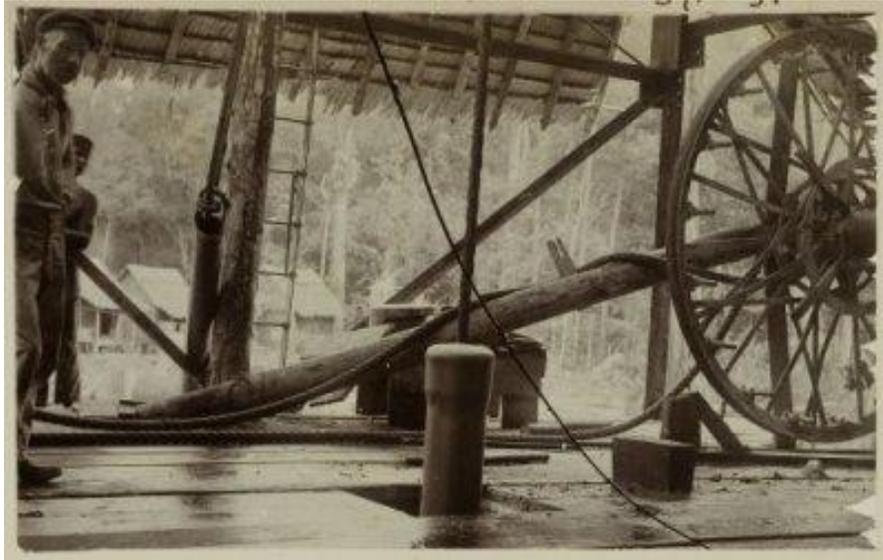


Gambar 07



Gambar 08

¹³⁵Dedi Irwanto, *Venesia dari Timur: Memaknai Produksi dan Reproduksi Simbolik Kota Palembang dari Kolonial Sampai Pascakolonial*, h. 73. Dedi Irwanto M. Santun, dkk., *Iliran dan Uluan: Dinamika dan Dikotomis Sejarah Kultural Palembang*, h. 139.



Gambar 9

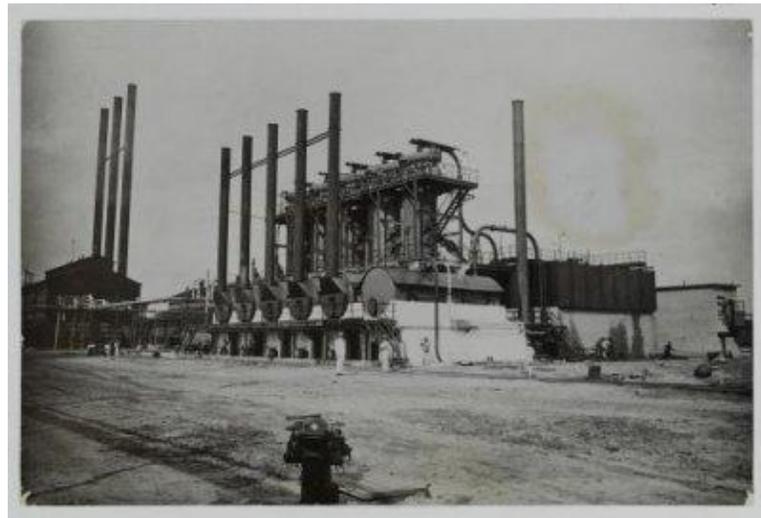
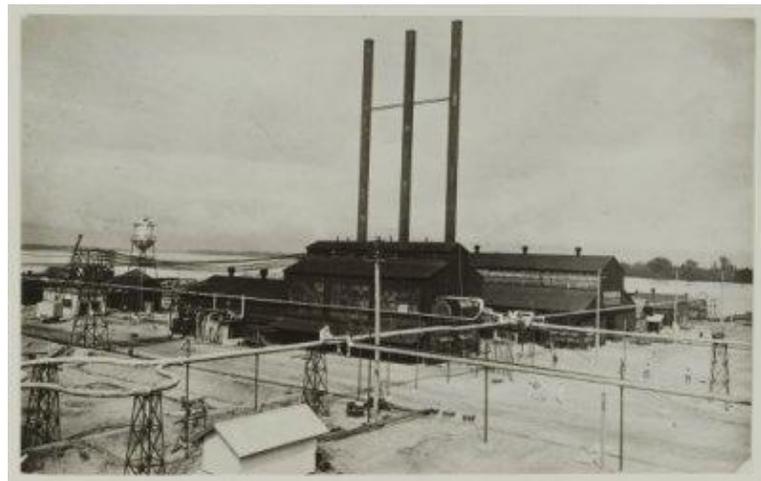
Gambar 07, 08 dan 09: Tambang Minyak di Palembang tahun 1897

Sumber: KITLV; kode 37091

Gambar diatas adalah Kilang atau tambang minyak di Palembang. Dari masing-masing gambar tampak proses-proses dalam pengolahan minyak. Pada gambar 06 merupakan daerah Palembang yang dahulunya hutan dibakar habis untuk membangun kilang minyak. Kemudian pada gambar 07 menunjukkan bahwa minyak bumi diambil dari dalam tanah dengan cara dipompa melalui mesin pompa manual hingga minyak buminya berhasil keluar. Sedangkan pada gambar terakhir terdapat seorang kontrolir dan seorang pribumi sedang melakukan proses pengambilan minyak bumi. Dari proses-proses tersebut menandakan bahwa berjalanya tambang minyak diawasi oleh seorang kontroler Belanda.

Selain di Palembang terdapt tambang minyak lainnya yakni di Muara Enim (1899), Suban Jeriji (1906), Limau (1915), Ladang Pait (1905), dan Sumpal (1912).

Semua tambang tersebut dibawah oleh BPM. Kemudian minyak mentah yang dihasilkan dari sumber-sumber tersebut dialirkan ke Plaju atau Sungai Gerong untuk diolah, lalu dikirimkan ke luar negeri yang dibawa kapal-kapal tangki melalui pelabuhan kota yang terletak di 2 Ilir Palembang.¹³⁶ Hal tersebut menggambarkan bahwa kota Palembang merupakan pusat industri dan pemerintahan.



Gambar 10: Kilang Minyak di Sungai Gerong Tahun 1925
Sumber: KITLV; kode 2797

¹³⁶Makmun Abdullah, dkk. *Kota Palembang: sebagai Kota Dagang dan Industri*, h. 43.

Dari gambar tersebut tampak bangunan Kilang Minyak milik perusahaan swasta berdiri di sekitar sungai Musi. Kilang tersebut menyuplai kebutuhan minyak bumi berbagai Negara pada saat itu. Hingga sekarang kilang masih tetap berdiri telah dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara Pertamina.

3. Kondisi Perkebunan Rakyat tahun 1830-1942

Perkebunan swasta adalah perkebunan yang dimiliki oleh pengusaha Barat. Perkebunan tersebut ditanami komoditas perdagangan yang laris di pasar dunia, di antaranya karet, kopi, kapas disusul kelapa sawit. Sebenarnya komoditas tersebut telah ditanam sejak masa Kesultanan Palembang Darussalam lalu diteliti oleh pengusaha Barat. Selanjutnya mereka membuka kebun-kebun kecil hingga menjadi industri besar. Sistem distribusi, kepemilikan lahan, dan pekerja merupakan unsur paling penting dalam memajukan industri. Sistem pencatatan ekonomi yang baik mendorong Palembang menjadi kota perekonomian besar di Sumatra.

Penduduk Palembang menghidupi diri dan keluarganya terutama dengan bercocok tanam (bertani dan berkebun), misalnya dengan menanam padi lebak, menyadap karet, dan sebagainya. Di antara mereka juga mengadakan kegiatan berdagang dari kota ke kota dengan lalu lintas sungai. Berbagai aspek kehidupan sungai banyak dilihat di Sungai Musi dan anak-anak sungainya yang bermuara di Palembang, mulai dari aktivitas perahu tambang yang mengangkut orang atau barang dari kedua sisi sungai tengah kota, kapal api menuju ambang luar sungai membawa hasil produksi pedalaman untuk diekspor. Di sisi lain Sungai Musi, tampak sederetan

perahu *kajang* dari pedalaman yang sedang beristirahat dari perjalanan panjangnya menyusuri sungai untuk berniaga. Perahu kajang ini bentuknya seperti perahu biasa, tetapi mempunyai atap daun rumbia atau anyaman bambu yang rendah. Tapi ini hampir menutup sebagian besar perahu.



Gambar 11: Rakit Mengangkut Suplai Produk Industri di Boom Baru, Palembang Tahun 1935
Sumber: KITLV; kode 12699

Seperti gambar diatas merupakan penduduk pribumi yang mengangkut suplai kebutuhan industri. Dari gambar di atas perahu terlihat mereka menunggu kontrolir yang siap menghitung barang angkutan dari rakit mereka. Setelah itu, barang diangkut ke darat lalu disetorkan ke pabrik untuk dikelola.

Dalam hal denyut perekonomian bercocok tanam, lahan perkebunan rakyat banyak ditanami komoditas kecil seperti duku, durian, kina, padi lebak, menyan, kelapa, dst. Rakyat juga membuka kebun-kebun kecil di sekitar perkebunan milik swasta. Akan tetapi produksinya tidak sebanyak milik swasta. Sehingga dapat terjadi

dua sistem perekonomian, yakni sistem feodal dan tradisional yang berdampingan serta merkantilisme menyertai aktivitas perekonomian tersebut.

Perekonomian selalu berkait dengan persoalan kependudukan. Ditinjau dari kependudukan, penduduk iliran yang sering merujuk ke ibu kota Palembang sebelumnya merupakan kelompok masyarakat yang dilahirkan dengan bakat dagang, mengingat letak geografis atau keterbatasan lingkungan alam dan struktur kekuasaan yang diberlakukan pihak kesultanan. Mereka tidak bisa lepas dari tanah sebagai modal untuk mata pencaharian masing-masing. Akan tetapi, hasil yang mereka dapatkan biasa dibawa menghilir ke ibu kota Palembang untuk diperdagangkan di sana, atau dibeli oleh para pedagang perantara yang mendatangi langsung kawasan iliran, setelah dikurangi beban pajak baik pada masa kesultanan maupun ketika pemerintahan kolonial Belanda mulai bercokol. Tidak seperti penduduk dataran tinggi yang tidak mudah untuk menghilir ke ibu kota, berdagang adalah sesuatu yang masuk akal bagi penduduk iliran mengingat keadaan mereka seperti itu. Apalagi, kawasan iliran sering terkena banjir dari air sungai yang pasang, sehingga hasil pertanian mereka tidak pernah berkembang leluasa.¹³⁷

Berbeda halnya dengan penduduk iliran, penduduk uluan sejak masa kesultanan telah dikenal sebagai peladang-peladang yang sering membuka lahan-lahan baru di hutan-hutan dataran tinggi di sana. Dengan sistem perladangan itu, ikatan geneologis memegang peran penting dalam usaha membuka lahan tersebut. Dalam pengamatan Peeters, sistem *kejuraian* dapat bertahan lama di tengah penduduk

¹³⁷Mestika Zed, *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950*, h. 36.

uluan karena tiga faktor. Pertama, sistem ladang berpindah menuntut anggota keluarga atau kerabat untuk turut serta membuka, menyiapkan, dan mengolah lahan. Dalam proses ini, yang memimpin adalah *jurai tuo*. Kedua, karena lahan-lahan baru biasa dicari pada hutan-hutan yang terletak jauh dari pemukiman mereka (sekitar radius 10 sampai 30 km dari dusun inti), maka keadaan itu membuat sesama anggota kerabat mempertahankan kebersamaan guna memudahkan usaha yang berat itu. Ketiga, keadaan hutan yang sunyi dan belum tentu aman menuntut para anggota kerabat untuk saling melindungi satu sama lain.¹³⁸ Oleh karena itu, ikatan erat yang dibangun antara anggota laki-laki dalam sebuah *kejuraian* dimaksudkan untuk melindungi anggota kerabat terhadap serangan-serangan yang datang dari luar.

Sedangkan pola perdagangan rakyat yang bebas kemudian diintervensi. Pengusaha kapitalis Belanda, saudagar Cina, dan para penguasa di pemerintahan itulah pelaku monopoli perdagangan dan industri tersebut. Sampai akhirnya industri rakyat Palembang mengalami kehancuran. Setelah mengalami kehancuran, perekonomian Palembang terbagi tiga warna, yaitu ekonomi kapitalis yang dikuasai pemerintah dan pemodal Belanda, sektor ekonomi rakyat yang berkuat pada kegiatan primer dan tradisional, serta aktivitas merkantilistik dalam bentuk perdagangan perantara yang dikaplingkan Belanda untuk orang-orang keturunan Cina. Selain menguasai industri manufaktur, Belanda bersama-sama orang Cina, menguasai mata

¹³⁸Jeroen Peeters, *Kaum Tuo-Kaum Mudo: Perubahan Religius di Palembang 1821-1942*, h. 48.

rantai perdagangan hasil-hasil industri dan perkebunan, terutama karet dan pertambangan.¹³⁹

Dengan demikian, perkebunan rakyat berkembang di Keresidenan Palembang di samping perkebunan swasta. Akan tetapi, perkebunan rakyat untuk kebutuhan sendiri dan keluarganya terutama dengan bercocok tanam (bertani dan berkebun). Dari segi lahan, perkebunan rakyat banyak ditanami komoditas kecil seperti duku, durian, kina, padi lebak, menyan, kelapa, dst. Penanaman tanaman tersebut di samping perkebunan swasta. Para perangkat daerah sangat berperan dalam pengembangan atas lahan perkebunan rakyat.

¹³⁹Jousari Hasbullah, *Mamang dan Belanda: Goresan-Goresan Wajah SumSel Zaman Kolonial dan Refleksinya pada Hari Ini*, h. 79.

BAB IV

DAMPAK PEREKONOMIAN KOLONIAL BELANDA DI KERESIDENAN PALEMBANG

Perkembangan ekonomi suatu wilayah dapat mempengaruhi beberapa aspek kehidupan. Aspek-aspek tersebut diantaranya pembangunan, sosial keagamaan serta dampak perekonomian pada bidang politik. Aspek pembangunan disertai oleh kebutuhan produksi dan distribusi terhadap permintaan barang dagang. Semakin tinggi permintaan barang maka produksi dan distribusi harus dilakukan semaksimal mungkin. Sedangkan aspek perubahan sosial, serta dampak keagamaan dapat ditimbulkan melalui pendapatan ekonomi. Sedangkan perekonomian yang mempengaruhi aspek politik terdapat pola-pola administratif dan pembagian lahan mengakibatkan perubahan kedudukan masyarakat pada tatanan pemerintahan. Adapun pada bab ini menjelaskan dampak yang dihasilkan oleh perekonomian Kolonial Belanda di Keresidenan Palembang antara lain:

A. Dampak Pembangunan Kolonial Belanda pada Bidang Ekonomi

Secara definisi, pembangunan merupakan upaya untuk mengubah sesuatu keadaan menjadi sesuatu keadaan yang direncanakan.¹⁴⁰ Dengan kata lain, perubahan yang diinginkan atau direncanakan. Perubahan yang diinginkan dan yang direncanakan tersebut sering pula disebut sebagai tujuan pembangunan.

¹⁴⁰Afrizal, *Menganalisis Dampak Sosial Pembangunan*, artikel diakses pada 15 Desember 2015 melalui <http://repository.unand.ac.id/2225/>.

Tujuan pembangunan pada dasarnya dianggap baik, pantas dan atau seharusnya ada, menurut penyelenggara pembangunan. Tujuan pembangunan yakni positif dari sudut pandang penyelenggaranya. Akan tetapi, dari sudut pandang orang lain, pembangunan tersebut tidak selalu berbuah hal-hal yang positif bagi mereka. Hal ini berarti, pembangunan dapat menimbulkan konsekuensi negatif bagi suatu komunitas atau bagi suatu segmen dari komunitas.¹⁴¹

Dampak dari pembangunan di Keresidenan Palembang berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi. Hal itu meliputi: pertama, tata Kota Palembang yang disebut sebagai *Gemeente*. Kedua, terjadi pembaharuan terhadap sarana dan prasarana Kota Palembang sebagai akibat dari perkembangan industri. Ketiga, pusat-pusat perekonomian terbentuk melalui pasar-pasar. Ketiga hal tersebut membawa kemajuan bagi kegiatan perekonomian yang terletak di pusat Keresidenan Palembang.

1. Kota Palembang sebagai *Gemeente*

Ideologi fisik Kota Palembang pada masa kolonial adalah artikulasi antara tradisi dan identitas kota dagang tradisional, walaupun sebenarnya ia sudah dalam jaringan yang bersifat Internasional di satu pihak. Dengan perbandingan pembangunan kota dagang modernitas pada sisi lain. Artinya, dalam konstruksi ideologi kolonial, mereka sadar bahwa kota ini adalah kota dagang, namun yang perlu

¹⁴¹Ibid., 01.

diubah adalah wajah dari tradisional menjadi modernisasi baik secara fisik maupun jiwa warga kotanya.¹⁴²

Untuk itu, Pembangunan tradisional ke modern dimulai ketika pembangunan bangunan-bangunan baru kolonial yang berbeda dengan bangunan-bangunan lama Kesultanan Palembang Darussalam. Pembangunan tradisional dilakukan disekitar pinggir-pinggir sungai atau pantai. Didasari, pada perkembangan teknologi tradisional dan perdagangan. Sedangkan pembangunan modern diperuntukkan untuk industri yang berdasarkan perkembangan teknologi.

Dalam bangunan-bangunan kolonial terdapat konstruksi ideologi kota Palembang sebagai kota modern, lebih tepatnya kota dagang modern. Usaha pemerintah Kolonial Belanda di Palembang, dalam menciptakan simbol publik pertama dapat dilihat ketika mereka mencoba membangun bangunan-bangunan fisik yang seolah-olah sebagai sebuah usaha untuk mengalihkan pengaruh kekuasaan dari Kesultanan Palembang Darussalam.

Pada awal abad ke-20 bangunan politik yang mengelilingi pusat kekuasaan pribumi yakni keraton Kuto Besak. Pada saat itu juga adanya pembangunan *gemeente* menjadikan konstruksi fisik kota Palembang lebih teratur. Secara umum, kota dibagi menjadi empat bagian, *pertama* zona perniagaan, yang memanjang sepanjang aliran sungai bagian ilir, *kedua* zona industri, memanjang sepanjang aliran Sungai Musi

¹⁴²Dedi Irwanto M. Santun, *Venesia dari Timur: Memaknai Produksi dan Reproduksi Simbolik Kota Palembang dari Kolonial Sampai Pasca Kolonial*, h. 55.

pada bagian ulu, *ketiga* zona perkantoran, yang berada di pusat kota, *keempat* zona pemukiman, yang terletak di bagian Barat pusat kota.¹⁴³

Pada tahun 1906, Kota Palembang ditetapkan sebagai *Gemeente*.¹⁴⁴ Pada tahun 1915 luas wilayah kota diperkirakan 137 km². Oleh karena proses pemekaran kota dari tahun ke tahun sebagai akibat ledakan penduduk dan urbanisasi, pada tahun 1930, luas Kota Palembang sudah mencapai 264 Km². Sejak menjadi *Gemeente*, pembangunan Kota Palembang menjadi lebih terencana. Berbagai sarana dan prasarana kota mulai dibangun dengan menggunakan dana yang berasal dari pajak penduduk.

2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perekonomian Kota Palembang

Agar perekonomian terlaksana dengan baik maka Keresidenan Palembang membangun sarana-prasarana. Diantaranya jalur transportasi yang dipergunakan untuk perdagangan dari sungai sungai maupun darat. Perubahan besar secara mendasar dilakukan oleh Kolonial Belanda dalam membangun kota ini adalah merubah secara perlahan dari kota air ke kota daratan yang dialihkan ke jalan-jalan. Transportasi perahu untuk menuju pusat kota berganti dengan kendaraan darat.

Dimulai tahun 1907, angkutan kota dengan kereta kuda mulai diperkenalkan. Kereta kuda ini oleh penduduk lokal disebut dengan Sado. Ketika terjadi peledakaan

¹⁴³Ibid., h. 56-57.

¹⁴⁴Bambang Budi Utoyo, dkk., *Kota Palembang: Dari Wanua-Sriwijaya Menuju Palembang Modern*, h. 245.

permintaan akan karet di Palembang, jumlah kendaraan roda empat meningkat tajam. di jalan-jalan kota mulai terlihat mobil-mobil Jeep, sedan VW, otolet, mobil Wills dan bus kota.¹⁴⁵

Kota Palembang pada saat itu mempunyai sumber minyak di beberapa daerah dengan pusat penyulingan minyak di Sungai Gerong dan Plaju. Sejalan dengan perdagangan untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya di samping itu memperlancar pengangkutan pos pengiriman petugas-petugas pemerintah, maka mulailah dibuka jalan-jalan mobil di daerah ini. Pada tahun 1913 jaringan jalan-darat telah dibuat sepanjang 1074 kilometer. Demikian pula sejak tahun 1912 telah dimulai pembuatan jalan kereta-api yang menghubungkan Kota Palembang-Teluk Betung dengan jalur simpang dari Prabumulih ke Muara Enim sepanjang 152 kilometer, di mana terminal pusatnya berda di Kampung Kertapati.¹⁴⁶

Selain pada bidang transportasi, Pemerintah Hindia Belanda mendirikan beberapa badan dagang Eropa dan agen-agennya yang berasal dari *Nederlandsche Handels Maatschappij* dan *De Javansche Bank*. Untuk meningkatkan perekonomian baik pedagang asing maupun pedagang pribumi. Di tempat tersebut dilakukan pencatatan perdagangan secara rinci hingga didapatnya perbandingan untuk memajukan perekonomian di Keresidenan Palembang.

¹⁴⁵Dedi Irwanto M. Santun, *Venesia dari Timur: Memaknai Produksi dan Reproduksi Simbolik Kota Palembang dari Kolonial Sampai Pasca Kolonial*, h. 49.

¹⁴⁶Makmum Abdullah (ed.), *Kota Palembang sebagai Kota Dagang dan Industri*, h.42.

Dengan demikian, pembangunan dilakukan oleh Kolonial Belanda berdasarkan ekonomi modern. Dimana kota Palembang sebagai kota industri. Walaupun pemerintahan bersifat sentralisasi (pemerintahan yang terpusat) akan tetapi pemerintah bertanggung jawab terhadap sarana-prasarana untuk menunjang perekonomian. Diantaranya pada bidang transportasi darat dibuat jalan untuk sado (kereta kuda), mobil, dan kereta api. Pembangunan sarana-prasarana sebagai penunjang pembangunan ekonomi di Keresidenan Palembang.

3. Pusat-Pusat Perekonomian Kota Palembang Masa Kolonial Belanda

Sejak zaman Sriwijaya pada muara anak Sungai Musi yang merupakan titik pertemuan antara pelayaran laut dan sungai memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi dan penyebaran agama Islam. Tempat tersebut menjadi Bandar Dagang yang dibangun menggunakan rakit-rakit. Sehingga terjadi tempat jual beli barang yang disebut pasar.¹⁴⁷

Dari sisi lokasi, pasar terdapat dua lokasi yaitu pedalaman dan kota. Pada pasar pedalaman terdapat pada setiap kota pedalaman (*Onderafdeling* Ulu dan Ilir). Pasar pedalaman diperjual belikan barang dagangnya adalah beras, sayur, buah-buahan dan kacang-kacangan. Dari segi fisik pasar pedalaman biasanya hanya suatu tempat terbuka yang terdiri beberapa bangunan yang tidak permanen. Barang-barang

¹⁴⁷Ibid., 01

hasil pedalaman diangkut melalui sungai. Kemudian barang-barang dagangan tersebut dibawa dengan perahu ke pedalaman maupun ke kota. Sedangkan pasar-pasar di Kota Palembang memiliki bangunan yang permanen dan beratap. Barang-barang dagang berasal dari pedalaman diangkut melalui sungai lalu dijual di atas perahu-perahu.

Kondisi demikian telah membuktikan bahwa antara pasar pedalaman dengan pasar kota terdapat hubungan yang erat. Pasar menjadi tempat yang efektif bagi kelompok sosial yang melakukan interaksi untuk saling memenuhi kebutuhan. Pasar di atas permukaan air laut maupun sungai juga terdapat di Kepulauan Indonesia, salah satunya adalah kota Palembang.



Gambar 12: Pasar Ikan di Palembang tahun 1900an,
Sumber: KITLV; kode 37122

Gambar diatas salah satu contoh pasar yang terletak di kota. Kondisi perdagangan di pasar ikan pada masa Keresidenan Palembang pada tahun 1900. Struktur bangunan lebih tertutup dan permanen. Pada gambar tersebut menunjukkan aktivitas lebih terlihat pada masyarakat pribumi. Masyarakat pribumi memenuhi kebutuhan pokoknya dengan membeli maupun menjual ikan. Kekayaan sungai-sungai menunjukkan hasil ikan yang berlimpah saat itu.

Pada tahun 1932 di Kota Palembang terdapat dua pasar besar yakni: Pasar 16 Ilir dan Pasar Sekanak yang terletak di kampung 28 Hilir. Di samping itu terdapat pasar-pasar yang relatif kecil yaitu: Pasar 10 Ilir (Pasar Kuto), Pasar 10 Ulu dan Pasar Kertapati. Dengan adanya pasar-pasar yang terletak di pinggir sungai atau di muara anak sungai, menyebabkan lalu lintas perahu dagang di perairan Sungai Musi semakin ramai.¹⁴⁸ Di antara pasar-pasar tersebut, Pasar 16 Ilir memiliki los-los dan bertingkat dua. Ia tidak hanya sebagai tempat kegiatan perdagangan jual beli barang sandang-pangan, tetapi juga sebagai tempat penampungan barang dagangan yang berasal dari daerah Uluan dan barang-barang impor dari luar. Dengan kata lain pasar-pasar itu merupakan tempat pertemuan antar pedagang-pedagang yang melalui jalur-sungai, baik yang berasal dari daerah pedalaman maupun yang tinggal menetap di dalam kota. Orang-orang asing yang dianggap sebagai pedagang perantara diantara penduduk pribumi, membeli barang dagang tersebut secara tidak langsung, dan

¹⁴⁸Makmum Abdullah (ed.), *Kota Palembang sebagai Kota Dagang dan Industri*, h. 94.

kemudian barang-barang itu diangkut dengan perahu jakung ke daerah hilir Sungai Musi¹⁴⁹ bahkan ada yang diangkut sampai ke Singapura.

Ketika menjelang keruntuhan pemerintah Hindia Belanda muncul beberapa pasar baru yakni: Pasar Lingkis yang kemudian dikenal sebagai Pasar Cinde yang terletak di Muara Lorong Kapten, Pasar Ladang Plaju yang terletak di depan masuk-keluar Plaju, Pasar Lemabang di 2 Ilir dan Pasar Kilometer Lima di perbatasan kota dengan daerah Muba. Pasar-pasar itu dibuka pada siang hari saja dan ditutup pada sore harinya. Pasar-pasar tersebut menjual kebutuhan-kebutuhan penduduk seperti: hasil kebun, barang sandang, ikan laut, beras, daging, buah-buahan, sayur-mayur, dan sebagainya.¹⁵⁰

Dengan demikian, pada masa Keresidenan Belanda memberikan dampak terhadap pembangunan transportasi serta sarana-prasarana. Dalam pembangunan transportasi abad ke-20 membawa perubahan besar yakni dari jalur air ke jalur darat. Hal itu bertujuan untuk distribusi barang-barang industri di Palembang. Sedangkan pasar sebagai pusat-pusat perekonomian berguna untuk memenuhi kebutuhan rakyat Keresidenan Palembang. Dari pembangunan tersebut membawa pengaruh atas kemajuan ekonomi Keresidenan Palembang.

¹⁴⁹J. L. Sevenhoven, *Lukisan Tentang Ibu Kota Palembang*, h. 17.

¹⁵⁰Makmum Abdullah (ed.), *Kota Palembang sebagai Kota Dagang dan Industri*, h.95-96.

B. Dampak Perekonomian Kota Palembang pada Bidang Sosial-Keagamaan

Perekonomian mempengaruhi segala bidang kehidupan. Diantaranya terjadi perubahan sosial akibat dari modernisasi. Selanjutnya dalam bidang agama banyak terdapat orang berangkat haji dan bersekolah di Tanah Arab akibat dari penjualan karet dengan harga tinggi. Dampak lainnya penurunan dan kebutuhan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Mereka mengikuti pendidikan agar menjadi pegawai pemerintahan Kolonial Belanda. Pada sub bab ini akan dijelaskan dampak dari perubahan sosial keagamaan.

1. Perubahan Sosial di Keresidenan Palembang

Kehadiran Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mengubah struktur sosial di Palembang. Diantaranya, pengaruh para bangsawan merosot setelah mereka kehilangan hak-hak istimewa atas tanah pertanian, perniagaan, dan cukai. Sebagian besar mereka jatuh miskin, uang tunjangan yang diberikan pemerintah kolonial sebagai kompensasi atas penghapusan hak-hak istimewa sama sekali tidak memadai.

Di Palembang muncul kelas menengah baru, yakni para saudagar Arab dan Tionghoa pada masa Kolonial Belanda. Mereka menggantikan posisi para priayi. Seperti yang telah digambarkan, pada saat runtuhnya Kesultanan Palembang Darussalam membuat saudagar Arab dan Cina lebih leluasa memilih tempat tinggal. Rumah-rumah mereka tersebar di banyak kampung dengan bentuk bangunan permanen dan dibuat dengan kayu-kayu nomor satu. Beberapa dari mereka

membangun rumah tembok, hal yang ditabukan di zaman Kesultanan Palembang. Penduduk pribumi yang sukses secara ekonomi juga ikut mendobrak adat lama itu dengan membangun rumah-rumah yang mentereng.¹⁵¹

Golongan yang termasuk kelompok dagang terdiri atas penduduk pribumi dan orang asing: orang Arab, orang India dan orang Cina. Orang-orang asing yang dimaksudkan itu mendapat perlakuan yang sama dengan penduduk lainnya, bahkan ada di antara orang-orang Cina yang memeluk agama Islam diberi gelar Demang dan orang-orang Arab diberi gelar Pangeran oleh Sultan. Kedudukan orang Cina masa pemerintahan Kolonial, agak lebih baik dari pada orang asing lainnya, karena mereka dijadikan golongan perantara antara penguasa dan penduduk dalam dunia perdagangan, terutama perdagangan kopi, lada dan karet. Keadaan sosial adanya gejala memusuhi oleh penduduk pribumi yang menjerumus pada konflik rasial. Ada orang Cina yang kaya dan Orang Cina yang melarat. Orang Cina melarat tinggal di tempat-tempat lembab dan penghab secara kuantitas jauh lebih besar.¹⁵² Dengan demikian, gambaran mengenai stratifikasi sosial sangat terlihat pada masa Keresidenan Palembang.

Dampak terhadap urbanisasi disebabkan oleh kilang minyak di Plaju dan Sungai Gerong. Kedua lokasi tersebut sangat penting. Karena para pekerja dari kedua kilang itu tidak memperoleh tempat tinggal. Maka daerah Ladang Plaju dan Sungai

¹⁵¹Ibid., h. 86-87.

¹⁵²Ibid., 01.

Buah menjadi suatu perkampungan buruh minyak. Pada awal Revolusi Fisik lokasi tersebut didiami oleh 22. 000 jiwa dan di antaranya 80% terdiri dari buruh minyak. Penduduk yang bertempat tinggal di daerah itu umumnya berasal dari suku Komerling, yang sengaja menetap di sana menjadi buruh ataupun pedagang. Sebab daerah mereka kurang memungkinkan untuk bertani atau bercocok tanam. Sebagian besar tanah mereka ditanami oleh buah tahunan sesuai dengan kondisi tanah di daerah tersebut. Suku Komerling merupakan suku termaju di daerah ini dan secara merata memperoleh kesempatan untuk memasuki pendidikan formal yang disediakan dan diselenggarakan oleh perusahaan asing.¹⁵³

Selain itu, perusahaan-perusahaan baru yang didirikan di Hindia Belanda pada masa liberal mengalami perkembangan sehingga perusahaan ini lebih banyak membutuhkan personil yang didatangkan dari luar negeri sebagai tenaga ahli. Oleh karena itu, jumlah masyarakat Eropa di Hindia Belanda makin besar sehingga mereka menuntut kenyamanan seperti negeri asal, seperti kondisi yang lebih baik bagi sekolah-sekolah, perumahan dan pelayanan kesehatan. Keadaan ini menjadikan munculnya pemukiman-pemukiman khusus bagi orang-orang Hindia Belanda.

Selanjutnya dampak peledakkan harga karet membawa pengaruh besar dengan munculnya orang kaya baru di Kerseidenan Palembang. Hampir di setiap dusun pada daerah uluan tersebut memiliki empat atau lima mobil, sehingga apabila di akhir pekan berpuluh-puluh mobil ilir mudik, orang yang berpergian atau

¹⁵³Ibid., h. 99-100.

menikmati hasil karetnya.¹⁵⁴ Kondisi tersebut sudut pandang dari orang Uluan yang bersifat konsumtif dengan menghambur-hamburkan uang di depan mata orang Iliran yang dipersepsikan untuk lebih maju.

Dampak lainnya, munculnya kaum miskin di pedesaan. Faktor pendorongnya adalah berkurangnya lahan pertanian. Kemiskinan di pedesaan pada abad ke-19 mengakibatkan munculnya berbagai pemberontakan petani yang dipimpin oleh elit agama, seperti kiai, guru ilmu atau orang suci yang umumnya tokoh berkharisma.

Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa dampak kondisi sosial tidak terlepas dari kemajuan ekonomi di Keresidenan Palembang. Diantaranya berkurangnya stratifikasi terhadap pengusaha asing (Arab dan Cina) ditandai dengan rumah-rumah mereka telah tinggal di darat. Pada masyarakat timbul konflik rasial antara pribumi dan masyarakat asing. Selanjutnya, perusahaan-perusahaan Belanda yang membutuhkan pekerja. Akibatnya rakyat pribumi maupun Eropa melakukan urbanisasi dan mendirikan pemukiman-pemukiman yang letaknya di pusat kota. Dampak kemajuan tersebut membuat kesenjangan sosial pada masyarakat pedesaan. Akibatnya mereka melakukan pemberontakan.

¹⁵⁴Dedi Irwanto M. Santun, *Venesia dari Timur: Memaknai Produksi dan Reproduksi Simbolik Kota Palembang dari Kolonial Sampai Pasca Kolonial*, h. 96.

2. Dampak Ekonomi Terhadap Ibadah Haji di Keresidenan Belanda

Pengaruh ekonomi melalui perkembangan keagamaan yakni fenomena naik haji.



Gambar 13: Pemberangkatan Haji dari Palembang ke Mekah Tahun 1890
Sumber: KITLV; kode 90572

Hal tersebut dapat ditinjau pada tahun pertama dan kedua abad ke-20 rata-rata setiap tahunnya 1.400 jemaah haji berangkat dari Keresidenan Palembang. Seperti gambar diatas, beberapa rakyat akan melaksanakan ibadah haji ke Mekah pada tahun 1890.

Lalu pada tahun 1920, ibadah haji sebagai periode puncak. Pada periode itu juga merupakan puncak perdagangan karet. Selanjutnya, pada tahun 1927 mencapai 7.000 haji. Sebaliknya pada awal tahun 1930, jumlah calon haji mengalami penurunan di Keresidenan Palembang yakni kurang dari 500 orang saja.

Para jemaah haji juga memiliki minat untuk pendidikan di tanah Arab tersebut. Mereka melakukannya untuk memperdalam ilmu agama. Sehingga pemikiran terjadi perkembangan perbedaan terhadap pandangan Islam. Selain itu, sebagai faktor

pendorong minat ke Mekah adalah meningkatnya harga karet di pasar dunia sekitar tahun 1920-an. Sedangkan perkembangan ekonomi yang kurang menguntungkan sesudah tahun 1929, memiliki dampak negatif bagi mahasiswa Palembang di Mekah. Ekonomi yang menyusut membuat minat belajar di tanah suci semakin kecil. Mahasiswa terpaksa menghentikan studinya lalu pulang ke kampung halaman. Banyaknya mahasiswa yang pulang ke Palembang dan membawa paham masing-masing menjadikan Kaum Islam terdiri dari Kaum Tuo dan Kaum Mudo.¹⁵⁵

Atas dasar penjelasan diatas, perkembangan agama Islam di Keresidenan Palembang ditandai dengan fenomena naik haji dan minat untuk menjadi Mahasiswa di Mekah. Faktor pendorong kedua hal tersebut semakin meningkatnya kesejahteraan rakyat pribumi terhadap harga karet yang tinggi. Sehingga mereka menetap untuk menjadi Mahasiswa di Mekah.

3. Pengaruh Perekonomian Kolonial Belanda pada bidang Pendidikan

Kondisi pendidikan pada abad ke-20 di Keresidenan Palembang mengikuti pendidikan modern dengan sistem Barat. Sistem pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial untuk kebutuhan akan unsur-unsur dari lapisan atas dan tenaga terdidik yang bermutu bagi keperluan industri dan ekonomi. Di lain pihak dapat terpenuhi akan kebutuhan tenaga kerja rendah dan menengah yang berpendidikan.¹⁵⁶

¹⁵⁵Jeroen Peeters, *Kaum Tuo-Kaum Mudo: Perubahan Religius di Palembang 1821-1942*, h. 150-157.

¹⁵⁶*Ibid.*, h. 103.

Dengan alasan tersebutlah rakyat lebih tertuju pada sekolah-sekolah Belanda ketimbang lembaga pendidikan Islam yang sudah ada sebelumnya dan belum banyak melakukan pembaharuan.

Atas dasar tersebut, Keresidenan Belanda mendirikan berbagai sekolah partikelir (sekolah pemerintah). Sekolah partikelir mencotok sistem pendidikan Belanda. Di Keresidenan Palembang tercatat tiga buah sekolah partikelir yakni: ELS (*Europeesche Lagere Schoolen*), tiga buah HIS (*Hollandsch-Inlandsche Schoolen*), sebuah HCS (*Hollandsch-Chineesche School*), sebuah Schakel-School, tiga buah Europeesche (*Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs*) dan sebuah MULO (*Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs*) pada tahun 1932. Kemajuan yang pesat bagi sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial, merupakan tantangan bagi sekolah-sekolah swasta yang sudah berlangsung sebelumnya.¹⁵⁷

Di samping adanya sekolah partikelir terdapat sekolah non partikelir (sekolah rakyat) diantaranya didirikan oleh masyarakat Muslim. Mereka mulai memperkenalkan pembaharuan dan pemahaman mengenai Islam. Kesadaran timbul akibat menurunnya ekonomi. Mahasiswa yang berada di Tanah Arab kembali ke Palembang. Mereka membawa perkembangan baru dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Sistem pesantren dan sistem pengajian diperbaharui dan disesuaikan dengan keadaan setempat.

¹⁵⁷Makmun Abdullah, dkk. *Kota Palembang: sebagai Kota Dagang dan Industri*, h. 103.

Pada tahun 1925 terjadi perubahan perekonomian rakyat yang semakin membaik. Keadaan tersebut disebabkan naiknya harga komoditas karet (parah) di pasar internasional. Kondisi ini memicu masyarakat untuk melakukan kegiatan lainnya, terutama pada bidang pendidikan. Hal tersebut dibuktikan terdapat banyak Mahasiswa di Arab. Mahasiswa asal Palembang sebanyak 25 orang. Catatan tersebut tertulis dalam buku Dr. Soetomo berjudul "Stoeden-stoeden Kita di Centrum Islam". Dr. Soetomo mencatat "*...di antara mereka saya hitoeng: 25 stoedent dari Palembang, 18 dari Padang, 5 dari Kroe, 7 dari Borneo, 2 dari Atjeh, 6 dari Soematra Timoer, 7 dari Lampoeng dan jang lainja dari Djawa, di antaraja 2 orang dari Batavia dan seorang dari Chirebon.*"¹⁵⁸ Jumlah tersebut adalah yang paling banyak dari daerah lainya.

Sebagaimana pembaharuan pemikiran Islam di Keresidenan Palembang dipengaruhi gagasan reformasi yang dibawa oleh Muhammad Abduh dan muridnya Rasyid Ridha di Mesir pada Abad ke 18 dan 19. Pemikiran tersebut dibawa oleh Mahasiswa yang berpendidikan di Tanah Arab. Pada awalnya kondisi ini ditandai oleh cabang organisasi Muslim Muhammadiyah dan al-Isyrad di beberapa tempat di Keresidenan Palembang sejak 1926.¹⁵⁹

¹⁵⁸Ismail, *Madrasah dan Pergolakan Sosial Politik di Keresidenan Palembang, 1925-1942* (Idea Sejatera: Yogyakarta, 2014), h. 63.

¹⁵⁹Ismail, *Madrasah dan Pergolakan Sosial Politik di Keresidenan Palembang, 1925-1942*, h. 64.

Sementara itu tidak hanya Muhammadiyah, Nadhatul Ulama dan Serikat Islam juga berperan dalam membina lembaga-lembaga pendidikan di dalam dan di luar Kota Palembang. Pada tahun 1932, organisasi Muhammadiyah mendirikan sekolah rakyat di Empat Ulu, Sekolah Rakyat di jalan Mayor Ruslan dan HIS Muhammadiyah di 24 Ilir. Sedangkan Serikat Islam mendirikan pendidikan Islam di Air Itam yang didirikan oleh Haji Abdulhamid tahun 1937. Nadhatul Ulama juga ikut mengolah madrasah-madrasah agar setingkat dengan Sekolah Dasar.¹⁶⁰

Selain sekolah Islam, sekolah bersifat nasional pun berkembang di Keresidenan Palembang ditandai dengan berdirinya Taman Siswa pada tahun 1932. Sekolah tersebut didirikan orang terkemuka yakni Ki Hanung, RA Najamuddin dan Raden Mad. Lalu didirikan Sekolah Rendah dikenal sebagai “Taman Muda” yang sederajat dengan HUS. Kemudian tahun 1938 perguruan ini mendirikan “Taman Dewasa” yang sederajat dengan MULO.¹⁶¹

Secara keseluruhan dapat disimpulkan pendidikan di Keresidenan Palembang, karena kebutuhan akan industri dan ekonomi. Untuk itu Belanda mendirikan sekolah-sekolah partikelir. Sekolah-sekolah tersebut bertujuan sebagai penyalur tenaga kerja yang berpendidikan. Sedangkan sekolah pribumi (pesantren) mulai diperbaharui dengan sistem sekolah Belanda. Selanjutnya, pada saat memasuki

¹⁶⁰Makmun Abdullah, dkk. *Kota Palembang: sebagai Kota Dagang dan Industri*, h. 104.

¹⁶¹Ibid., 01.

masa pergerakan nasional maka berdirilah sekolah bersifat nasional yang disetarakan dengan sekolah Belanda.

C. Dampak Perekonomian Kota Palembang Pada Bidang Politik

Sistem politik di Keresidenan Palembang didominasi oleh golongan yang berkuasa serta tidak didorong oleh nilai-nilai etis untuk membina kematangan politik. Strategi-strategi pada pemerintahan didominasi oleh Kolonial Belanda. Hal tersebut terlihat dari penerapan sistem dualistis baik pada pemerintahan maupun pada perekonomian. Sistem tersebut agar sesuai dengan tujuan Kolonial Belanda untuk menguasai kekayaan alam di wilayah jajahannya.

Pada pemerintahan, Kolonial Belanda masih memanfaatkan struktur lama (sesuai adat) yakni *pasirah* (kepala marga) yang memimpin marganya di dusun masing-masing. Di atas mereka ada *demang* (kepala distrik atau kepala daerah) yang berada di bawah pengawasan kontrolir Belanda. Selanjutnya para kontrolir bertanggung jawab kepada residen.¹⁶² Hal ini membuktikan bahwa sistem pemerintahan barat berdampingan dengan pemerintahan adat yang berdasarkan turun-temurun. Sifat dualistis tersebut diakibatkan adanya dua penentu kebijakan dalam satu wilayah, yakni pemerintah kolonial dan penguasa tradisional.¹⁶³

¹⁶²Yuliati, "Dampak Kebijakan Kolonial di Jawa", dalam *SEJARAH DAN BUDAYA*, Tahun Ketujuh, Nomor 1, Juni 2013, Jurusan Sejarah FIS Universitas Negeri Malang, artikel diakses pada 11 November 2016 dari <http://www.journal.um.ac.id/>.

¹⁶³Boeke dan Burger, *Ekonomi Dualistis: Dialog antara Boeke dan Burger* (Jakarta: Balai Pustaka, 1973), h. 41.

Alat untuk menjalankan perekonomian kolonial Belanda menggunakan ikatan desa dan pengabdian feodal. Hal ini mengakibatkan kedudukan para bupati dikembalikan kepada tempat semula sebagai kepala tradisional rakyatnya, dan cara untuk meningkatkan prestise bupati adalah dengan menyerahkan tanah kepada bupati dengan tujuan penduduk dapat memberikan tenaga dan hasil dari tanah akan mengalir kepada pemerintah kolonial. Kebijakan ini sepertinya mengangkat prestise para kepala tradisional, namun sesungguhnya pengaruh para bupati diperkecil, sebab mereka hanya sebagai mandor penanaman. Untuk mengawasi sistem baru ini, pegawai Belanda disebar diantara para bupati, hal ini merupakan awal dari pengawasan dan pemerintahan tidak langsung, yang menempatkan seorang penasehat Belanda berdampingan dengan pegawai tinggi Indonesia.¹⁶⁴

Sedangkan pada sistem perekonomian terdapat dua sistem yang berlaku yakni sistem ekonomi bercorak “barat” dalam hal ini Undang-Undang Agraria 1870 dan sistem ekonomi tradisional atau sistem adat yang berlaku disetiap daerah. Menurut Boeke maka sistem ekonomi suatu masyarakat itu dapat homogen atau dualistis. Masyarakat sebaliknya disebut dualistis atau pluralistis apabila di masyarakat tersebut sekaligus terdapat secara terpisah dua sistem atau lebih dan dengan demikian dapat dibedakan dengan jelas yang satu dengan yang lain.¹⁶⁵

¹⁶⁴Yuliati, “Dampak Kebijakan Kolonial di Jawa” , dalam *SEJARAH DAN BUDAYA*, Tahun Ketujuh, Nomor 1, Juni 2013, Jurusan Sejarah FIS Universitas Negeri Malang, artikel diakses pada 11 November 2016 dari <http://www.journal.um.ac.id/>.

¹⁶⁵Boeke dan Burger, *Ekonomi Dualistis: Dialog antara Boeke dan Burger* (Jakarta: Balai Pustaka, 1973), h. 41-42.

Dari penerapan Undang-Undang Agraria melahirkan sistem *politik pintu terbuka*. Sistem politik liberal tersebut dilakukan oleh pemerintah Belanda, golongan pengusaha swasta Belanda, yang merupakan kaum liberal.¹⁶⁶ Mereka datang ke Indonesia terutama ke Pulau Sumatra untuk menanamkan modal mereka melalui usaha perkebunan kopi, karet, teh dan kapas. Liberalisme menghendaki kegiatan ekonomi swasta tanpa campur tangan dari pemerintah sehingga kemakmuran rakyat dengan sendirinya dapat tercapai. Orang-orang liberal berkeyakinan bahwa perkembangan ekonomi yang pesat yang dicetuskan oleh kegiatan usaha swasta akan membawa kesejahteraan yang lebih besar bagi rakyat Indonesia tanpa tindakan khusus dari pihak pemerintah Belanda. Akan tetapi dari campur tangan pemerintah Belanda merugikan rakyat pribumi atas kebijakannya.

Dengan demikian, dampak politik perekonomian di Keresidenan Belanda berkaitan terhadap sistem dualistis baik pada pemerintahan maupun perekonomian sehingga melahirkan sistem politik pintu terbuka. Dimana kebijakan tersebut mebebaskan kaum liberal untuk menanamkan modalnya tahun 1870. Ketika Undang-Undang Agraria mulai diterapkan untuk penanaman komoditi ekspor. Sehingga terpenuhinya strategi-strategi Belanda untuk menguasai kekayaan alam di Keresidenan Palembang.

¹⁶⁶T. Simbolon Parakitri, *Menjadi Indonesia* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 1995), h 160.

BAB V PENUTUP

A. SIMPULAN

Setelah penulis mengadakan penelitian mengenai “Sejarah Prekonomian Kota Palembang: Masa Pemerintahan Kolonial Belanda tahun 1825-1942 serta berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan bahwa: sebelum kedatangan bangsa barat, Kota Palembang sejak dulu telah menjadi bandar perdagangan di Nusantara. Kekuasaan saat itu adalah Kerajaan Sriwijaya yang terkenal akan emas, sutera serta komoditas lainnya. Melalui jalur perdagangan itulah berkembang agama Islam.

Para pedagang India, Arab, Persia, Cina dan bangsa lainnya melakukan proses jual beli di Sungai Musi. Sehingga pada saat itu berkembanglah agama Islam pada awal abad ke-17. Sejak saat itu terbentuklah perkampungan Islam dan kekuasaan Islam. Kerajaan Palembang terlebih dahulu berkembang dimana komoditas perdagangan yang diwariskan masa Sriwijaya. Sedangkan pada masa ini kontak dagang pertama VOC menjalin kerja sama dengan Sedo Ing Kenayan tahun 1917.

Selanjutnya pada masa awal Kesultanan Palembang yakni masa Sultan Abdurrahman atau Kyai Mas Endi melakukan kebijakan pada sektor tata kota. Pada sektor tersebut beliau membangun sektor usaha. Sektor usaha bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Kesultanan Palembang Darussalam. Selain itu, pada masa ini dibangun beberapa bangunan batu seperti: Keraton Beringin Janggut dan

Masjid Lama. Dari berbagai pembangunan tersebut berasal dari pajak-pajak Kesultanan Palembang Darussalam.

Pada masa awal Kesultanan Palembang Darussalam 1659-1724 komoditas telah memiliki aktivitas ekspor-impor. Diantaranya timah dan lada yang menjadi komoditas terpenting bagi perdagangan. Selain itu berbagai jenis barang perdagangan yang diperjual-belikan. Dari transaksi tersebut munculah hubungan *mutualisme* antar pedagang untuk memenuhi suplai kebutuhannya.

Pada masa kejayaan Kesultanan Palembang Darussalam 1724-1803 memiliki berbagai kebijakan untuk membangun perekonomian. Diantaranya, *tiban-tukon* terhadap perdagangan. Selain itu, Kebijakan mengeluarkan mata uang yang disebut *pitis*. Dalam pembangunan fisik dilakukan oleh Sultan Jayo Wikramo. Beliau banyak mendirikan bangunan batu seperti: Makam Lemabang, Masjid Agung, dan Keraton Kuto Batu. Sedangkan Sultan Bahaudin melakukan pengembangan tambang timah dan kebijakannya melalui perdagangan bebas. Akibat dari perdagangan bebas menimbulkan perdagangan gelap. Sehingga banyak perdagangan yang terjadi di luar kontrol pihak Kesultanan.

Selanjutnya, kondisi perekonomian pada masa akhir Kesultanan Palembang Darussalam tahun 1803-1825 berangsur-angsur mengalami penurunan. Karena kesultanan berupaya untuk mempertahankan daerahnya. Terdapat beerbagai kebijakan pada masa ini yakni pembangunan beberapa benteng di wilayah Kesultanan. Serta banyak pemberontakan yang terjadi pada rakyat pedalaman(Pasemah). Sehingga hubungan pihak Kesultanan dengan rakyat pedalam kurang baik.

Sedangkan pada masa Keresidenan Belanda tahun 1825-1942 juga terdapat berbagai kebijakan-kebijakan ekonomi diantaranya membentuk sistem administrasi. Sistem tersebut berupa penataan wilayah Keresidenan Palembang menjadi 3 *afdeling* dan pengangkatan pejabat daerah di bawah Kerajaan Belanda. Selain administrasi, Kolonial Belanda juga menerapkan Undang-Undang Pokok Agraria untuk mengelola tanah. Dari kebijakan tersebut maka timbulah penguasa swasta untuk menanamkan modalnya di Keresidenan Palembang. Sehingga terbentuklah lahan-lahan perkebunan di Keresidenan Palembang. lahan-lahan perkebunan tersebut diantaranya: perkebunan kapas, kopi dan karet. Di Keresidenan Palembang juga berdiri kilang-kilang minyak dan tambang Batubara. Kondisi perekonomian di Keresidenan Palembang dibawah kontrol pejabat buatan Belanda.

Dari kebijakan-kebijakan Kolonial Belanda di Keresidenan Palembang menimbulkan dampak-dampak dalam bidang pembangunan, sosial, keagamaan dan politik. Dalam bidang pembangunan terbentuknya Palembang sebagai pusat kota (*Gementee*). Sehingga banyak dilakukan pembangunan sarana-prasarana penunjang perekonomian. Diantaranya peralihan jalan air ke darat, serta pembangunan pusat-pusat perekonomian. Selanjutnya pada bidang sosial terbentuknya struktur masyarakat yang baru. Dimana pedagang Cina dan Arab mendapatkan posisi di Keresidenan Palembang. lalu akibat adanya lahan-lahan industri di Keresidenan Palembang maka munculah urbanisasi dan mendirikan pemukiman-pemukiman di Palembang. Selanjutnya pada bidang keagamaan khususnya agama Islam, pengaruh ekonomi terlihat pada Ibadah haji dan minat menjadi Mahasiswa di Tanah Arab.

Harga karet yang tinggi menjadikan faktor penentu dampak tersebut. Atas dasar mencari pegawai berpendidikan Keresidenan Belanda mendirikan berbagai sekolah pemerintahan. Di lain pihak atas berkembangnya paham keislaman yang di bawah dari Arab membuat pesantren menjadi sekolah-sekolah Islam. Sedangkan dari sisi politik yang ditimbulkan dari perekonomian di Keresidenan Palembang yakni berlakunya sistem politik pintu terbuka. Atas dasar tersebut Keresidenan Belanda pengambilan kekayaan alam secara besar-besaran di Keresidenan Palembang.

B. SARAN

Saran ditujukan untuk segenap masyarakat Sumatera Selatan: untuk lebih paham sejarah lokal. Dari sejarah lokal kita dapat mengetahui potensi kekayaan alam di Sumatera Selatan. Potensi tersebut sebagai penunjang perekonomian masyarakat Sumatera Selatan yang akan datang.

Penulis mengalami kesulitan untuk mendapatkan sumber-sumber mengenai sejarah lokal khususnya yang disusun oleh sejarawan. Kesulitan lain yakni terhadap penguasaan bahasa Belanda dalam menerjemahkan arsip-arsip ataupun catatan-catatan perdagangan Belanda. Untuk itu, penulis mengharapkan generasi selanjutnya dapat melengkapi kesempurnaan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Arsip

ANRI. *Algemeen Jaarlijksch Verlagen Van de Resident Palembang 1832-1846.*

Bundel Palembang. 62. 6. No. 06.

ANRI. *Brievenbook Van de Resident Palembang aan Gouverneur General 1828-1829.*

Bundel Palembang. no. 43/10.

B. Buku

Ahmad Tafsir. *Filsafat Umum Akal dan Hati Sejak Thales Sampai Capra.* Remaja

Rosdakarya: Bandung, 2008.

A. Daliman. *Metode Penelitian Sejarah.* Yogyakarta: Ombak, 2002.

Bambang Budi Utoyo. dkk.. *Kota Palembang: Dari Wanua-Sriwijaya Menuju*

Palembang Modern. Pemerintah Kota Palembang: Palembang, 2012.

Bangun P. Lubis. dkk.. *Masjid Agung Palembang: Sebuah Persembahan Kepada*

Masyarakat Sumatera Selatan. Sumatera Selatan: Pemprov. Sumatera

Selatan, 2004.

Benyamin Lakitan. *Metodologi Penelitian.* Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998.

Boeke dan Burger. *Ekonomi Dualistis: Dialog antara Boeke dan Burger.* Jakarta:

Balai Pustaka, 1973.

BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman). *Simposium*

Undang-Undang Pokok Agraria dan Kedudukan Tanah-Tanah Adat Dewasa

ini. Jakarta: Bina Cipta, 1978.

- Ch. V. Langlois dan Ch. Seignobos. *Pengantar Ilmu Sejarah*. terj. Supriyanto Abdullah. Yogyakarta: Indo Literasi, 2015.
- Chusnul Hayati. dkk.. *Buku Materi Pokok Sejarah Indonesia*. Jakarta: Karunika, 1985.
- Daldjoeni. N. *Geografi Kota dan Desa*. Bandung: Penerbit Alumni, 2003.
- Dedi Irwanto M. Santun. dkk.. *Iliran dan Uluan: Dinamika dan Dikotomis Sejarah Kultural Palembang*. Yogyakarta: Eja Publiser, 2010.
- Dedi Irwanto M. Santun. *Venesia dari Timur: Memaknai Produksi dan Reproduksi Simbolik Kota Palembang dari Kolonial Sampai Pasca Kolonial*. Yogyakarta: Ombak, 2011.
- Deliar Noer. *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Medan: Dwipa, 1995.
- Djohan Hanafiah. *Kuto Besak: Upaya Kesultanan Palembang Menegakkan Kemerdekaan*. Haji Mas Agung: Jakarta, 1989.
- Djohan Hanafiah. *Masjid Agung Palembang: Sejarah dan Masa Depannya*. Haji Mas Agung: Jakarta, 1988.
- Djohan Hanafiah. *Melayu-Jawa: Citra Budaya dan Sejarah Palembang*. RajaGrafindo Persada: Jakarta, 1995.
- Djohan Hanafiah. *Palembang Zaman Bari: Citra Palembang Tempo Doeloe*. Palembang: Humas Pemkot Palembang, 1998.
- Djohan Hanafiah. *Sejarah Keraton-Keraton Palembang: Kuto Gawang*. Pemerintah Kota Palembang: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2005.

- Djohan Hanafiah. *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang*. Palembang: Pemerintah Kota Palembang Daerah Tk. II, 1998.
- Dudung Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak, 2011.
- Gunawan Sumodiningrat. *Sistem Ekonomi Pancasila dalam Perspektif*. Jakarta: Impac Wahana Cipta, 1999.
- Heidhues. Mary F. Somers. *Timah Bangka dan Lada Mentok: Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pembangunan Pulau Bangka Abad XVIII s/d Abad XX*. Jakarta: Yayasan Nabil, 2008.
- Husni Rahim. *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi Tentang Pejabat Agama pada Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*. Bukit Pemulang Indah: Logos Wacana Ilmu, 1991.
- I Ketut Ardhana. "Denpasar: Perkembangan dari Ibu Kota Kolonial hingga Kota Wisata." dalam Basundoro dan Jhony Alfian Khusyain ed. *Kota Lama Kota Baru: Sejarah Kota-Kota di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak, 2005.
- Ismail. *Madrasah dan Pergolakan Sosial Politik di Keresidenan Palembang. 1925-1942*. Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2014.
- J. L. Van Sevenhoven. *Lukisan Tentang Ibu Kota Palembang*. Jakarta: Bhatara, 1971.
- J. Van Gelderen. *Ceramah tentang Ilmu Ekonomi Jajahan Daerah Khatulistiwa*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982.
- Jeroen Peeters. *Kaum Tuo-Kaum Mudo: Perubahan Religius di Palembang 1821-1942*. Jakarta: INIS, 1997.

- Jousari Hasbullah. *Mamang dan Belanda: Goresan-Goresan Wajah SumSel Zaman Kolonial dan Refleksinya pada Hari Ini*. Palembang: UNSRI, 1996.
- Kemas A.Rachman Panji. *Masyarakat Tionghoa Palembang. Tinjauan Sejarah Sosial (1823-1945)*. Palembang: Forum Pengkajian Sejarah Sosial dan Budaya (FPS2B dengan Paguyuban Sosial Masyarakat Tionghoa Palembang(PSMTI), 2002.
- Ki Agoes Mas'Oed. *Sedjarah Palembang Moelai Sedari Seri-Widjaja Samapai Kedatangan Balatentara Dai Nippon*. Palembang: Sinar Matahari, 1941.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995.
- Latifah Ratnawati. "Kebudayaan Palembang." dalam Achadiati Ikram. *Jati Diri Yang Terlupakan: Naskah-Naskah Palembang*, Jakarta: Yanassa, 2004.
- Louis Gotshalk. *Understanding History Mengerti Sejarah*. Terjemahan Nugroho Notosusato. Jakarta : UI Press, 1975.
- M. Ali Amin. "Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam dan Beberapa Aspek Hukumnya." dalam K. H. O. Gadjahnata (ed.). *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*. Jakarta: UI Press, 1968.
- Makmun Abdullah. dkk. *Kota Palembang: sebagai Kota Dagang dan Industri*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984.
- MC. Ricklefs. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.
- Mestika Zed. *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950*. Jakarta: LP3ES, 2003.

- Mestika Zed. *Metodologi Sejarah*. Padang: Universitas Negeri Padang, 1999.
- Nor Huda. *Islam Nusantara Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*. Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2013.
- P. de Roo de la Faille. *Dari Zaman Kesultanan Palembang*. Jakarta: Bhratara, 1971.
- Prajudi Atmosudirjo. *Sejarah Ekonomi Indonesia dari Segi Sosiologi Sampai Akhir Abad XIX*. Pradnya Paramita: Jakarta, 2006.
- Purnawan Basundoro. *Dua Kota Tiga Zaman: Surabaya dan Malang sejak Kolonial Sampai Kemerdekaan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2009.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. edisi 3. cet. III. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005.
- R. Z. Leirissa. dkk.. *Sejarah Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Ombak, 2012.
- Retno Purwanti. “Peran Sungai Musi dalam Pembentukan Pusat Politik Ekonomi dan Budaya Masyarakat Palembang.” dalam ed. Bambang Budi Utomo. *Ekspedisi Sriwijaya Mencari Jalur yang Hilang*. Balai Arkeologi: Palembang, 2010.
- Rivai Bakti. *Palembang Ibu Kota Sriwijaya Layak Jadi Ibu Kota Indonesia*. Palembang: Assiri, 2011.
- Salman Aly “Sejarah Kesultanan Palembang.” dalam K. H. O. Gadjahnata ed.. *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*. Jakarta: UI Press, 1968.
- Sartono Kartodirdjo. *Sejarah Perkebunan di Indonesia. Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Adtya Media, 1991.

- Sartono Kartodirjo. *Pendekatan Ilmu Sosial Dan Metode Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Stephen K. Sanderson. *Makro Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sumanto. *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian: Psikologi, Pendidikan, Ekonomi Bisnis, dan Sosia*. Jakarta: Buku Seru, 2014.
- Supriyanto. *Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang 1824-1864*. Palembang: Ombak, 2013.
- T. Simbolon Parakritri. *Menjadi Indonesia*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 1995.
- Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan Museum Negeri Propinsi Sumatera Selatan Balaputera Dewa. *Syair Perang Palembang*. Palembang: Museum Balaputera Dewa, 1995.
- William Marsden. *Sejarah Sumatra*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.

C. Internet

- Afrizal. *Menganalisis Dampak Sosial Pembangunan*. artikel diakses pada 15 Desember 2015 melalui <http://repository.unand.ac.id/2225/>.
- Bambang Purwanto. "Menelusuri Akar Ketimpangan dan Kesempatan Baru: Catatan Tentang Sejarah Perkebunan Indonesia". artikel diakses pada 31 Agustus 2016 dari <http://sejarah.fib.ugm.ac.id/>
- Farida. *Sejarah Perekonomian Kesultanan Abad XVII hingga Awal Abad XIX*. Artikel diakses pada 9 Maret 2016 dari

[http://eprints.unsri.ac.id/2358/2Daftar Isi dan isi Lontar Edisi Januari-Juni 2009.pdf](http://eprints.unsri.ac.id/2358/2Daftar_Isi_dan_isi_Lontar_Edisi_Januari-Juni_2009.pdf).

Kemas A. R. Panji dan Sri Suriana. *Sejarah Keresidenan Palembang*. artikel diakses pada 2 April 2016 dari http://jurnal.Raden_fatah.ac.id/index.php/tamaddun/article/view/28.

Ratna Handayani Pramukti , “Manusia dan Sejarah”, diakses pada 2 April 2016 dari <http://manusiadansejarah.blogspot.co.id/>

Yuliati. “Dampak Kebijakan Kolonial di Jawa” . dalam *SEJARAH DAN BUDAYA*. Tahun Ketujuh. Nomor 1. Juni 2013. Jurusan Sejarah FIS Universitas Negeri Malang. artikel diakses pada 11 November 2016 dari <http://www.journal.um.ac.id/>.

1129

*Staet vande voornaamste uitzgeworde Palembang.
sche Producten gedurende het Jaar 1839...*

Benaming der Producten	Gewigt	Waarde		Aanmerkingen
	ƛ Maaet			
Berrien	229 ¹ / ₁₀₀ pikels	11205	50	
Pindrotting	203 ¹ / ₁₀₀ id.	17790	10	
Dammer	1020 id.	4112	-	
Drakenbloed	31 id.	1692	-	
Gambier	1162 ¹ / ₁₀₀ id.	21652	-	
Gerid	22 ¹ / ₁₀₀ Kuyes	29962	30	
Heritwerken	944 ¹ / ₁₀₀ Kuyes	20252	50	
Ketoven (gezuiverd)	901 ¹ / ₁₀₀ pikels	22340	-	
Ketoven (ongezuiverd)	19996 ¹ / ₁₀₀ id.	139979	30	
Kieffy	1292 ¹ / ₁₀₀ id.	22390	30	
Oliefantstanden	10 ¹ / ₁₀₀ id.	2162	-	
Ijzer	222 ¹ / ₁₀₀ id.	7792	30	
Rijst	10626 ¹ / ₁₀₀ id.	26592	55	
Vogelnesten	51 ¹ / ₁₀₀ id.	8962	-	
Was	472 ¹ / ₁₀₀ id.	42227	-	
Zeilgaren (Rame)	27611 stangen	22252	50	
Zijde Stoffen		4599	-	
	Totaal..y	296440	05	

Palembang, ultimo December 1839.
De Kommissarische der Inkomst-Regt
Blisberg

Lampiran 1: Catatan Negara Mengenai Perkiraan Penjualan
Komoditas Barang Dagang Palembang tahun 1839

Sumber: ANRI; *Algemeen Jaarlijksch Verlagen Van de Resident Palembang 1832-1846.*

Bundel Palembang. 62. 6. No. 02.

1170

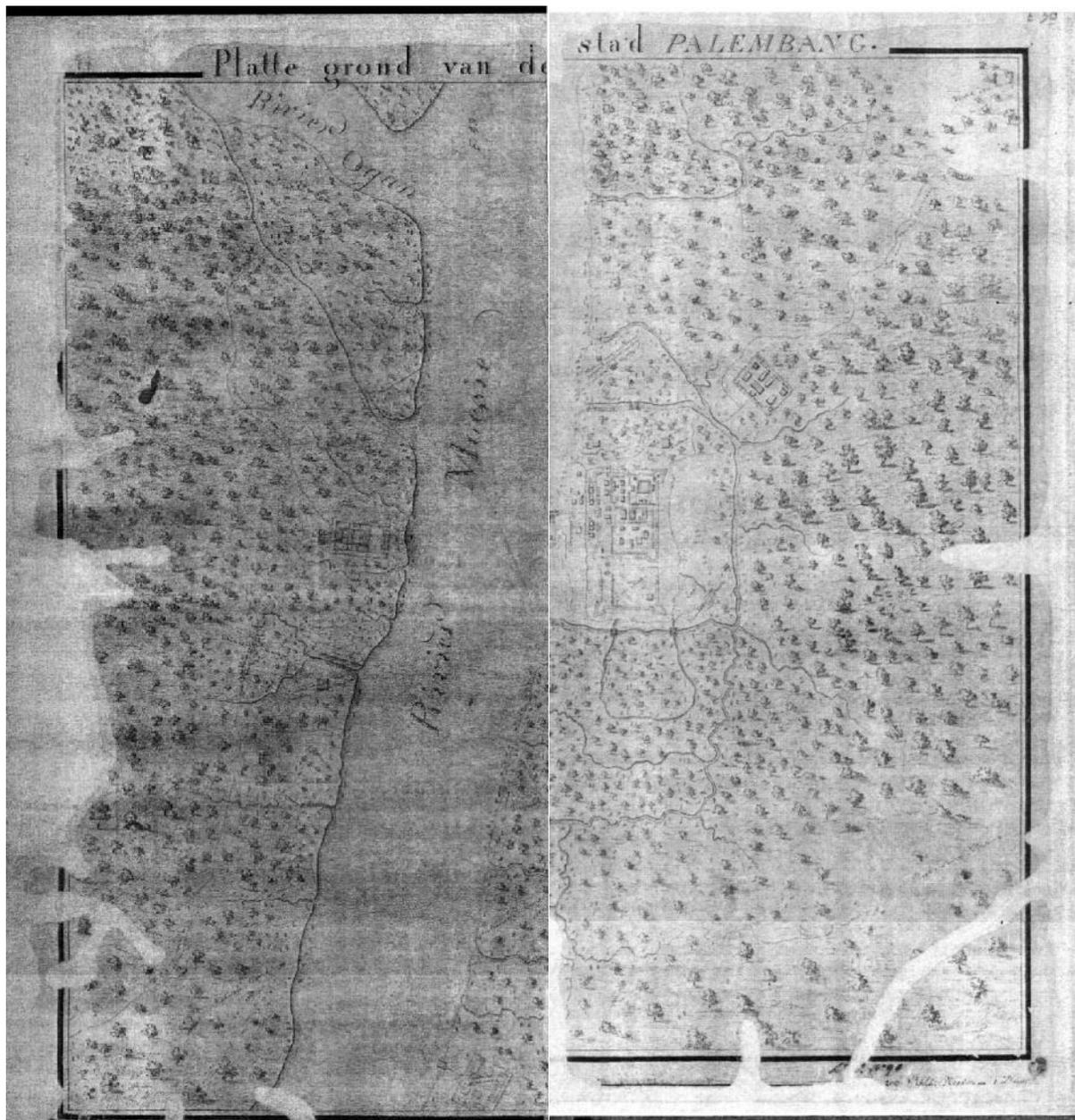
*Staat van de voornaamste uitgeworde Palembang-
bangsche Producten gedurende het Jaar 1840.*

<i>Benaming der Producten</i>	<i>Gewigt of Maat</i>	<i>Waarde</i>	<i>Opmerkingen</i>
<i>Benzoin</i>	<i>1044¹/₁₀₀ pikuls</i>	<i>20070</i>	<i>25</i>
<i>Bendrotling</i>	<i>4011 id.</i>	<i>19659</i>	<i>30</i>
<i>Dammer</i>	<i>1157¹/₁₀₀ id.</i>	<i>9616</i>	<i>.</i>
<i>Drakenbloed</i>	<i>36¹/₁₀ id.</i>	<i>1207</i>	<i>50</i>
<i>Gambier</i>	<i>1892¹/₁₀₀ id.</i>	<i>18427</i>	<i>.</i>
<i>Geid</i>	<i>742¹/₁₀₀ kuyes</i>	<i>89600</i>	<i>.</i>
<i>Heitwerken</i>	<i>343¹/₁₀₀ kuyes</i>	<i>17005</i>	<i>25</i>
<i>Kateon (gezeiverd)</i>	<i>3309 pikuls</i>	<i>92616</i>	<i>.</i>
<i>Kateon (ongerzeiverd)</i>	<i>15717¹/₁₀₀ id.</i>	<i>110489</i>	<i>70</i>
<i>Koffy</i>	<i>1271¹/₁₀₀ id.</i>	<i>26701</i>	<i>70</i>
<i>Cliefantstanden</i>	<i>19¹/₁₀₀ id.</i>	<i>4066</i>	<i>.</i>
<i>Peper</i>	<i>633¹/₁₀ id.</i>	<i>6219</i>	<i>.</i>
<i>Rydt</i>	<i>1000 id.</i>	<i>23000</i>	<i>.</i>
<i>Vogelnesten</i>	<i>201¹/₁₀₀ id.</i>	<i>3059</i>	<i>.</i>
<i>Was</i>	<i>107¹/₁₀₀ id.</i>	<i>9774</i>	<i>30</i>
<i>Zelwaren (ruwe)</i>	<i>42611 stangen</i>	<i>10789</i>	<i>50</i>
<i>Zyde stoffen</i>		<i>2911</i>	<i>50</i>
	<i>Totaal</i>	<i>459247</i>	<i>40</i>

Palembang, ultimo December 1840.
De Kommissar van de Resident
W. H. C. de Koning

Lampiran 2: Catatan Negara Mengenai Perkiraan Penjualan
Komoditas Barang Dagang Palembang tahun 1840

Sumber: ANRI; *Algemeen Jaarlijksch Verlagen Van de Resident Palembang 1832-1846* Bundel Palembang. 62. 6. No. 06



Lampiran 3: Denah Kota Palembang Tahun 1871
Sumber: ANRI; HB/1871/No. 1